

**ETNISITAS, PRIMORDIALISME, DAN JEJARING
POLITIK DI SULAWESI SELATAN (STUDI
PILKADA DI SULAWESI SELATAN TH 2007-2008)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
Pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Oleh:

SUGIPRAWATY

D4B 007 008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan tim pembimbing, dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar magister, baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2009

Yang membuat pernyataan,

SUGIPRAWATY
NIM. D4B 007 008

LEMBAR PERSETUJUAN

ETNISITAS, PRIMORDIALISME, DAN JEJARING POLITIK DI SULAWESI SELATAN (STUDI PILKADA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007-2008)

Oleh:
Sugiprawaty
NIM. D4B 007 008

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains
Program Magister Ilmu Politik

Semarang, 12 Juni 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Purwoko, MS
NIP. 131 124 441

Drs. Priyatno Harsasto, MA
NIP. 131 681 415

Motto

“Usaha saja belumlah cukup mengantarkan ke pantai tujuan, karena badai kehidupan sering kali melanda. Namun tatkala biduk dikemudikan dengan ketekunan, dilayarkan dengan semangat, maka angin rahmat pun bertiup dari buritan. Tercapainya tujuan dimulai dari langkah pertama dan takkan terjangkau jika tak tahu arah tujuan”

*“Resopa Temmangingi, matinulu,
Namalomo Kalelei Pammase Dewata Serwa-E”
(Rahmat Tuhan hanya bisa diraih dengan kerja keras dan keuletan)*

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:

ETNISITAS, PRIMORDIALISME, DAN JEJARING POLITIK DI SULAWESI SELATAN (STUDI PILKADA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007-2008)

Yang disusun oleh Sugiprawaty, NIM. D4B007008
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 1 Juni 2009
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji Lain

1. Yuwanto, Ph.D

Drs. Purwoko, MS

Sekretaris Penguji

2. Dra. Rina Martni, MSi

Drs. Priyatno Harsasto, MA

Semarang, 1 Juni 2009
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

Abstrak

Perubahan politik nasional dari rezim orde baru yang otoriter dengan penerapan sistem pemerintahan yang sentralistis, beralih pada sistem politik demokratis meluas sampai pada tingkat lokal. Kehadiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang mewujudkan aspirasi daerah untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah langsung.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 menjadi ruang kontestasi yang terbuka bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditopang oleh etnis Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Tiga pasangan calon dianggap mewakili etnis, yakni pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly sebagai representasi etnis Bugis, pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar-Mubyl Handaling juga representasi etnis Bugis, dan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Numang sebagai representasi etnis Makassar dan etnis Bugis. Kemenangan Syahrul Yasin Limpo dari etnis Makassar menandai pergeseran elite dari etnis Bugis ke etnis Makassar.

Dari hasil penelitian ini tergambar ketokohan dan kompetensi yang dimiliki Syahrul menjadi faktor yang determinan dalam memenangkan pemilihan gubernur. Syahrul memiliki keterampilan politik dalam mendapatkan dukungan dari: *lintas partai politik*, *lintas etnis*, dan *lintas agama*. Jejaring politik Syahrul di berbagai organisasi dan semua kalangan termasuk komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang beragama Kristen yang kemudian memberikan arti yang signifikan terhadap kemenangannya dengan dukungan Partai Damai Sejahtera dan dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan. Selain itu Syahrul menggunakan pendekatan primordial (ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan kewilayahan).

Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, etnisitas semakin lemah. Sentimen etnis juga lemah walaupun sengaja dimunculkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ikatan-ikatan primordial. Terlihat dari dukungan etnis Makassar yang sangat dominan kepada Syahrul dan kemampuan Amin Syam untuk memenangkan daerah-daerah yang merupakan kantong etnis Bugis.

Persaingan antaretnis Bugis dan Makassar berlanjut pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan menggunakan perpaduan kekuatan etnis Bugis dan Makassar dalam satu paket pasangan untuk dapat memenangkan pilkada. Sedangkan rekrutmen pada level yang lebih bawah, yakni proses penerimaan CPNS yang lebih berdasarkan sistem merit yang sedikit berbeda dengan rekrutmen tenaga honorer yang masih berdasarkan sistem kekerabatan.

Abstract

The transformation of centralistic national politics of the New Order regime into the democratic system has brought about democracy at the local level. The implementation of The Law No.32/2004 on Local Government (*Pemerintah Daerah*) is an opening window of opportunity for the people to elect their local leaders directly.

The 2007's South Sulawesi Governor Election became an open contest to all of the people in the Province of South Sulawesi including Bugis ethnic, Makassar ethnic, Toraja, and Mandar ethnic. The three couple of candidates were regarded to represent their ethnic, they were Amin Syam-Mansyur Ramly as Bugis' representative, along with Aziz Qahhar Mudzakkari-Mubyl Handaling who were also Bugis', and Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Numang as a mix of Makassar-Bugis ethnic. The victory of Makassar' Syahrul Yasin Limpo candidate had shown the elite's transform from Bugis ethnic into Makassar.

The result of this research shows that Syahrul's personality and competency are the determinant factors to win the election. Syahrul has the political ability to win the supports from: across political parties, across ethnics and across religions. Syahrul's political network in many organizations and all people, including Christian's community of South Sulawesi gave a significant contribution to his victory. He was supported by the Partai Damai Sejahtera and the unity of South Sulawesi's bishops. Syahrul also used the primordial approach (family-based, ethnic-based and region-based) to get supporters.

The ethnicity had weakened in the South Sulawesi Election. Ethnical sentiment could not help the candidates to get the support from voters though it was being emerged deliberately by the candidates. This fact could be relay on the big supports from the Makassar ethnic to Syahrul and the ability of Amin Syam to win the regions belong to Bugis ethnic.

The rivalry between Makassar and Bugis continued in the Regency Election with the use of the mix of Bugis-Makassar in one package to win the election. The recruitment in the lower level such as the *CPNS* test process which was more based on marriage system was a bit different with the "*honorer*" recruitment, which was based on the relatives system.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan segala kekurangan yang ada akhirnya penulis dapat merampungkan penyusunan tesis ini dengan judul “ **Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)**“. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik (S2) pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna bahkan disana sini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari aspek substansi maupun kedalaman pengetahuan pada diri penulis. Kendati demikian penulis berusaha seoptimal mungkin melakukan penyusunan sesuai dengan kaidah ilmu yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini. Untuk penyempurnaan tulisan karya ilmiah ini berbagai saran, kritik, dan pendapat sangat penulis harapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kepada semua pihak, secara khusus perkenankan penulis menghaturkan balasan cinta kasih kepada kedua orang tua kami (A. Mustain Pawellangi dan Icha Yusuf) yang telah mendukung penulis menempuh pendidikan jauh dari keluarga, semoga keberhasilan ini menjadi bakti bagi kedua orang tua kami. Juga adik-adikku (Jhundarwanty, Thahira), dan Nur Rifqi Aisha yang selama ini dengan tulus memberikan dukungan doa, cinta kasihnya, dan semangat yang penulis butuhkan.

Penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Yth. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD);
2. Yth. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Politik (Bapak Drs. Purwoko, MS, dan Bapak Drs. Tri Cahyo Utomo, MA), segenap dosen dan civitas akademika Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, beserta jajaran Sekretariat MIP;
3. Yth. Dosen Pembimbing I dan II (Drs. Purwoko, MS dan Drs. Priyatno Harsasto, MA) yang dengan sabar berkenan membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Yth. Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Bapak Ir. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Bapak Drs. Supomo Guntur, M.Si);
5. Yth. Sekretaris Daerah Kota Makassar (Bapak Anis Kama, SE, M.Si);
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar (Ibu Dra. Sittiara M.Si) beserta jajaran staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
7. Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar beserta segenap jajaran staf Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
8. Yth. Pembantu Dekan I Fisip Unhas (Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusy, MA), dan Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip Unhas (Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si);
9. Yth. Bapak Prof. Abu Hamid, Prof. Hamka Naping, Arifin Majid, S.E, MM, dan Rizal Suaib, S.IP;
10. Yth. rekan-rekan di Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang;

11.Yth. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam pembuatan tesis ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Semarang, Juni 2009

Sugiprawaty

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian Tesis	
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Halaman Motto	
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pilkada dan Demokratisasi	10
2.2 Desentralisasi	23
2.3 Politik Identitas Etnis	28
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	34
2.5 Definisi Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	43
3.2 Tipe dan Desain Penelitian	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data/ Penentuan Informan Penelitian	43
3.4 Teknik Analisis Data	45

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1	Profil Wilayah Sulawesi Selatan	46
4.2	Sejarah Pemerintahan dan Wilayah Administrasi.....	49
4.3	Elite Politik di Sulawesi Selatan	50
4.3.1	Asal Usul Elite	50
4.3.2	Stratifikasi Sosial Masyarakat	52
4.3.3	Hubungan Antarelite.....	55
4.4	Budaya Masyarakat di Sulawesi Selatan	58
BAB V	PERGESERAN ELITE POLITIK DI SULAWESI SELATAN PRA DAN PASCA REFORMASI ORDE BARU	
5.1	Pengangkatan Gubernur Sulawesi Selatan	
	Masa Orde Baru	61
5.1.1.	Pengangkatan Ahmad Lamo (1966-1978).....	61
5.1.2.	Pengangkatan Andi Oddang (1978-1983)	62
5.1.3.	Pengangkatan Ahmad Amiruddin (1983-1993).....	64
5.1.4.	Pengangkatan Z.B. Palaguna (1993-2003)	66
5.2	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Pasca Reformasi Orde Baru (Pemilihan Amin Syam Periode 2003-2008).....	70
BAB VI	KEKALAHAN POLITIK ETNIS: MUNCULNYA POLITIK JEJARING	
6.1	Rekonstruksi Politik Etnis Makassar	75
6.1.1	Munculnya Figur Syahrul Yasin Limpo	75
6.1.2	Kebangkitan Etnis Makassar.....	80
6.2	Keterampilan Politik Syahrul Yasin Limpo Dalam Mendapatkan Dukungan	85
6.2.1	Dukungan Lintas Partai Politik.....	85
6.2.2	Dukungan Lintas Etnis.....	96
6.2.3	Dukungan Lintas Agama	99
6.3	Hubungan Etnis Bugis dan Makassar Dalam Politik.....	102

BAB VII POLITIK IDENTITAS

7.1 Rekrutmen Jabatan Politis

(Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008)107

7.1.1 Persaingan Antaretnis 107

7.1.2 Persaingan Partai Politik 113

7.2 Rekrutmen CPNS dan Tenaga Honorer 116

BAB VIII SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

8.1 Simpulan 124

8.2 Implikasi Kebijakan 133

8.2.1 Implikasi Teoritik..... 133

8.2.2 Implikasi Empirik 135

8.3 Keterbatasan Penellitian 135

8.4 Agenda Penelitian Mendatang 135

Daftar Pustaka xi

Daftar Riwayat Hidup xiv

Lampiran xv

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
2.1	Rezim Politik dan Kebijakan Otonomi	25
4.1	Komposisi Etnis di Sulawesi Selatan tahun 2000.....	47
4.2	Perbandingan Sampel Survei LSI & Komposisi Etnis Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan	48
6.1	Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan	77
6.2	Peta Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan	86
6.3	Perolehan Suara Berdasarkan Pemetaan Geopolitik.....	104
7	Peta Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Halaman
1. Gubernur Sulawesi sampai Sulawesi Selatan Sekarang	xv
2. Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997	xvi
3. Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008....	xviii
4. Nama-Nama Pejabat Teras Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008.....	xx
5. Walikota Makassar Sampai Sekarang.....	xxi
6. Transkrip Wawancara dengan Informan.....	xxii
7. Izin Penelitian	xliv
8. Peta Provinsi Sulawesi Selatan	xlvi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peta geopolitik di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kantong-kantong etnis Bugis dan etnis Makassar dapat dipilah, namun percampuran kedua etnis tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten. Etnis Makassar sebagian besar mendiami jazirah bagian selatan meliputi: Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bulukumba dan sebagian Maros dan Pangkep. Sementara etnis Bugis mendiami jazirah bagian utara meliputi: Kabupaten Bone, Barru, Sidrap, Sinjai, Wajo, Soppeng, Luwu, Pare-Pare, Pinrang dan sebagian Maros dan Pangkep. Pemetaan geopolitik Sulawesi Selatan terbagi atas: Bosowa (Bone, Soppeng, Wajo), Ajatappareng (Barru, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Enrekang), Selatan-Selatan (Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Makassar, Pangkep), Luwu Raya (Luwu, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja).

Dominasi etnis Bugis terhadap etnis Makassar, Toraja, Mandar, dan etnis lainnya di Sulawesi Selatan dapat disimak pada komposisi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 berdasarkan etnis (Pada Lampiran 3). Berdasarkan tabel tersebut terlihat dari 73 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; etnis Bugis 58 orang, etnis Makassar 10 orang, etnis Toraja 2 orang, etnis Maluku 2 orang, dan etnis Jawa 1 orang. Dari komposisi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di atas, jelas tergambar bagaimana sistem politik di Sulawesi Selatan yang didominasi oleh etnis Bugis dan merasa termarginalnya etnis-etnis yang lain termasuk etnis Makassar yang dari segi kuantitas cukup banyak.

Untuk jabatan paling bergengsi di Sulawesi Selatan yakni gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan fokus penelitian ini, hampir selalu berasal dari Bugis. Dalam sejarah pemerintahan Sulawesi Selatan sejak orde lama sampai orde baru, lima gubernur yang memimpin Sulawesi Selatan dari Bugis, yakni: Ahmad Lamo (1966-1978), Andi Oddang (1978-1983), Ahmad Amiruddin (1983-1993), Z.B. Palaguna (1993-1998 dan 1998-2003), dan Amin Syam (2003-2008), yang bila dicermati lagi dominan berasal dari wilayah Bosowa (Bone-Soppeng-Wajo).

Jika diperhatikan bahwa sejumlah elite yang diangkat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan di masa orde lama dan orde baru merupakan orang-orang dari Sulawesi Selatan yang dianggap sukses di luar Sulawesi Selatan, yang didatangkan untuk menjadi pemimpin di tengah konflik lokal. Alasannya karena begitu tajamnya persaingan antaretnis dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sehingga menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menghindari munculnya konflik antaretnis tersebut dalam setiap pemilihan gubernur.

Sementara jabatan strategis baik dalam pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun pada sektor bisnis juga didominasi Bugis. Berdasarkan pemahaman tersebut kita melihat hubungan kekuasaan di Sulawesi Selatan didominasi etnis Bugis dan Makassar. Tidak bisa dipungkiri iklim, hukum dan budaya birokrasi di Sulawesi Selatan masih cenderung dibingkai fenomena etnosentrisme.

Kondisi ini dapat kita rasakan jika memasuki satu instansi pemerintahan atau bagian yang jika pejabat yang memegang posisi pimpinan berasal dari suatu daerah maka yang orang-orang yang menduduki posisi penting berasal dari daerah yang sama pula. Hal ini mempengaruhi pula pola pelayanan aparatur pemerintah sebagai konsekuensi

pemerintahan yang dikendalikan oleh satu kelompok yang sangat mewarnai pemerintahan daerah di masa orde baru. Gambaran tersebut dapat dilihat pada lampiran nama-nama pejabat teras Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan asal etnisnya terlampir.

Hal ini karena masyarakat Bugis Makassar termasuk memiliki keunikan, walaupun mereka telah menetap lama sampai beberapa generasi di luar Sulawesi Selatan, namun mereka tetap memiliki hubungan dan ikatan dengan kekerabatan mereka yang lebih disebabkan ikatan solidaritas (*Maseddi Siri*). Ikatan kekerabatan yang kental turut mewarnai etnisitas Bugis-Makassar dalam struktur politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Penulis mencoba melihat konstelasi politik lokal di Sulawesi Selatan khususnya dalam konteks Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bagian dari perubahan konstelasi politik nasional dari perspektif etnisitas.

Perubahan politik di Indonesia ditandai dengan runtuhnya orde baru yang otoritarian berubah menjadi sistem politik demokratis, berawal dari lengsernya otoriter Suharto yang kemudian membuka peluang aktor-aktor lain berkompetisi memperebutkan posisi tersebut. Perubahan konstelasi politik nasional pada Pemilihan Umum 2004 ditandai dengan munculnya beberapa partai seperti: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) suatu partai Islam dan berstatus pinggiran namun mampu memperoleh lebih dari 7 persen suara nasional dan merupakan partai terbesar di Jakarta, Partai Demokrat dan partai-partai kecil yang juga terhitung masih baru kemudian mengusung SBY-JK yang kemudian memenangkan Pemilihan Umum 2004 telah memecahkan dominasi GOLKAR-PPP-PDI. Hal ini turut mempengaruhi komposisi anggota DPR-MPR Indonesia. Sehingga terjadi interaksi antara kekuatan eks orde baru dengan kekuatan baru

yakni kelompok reformasi dalam perubahan politik di tingkat nasional yang kemudian turut pula mempengaruhi perubahan politik di tingkat lokal, dimana sistem pemerintahan sentralistik berubah menjadi desentralisasi (otonomi daerah) dengan dikeluarkannya Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membuka peluang kepada rakyat untuk mewujudkan aspirasi daerah dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pilkada langsung.

Tujuan utama desentralisasi adalah mengurangi beban pemerintah pusat dalam menangani urusan domestik sehingga terfokus merespon berbagai kecenderungan global dan berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang lebih strategis. Desentralisasi juga bertujuan agar pemerintah daerah mengalami proses pemberdayaan yang signifikan dan bertanggung jawab dengan tidak lagi dibawah dominasi pemerintah pusat...pemerintah pusat hanya berperan melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.¹

Sebagai koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi dan uniformisasi pemerintah pusat dengan keluarnya kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah yang dalam visi otonomi daerah yakni dibidang politik, ekonomi, sosial budaya. Untuk bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan penyelenggaraan

¹ Rasyid, Ryaas. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press. hlm. 8-9.

pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada azas pertanggungjawaban publik...²

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang merupakan peristiwa yang menandai kemajuan demokrasi di Indonesia. Otonomi daerah memberi ruang kepada daerah dalam proses suksesi kepala daerah masing-masing. Pilkada langsung dimaksudkan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi politiknya dalam memilih pemimpin daerahnya. Mulai tahun 2005, pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota dipilih secara langsung, mengikuti proses pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004. Pun masyarakat Sulawesi Selatan dihadapkan pada fenomena baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu dengan penyelenggaraan pilkada langsung.

Jika dilihat dari perspektif etnisitas, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan ibaratnya pertarungan tiga kerajaan besar yakni Syahrul Yasin Limpo mewakili Kerajaan Gowa, Amin Syam mewakili Kerajaan Bone, dan Azis Qahhar Mudzakkar mewakili Kerajaan Luwu. Dengan munculnya Syahrul Yasin Limpo menjadi gubernur terpilih sebagai simbol rekonstruksi politik orang-orang Makassar, sepertinya sejarah yang terulang kembali dimana orang-orang Makassar akan mengembalikan kejayaan orang-orang Makassar di masa Kerajaan Gowa masih berkuasa. Dalam konteks Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tentu dilandasi ikatan solidaritas dan sepenanggungan (*Maseddi Siri*) dari pihak keluarga dan tim sukses masing-masing kandidat untuk memenangkan calonnya sebagai usaha penguatan identitas etnis, tidak terkecuali pihak

² Ibid., hlm. 10.

keluarga dan tim sukses Syahrul Yasin Limpo akan berupaya untuk menaikkan martabat keluarga dan etnis Makassar pada umumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Perubahan konstelasi politik era reformasi ditingkat nasional dimulai dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung yang turut mempengaruhi konstelasi politik lokal dengan dikeluarkannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Terjadinya desentralisasi kekuasaan dari presiden kepada lembaga-lembaga tinggi negara, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kekuasaan yang relatif besar dalam pengambilan keputusan ditingkat nasional sering disebut demokratisasi. Sedangkan berpencarnya otoritas politik dan administrasi dari pusat ke tingkat lokal disebut desentralisasi dan otonomi daerah. Kekuasaan yang tidak lagi terpusat merupakan bagian dari demokratisasi.

Untuk pertama kalinya rakyat ditingkat daerah berkesempatan memilih secara langsung kepala daerah masing-masing. Begitu pun halnya di Sulawesi Selatan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya mengalami peningkatan suhu politik yang dilatarbelakangi antara lain oleh interes politik, tarik menarik kepentingan, dan penguatan identitas etnis. Kesadaran etnis yang berujung persaingan turut dipengaruhi oleh faktor politik atau kondisi pemerintahan yang tidak demokratis, terlalu sentralistik, kurangnya penerapan otonomi daerah di masa orde baru. Namun di masa reformasi ini budaya politik lokal yang mengakar pada etnisitas pun semakin kental.

Sebagaimana diketahui bahwa Sulawesi Selatan ditopang 4 etnis lokal, yaitu: Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, namun orang-orang Mandar pulang kampung sejak Sulawesi Barat berdiri tahun 2004, serta 4 kelompok sosial agama utama yaitu Islam,

Kristen, Hindu, dan Budha. Bila dikaitkan dalam konteks Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, ideologi agama terkalahkan dengan persaingan etnis. Bercermin pada pengalaman pilkada lalu yang banyak diwarnai sentimen lokal dan unsur-unsur primordial. Jika kita melihat peta politik Sulawesi Selatan agaknya orang Toraja kurang tertarik untuk ikut berkompetisi ditingkat provinsi. Sehingga persaingan politik hanya terjadi antara etnis Bugis dan Makassar, yang menyebabkan rekonstruksi nilai-nilai lokal cenderung menguat. Walaupun sebenarnya keduanya berasal dari satu keturunan yaitu berasal dari kerajaan Luwu sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Dimana orang Makassar akan mengaku sebagai orang Bugis begitupun orang Bugis akan mengaku sebagai orang Makassar kepada orang di luar Sulawesi, walaupun terdapat perbedaan yang tersamar.

Dari uraian dan kenyataan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah reformasi pasca orde baru mengakibatkan berakhirnya dominasi elite politik Bugis di Sulawesi Selatan?
2. Apakah berakhirnya dominasi etnis Bugis menandakan perubahan konstelasi elite di Sulawesi Selatan?
3. Bagaimanakah prospek hubungan etnis Bugis dan Makassar, kemungkinan pembauran antara kedua etnis tersebut ke depan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berakhirnya dominasi elite Bugis di Sulawesi Selatan apakah diakibatkan oleh reformasi pasca orde baru.
2. Untuk mengetahui benarkah berakhirnya dominasi etnis Bugis menandakan perubahan konstelasi elite di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui prospek hubungan etnis Bugis dan Makassar ke depan, kemungkinan terjadinya pembauran antara kedua etnis tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan kegunaan akademik. Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi politik lokal, khususnya pada kalangan elit politik lokal di Sulawesi Selatan.
2. Berdasarkan kegunaan praktis. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam memahami peta politik dan konstelasi politik lokal di Sulawesi Selatan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pilkada dan Demokratisasi

Perubahan tatanan politik di Indonesia yang secara legalitas hukum tertuang dalam ketetapan MPR RI No.XI/MPR/ 1998 tentang Pemilihan Umum, yang didalamnya terkandung dua aspek fundamental terhadap perubahan tatanan politik di Indonesia yaitu adanya kebebasan mendirikan partai politik dengan kembalinya menggunakan sistem multi partai setelah dan upaya memaksimalkan potensi demokrasi yang mungkin dilakukan dengan mengadakan dua putaran pemilu; pemilu pertama untuk memilih anggota DPR/MPR dan pemilu kedua memilih presiden dan wakil presiden secara langsung pula. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam UUD 1945 sebenarnya secara eksplisit Indonesia menganut sistem pemerintahan negara presidensil, yakni adanya legitimasi terpisah antara presiden sebagai eksekutif dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislatif dipilih secara terpisah oleh rakyat. Perubahan hukum ketatanegaraan lewat reformasi dan amandemen konstistusi (pasal 22E mengatur tentang pemilu legislatif yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2003, dan pemilu presiden dan wakil presiden di atur dalam pasal 6A yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang

No.23 Tahun 2003) mengembalikan kedaulatan rakyat dengan memberi peluang kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung³.

Dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung juga membatasi fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memilih presiden dan wakil presiden selanjutnya, serta turut mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial yang dianut. Dimana sebelumnya melalui mekanisme pemilihan oleh MPR yang tidak jarang melalui lobi politik yang memenangkan kontestan yang tidak sesuai harapan rakyat.⁴ Pembaharuan sistem politik Indonesia hasil reformasi politik dan reformasi hukum ketatanegaraan diantaranya adalah perubahan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sistem pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, serta pelaksanaan pilkada langsung.

Sejak runtuhnya orde baru tahun 1998, Indonesia telah dua kali melaksanakan pemilihan umum yaitu 1999 dan 2004 dengan sistem multi partai. Dengan sistem multi partai terjadi persaingan terbuka antara partai politik/ kontestan untuk melakukan metode pendekatan dalam memperoleh suara terbanyak untuk memenangkan pemilu.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 telah membuka ruang kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik. Telah tiga kali terjadi pergantian presiden sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat nasional dan daerah. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung Tahun 2004 merupakan pengalaman baru bagi Bangsa Indonesia, sebagai salah satu kajian demokrasi presidensial. UU No. 23 Tahun 2003

³ Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta: Rajawali Pres. hlm. 52.

⁴ J.Prihatmoko Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 18-19.

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merupakan sarana legal untuk mengatur jalannya pemilihan serta keabsahan pemilihan yang berlangsung.

Adanya jarak antara pemilu dengan sirkulasi elit di masa orde baru disebabkan ketertutupan politik dengan adanya pemusatan kekuasaan di tangan Suharto, yang setelah reformasi terjadi sirkulasi elit yang terbuka dan kompetitif dimulai Pemilihan Umum 1999 yang disusul pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung 2004.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, pemerintah daerah sangat bercorak sentralistik, dekonsentrasi administratif, dimana pemilihan dan penentuan pejabat kepala daerah yang harus memperoleh persetujuan presiden. Namun sejak runtuhnya otoriter orde baru, bermunculan tuntutan berbagai daerah agar mereka dapat menentukan sendiri kepala daerah masing-masing. Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai hasil reformasi politik. Pergeseran tersebut bertujuan menciptakan pemberdayaan politik masyarakat lokal yang dalam pelaksanaannya masih terbatas pada legislatif daerah.

Dalam sejarah Indonesia sampai pada masa orde baru, pilkada selalu dimonopoli oleh elite politik pusat dan daerah dengan tidak memberi kesempatan rakyat memilih secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Adanya perbedaan tata cara dan mekanisme pemilihan yang selama ini dikonstruksi untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden yang melibatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Namun sebaliknya pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan perwakilan oleh anggota dewan atau diangkat/ditunjuk oleh pejabat pusat.

Sebagai koreksi atas sistem pemilihan sebelumnya dan salah satu produk era reformasi adalah UU No.22 tahun 1999 mengenai desentralisasi, yang dalam praktik

pilkada menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan dengan munculnya isu maraknya politik uang (*money politics*) dan campur tangan (*intervensi*) pengurus partai politik di tingkat lokal maupun pusat. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (otonomi daerah) Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang membuka peluang kepada rakyat untuk mewujudkan aspirasi daerah dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pilkada langsung. Perubahan ini sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah.

Alasan mengapa harus diselenggarakan pilkada langsung karena: Pertama, meningkatnya partisipasi politik rakyat daerah; Kedua, legitimasi politik yang dapat memberikan dampak legitimasi yang lebih kuat terhadap kepemimpinan daerah terpilih; Ketiga, minimalisasi terjadinya manipulasi dan kecurangan; dan Keempat, akuntabilitas yang merupakan persoalan mendasar dalam memilih seorang pemimpin.

Dalam artian pilkada langsung harus dapat mendorong tumbuhnya kepemimpinan eksekutif daerah yang kuat. Selain itu, pelaksanaan pilkada langsung harus berkualitas, sederhana, efisien, dan mudah dilakukan. Pilkada langsung juga harus membuka ruang selebar-lebarnya terjadinya kompetisi yang adil antara para calon yang bersaing dengan melibatkan partisipasi rakyat secara lebih optimal, baik dalam tahapan-tahapan yang berlangsung sampai dengan pemilihan, serta proses-proses politik pasca pemilihan. Dengan demikian kepala daerah terpilih akan lebih akuntabel pada rakyat dan bukan pada golongan tertentu. Implikasinya adalah pengambilan kebijakan publik akan berorientasi pada rakyat, lebih menjamin otonomi politik (legitimasi) serta potensi korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) dan politik uang (*Money Politic*) bisa berkurang pada golongan tertentu.

Perubahan politik nasional dengan mengadakan pemilihan langsung terhadap anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Dalam kaitannya dengan perubahan sistem pilkada adalah merupakan mata rantai reformasi politik untuk mewujudkan politik yang demokratis di Indonesia.

Dalam suatu masyarakat demokratis, rakyat berperan tidak untuk memerintah atau menjalankan keputusan-keputusan politik. Namun terdapat pemilihan umum yang berperan untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional dan pemerintah.

Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter kearah struktur dan tatanan yang demokratis. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Dengan demikian prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu didesentralisasikan” menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi.

Secara sederhana, demokrasi adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, bagi suara yang akan mencerahkan mereka sampai pada pemilihan

berikutnya. Sementara menurut Joseph Schumpeter bahwa proses demokrasi terdapat dalam situasi kompetitif, terbuka bagi keinginan publik, dalam partai-partai politik⁵. Bagi Schumpeter, proses demokrasi merupakan sebuah mekanisme dimana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin politik yang bersaing dalam pemilihan.

Menurut Afan Gaffar, pemahaman demokrasi dalam suatu sistem politik apabila pemerintah memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik serta bagaimana kompetisi oleh para elite politik dalam mengisi jabatan politik secara teratur, dengan parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:

1. Pemilihan Umum

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*) dalam pemilihan berikutnya.

2. Rotasi kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokrasi tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya; jika seseorang yang berkuasa terus menerus atau satu partai politik

⁵ Varma, S.P. 2007. *Teori Politik Modern*. (terj.). Jakarta: Rajawali Pres. hlm. 211; Bottomore. 2006. *Elite dan Masyarakat*. (terj.). Jakarta: Akbar Tanjung Institute. hlm. 57-82.

mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu, sistem itu kurang layak disebut demokratis. Demokrasi memberi peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang kepala daerah satu ke kepala daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

3. Rekrutmen Terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik seperti kepala daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok kecil orang.

4. Akuntabilitas Publik

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Setiap warga negara berhak menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Masyarakat berhak menentukan preferensi politiknya serta berhak memasuki organisasi politik dan non politik.⁶

Pemahaman tentang demokrasi ada dua macam yakni; pemahaman secara normatif maksudnya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan oleh negara dan diterjemahkan dalam konstitusi misalnya UUD 1945, dan

⁶ Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 3-8.

pemahaman secara empirik yang disebut sebagai demokrasi prosedural (*procedural democracy*) yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses demokratisasi terjadi pergeseran dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang panjang dan kompleks melalui tahapan transisi. Ada banyak faktor yang turut mendorong demokrasi termasuk kondisi sosial dan ekonomi, ketergantungan negara-negara sedang berkembang pada sistem ekonomi dunia. Solusi demokrasi diambil oleh kekuatan-kekuatan yang minoritas agar dapat memilih kebijakan yang menyerang kekuatan dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok dominan. Kekuatan yang dominan mencoba menghindari pilihan demokrasi dan berusaha mempertahankan sistem otoriter sehingga kekuatan yang minoritas berjuang untuk negara demokrasi yang bisa membuka akses atas pengaruh politik mereka.

Transisi menuju demokrasi pada umumnya masih berada pada tahapan awal pergerakan menuju demokrasi. Menurut Georg Sorensen, tahapan-tahapan transisi adalah tahapan persiapan yang ditandai dengan perjuangan politik yang bergerak untuk menghancurkan rezim nondemokratis; tahapan keputusan, dimana elemen yang jelas tertib demokrasi telah terwujud; dan tahapan konsolidasi, dimana demokrasi baru lebih berkembang dan akhirnya praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik.⁷

Dalam konteks politik di Indonesia yang terjadi adalah kita masih berada dalam tahapan persiapan, dimana perjuangan politik kekuatan baru sebatas untuk menghancurkan rezim otoriter, dan masa transisi tersebut masih menggambarkan sebagai

⁷ Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berkembang*. (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 108-109.

demokrasi yang lemah atau masih berada pada level prosedural dan hanya berfungsi sebagai media terjadinya sirkulasi elite semata.

Untuk memperoleh kekuasaan dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan. Pergantian kekuasaan sebagai tuntutan demokrasi menjadi ajang perebutan dan kepentingan politik antara kekuatan politik yang berkompetisi. Pada kondisi tersebut, persoalan politik diperankan oleh elite-elite politik atau kelompok-kelompok elite karena adanya dorongan untuk meraih kekuasaan, sehingga hasilnya tergantung dari kemauan para elite politik pusat maupun elite politik lokal untuk siap menaati aturan main dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dan dapat meyakinkan dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat.

Sebelum kita lebih lanjut membicarakan tentang elite dan pergantian elite, terlebih dahulu kita merunut literatur dan kemunculan teori elite yang digunakan sampai sekarang. Dimulai oleh Aristoteles, yang kemudian diikuti oleh Saint Simon, Karl Mannheim, Raymond Aron. Namun pemikir-pemikir Italia seperti Pareto dan Mosca yang kemudian menyebabkan istilah elite menjadi terkenal sampai sekarang. Suzanne Keller mengelompokkan para ahli ini menjadi dua, yaitu Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto yang berprinsip bahwa golongan elite adalah tunggal (elite politik), sementara Saint Simon, Karl Mannheim dan Raymond Aron yang berpendapat bahwa sejumlah kaum elit yang berbagi kekuasaan, tanggung jawab dan hak. Awal munculnya teori elite politik dari diskusi Ilmuwan Sosial Amerika tahun 1950-an, Schumpeter (ekonom), Lasswell (politik) dan C.Wright Mills (sosiolog) yang berdasarkan tulisan Pareto, Mosca, Roberto Michels dan Jose Ortega Y.Gasset.⁸ Suzanne Keller sendiri melihat elite

⁸ Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan kelompok Elite*. (terj.) Jakarta: RajaGrafindo. hlm. 6-20; Bottomore. 2006. *Elite dan Masyarakat*. (terj.). Jakarta: Akbar Tanjung Institute. hlm. 25; Varma. 2007.

penentu (*strategic elites*) di luar pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap tokoh-tokoh politik pemerintahan, sehingga mereka memasuki partai politik yang kemudian mengantarkan mereka masuk ke dalam kelas penguasa (*the ruling class*).

Pengertian Elite Politik adalah sekelompok kecil orang berkualitas yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang diperlukan pada kekuasaan sosial politik untuk memerintah, yang menurut Pareto, masyarakat terbagi dalam dua kategori yaitu: lapisan elite yang jumlahnya kecil dan mempunyai kemampuan memerintah (*governing elite*), yang lapisan non elite yang jumlahnya besar yang ditakdirkan untuk diperintah (*non elite*).⁹

Mekanisme sirkulasi elite sangat menentukan dalam terwujudnya pergantian kekuasaan dalam suatu negara, yang jika salah satu kelompok menjadi superior terhadap kelompok yang lain, maka akan menyebabkan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Pareto membagi sirkulasi elite menjadi dua kategori, yakni: pergantian terjadi diantara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan pergantian terjadi diantara elite dengan penduduk lainnya, pergantian ini bisa berupa masukan dari; individu-individu yang dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elite yang sudah ada dan individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elite yang sudah ada. Sedangkan Mosca yang menggunakan istilah penguasa dan yang dikuasai mengatakan bahwa pergantian elite terjadi jika elite yang selama ini memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan

Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 199-120; Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. (terj.). Jakarta: RajaGrafindo. hlm. 471-479.

⁹ Varma. 2007. *Teori Politik Modern*. (terj.). Jakarta: Rajawali Press. hlm. 200.

orang-orang kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat kemungkinan elite tersebut digantikan oleh kelas elite yang baru tersebut.¹⁰

Perbedaan pendekatan Pareto dan Mosca terhadap perputaran elite adalah Pareto dengan teori “sirkulasi elite” lebih mencurahkan perhatiannya pada perputaran individual antara elit dan non elite, dimana strata yang tinggi menjadi kelas atau elite pemerintah. Perputaran tersebut merupakan hal yang konstan dan fenomena yang regular. Korelasi antara kelompok elite yang memerintah yang diperintah dapat ditemukan dalam derajat pengaruh politik dan sosial serta posisinya dalam hirarki masyarakat. Sedangkan Mosca dengan teori “kelas-kelas penguasa” berpendapat bahwa masyarakat modern tingkat perputaran elite sangat tinggi, kelompok sosial baru dapat terbentuk dalam masyarakat sebagai akibat perubahan ekonomi atau kultural yang kemudian bisa meningkatkan pengaruh sosial mereka ke dalam aktivitas-aktivitas dimana mereka berada dan pada saatnya bisa membuat perubahan dalam sistem politik dan struktur sosial secara keseluruhan. Mosca lebih memperhatikan kelas penguasa yang dianggapnya secara langsung berpartisipasi dalam pemerintahan atau mempengaruhi pemerintahan, sehingga dijabarkan kelas penguasa sebagai kelas politik yang mewakili kepentingan kelompok berpengaruh dan penting. Terjadi persaingan antar segmen dalam kelas politik dan mengalami perubahan komposisi dengan perekrutan anggota dan penggabungan dari kelompok dan strata bawah yang sering disebut “sirkulasi kelompok elite”. Menurut Mosca tentang pergantian elite, bahwa karakteristik yang membedakan elite adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik, sehingga jika kelas yang berkuasa kehilangan kecakapannya, maka kemungkinan untuk jatuh dan digantikan oleh

¹⁰ Ibid., hlm. 201-203.

kelas yang baru. Sementara Weber juga berpendapat bahwa perpecahan kelas terjadi akibat nasionalisme dan loyalitas etnik.¹¹

Lebih lanjut menurut Mosca bahwa penguasaan minoritas oleh mayoritas dilakukan dengan cara terorganisasi dengan menempatkan mayoritas sebagai pengikut karena minoritas terdiri dari orang-orang yang superior. Komposisi elite dilihat dari peran kekuatan sosial tertentu, sementara Pareto menyebutnya sebagai kelompok sosial yang beraneka ragam. Ditambahkan oleh Mosca akan pentingnya “formula politik” berupa ideologi kelas yang digunakan oleh elite untuk melestarikan dominasi elite tersebut dan sudah menjadi kebutuhan elite untuk tetap bertahan dan digunakan untuk memberikan kepuasan moral dan hukum kepada masyarakat walaupun sebenarnya kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingannya sendiri, karena masyarakat bukan hanya membutuhkan perasaan pemenuhan tuntutananya bukan berdasarkan paksaan.

Terdapat dua perspektif dalam kajian tentang elite, yakni perspektif pluralis yang menganggap terjadinya penyebaran kekuasaan di berbagai kelompok kepentingan dan tidak adanya kelompok yang dominan dalam ciri orde demokrasi. Merujuk pada perbedaan antara kelas yang berkuasa dan yang dikuasai serta adanya pengelompokan dalam kelas penguasa pada masyarakat demokrasi. Kajiannya menemukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat demokratis tidak ada kelompok yang mendominasi, namun kekuasaan berasal dari kelompok-kelompok yang kelas penguasa. Pemikiran para kaum pluralis dipengaruhi oleh pemikiran Weber yang menyangkal konsepsi Marx tentang kelas penguasa. Perspektif marxis dengan teori kelasnya yang

¹¹ Ibid., hlm. 204; Suzanne Keller. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite*. (terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 319-320; Bottemore. 2006. *Elite dan Masyarakat*. (terj.). Jakarta: Akbar Tanjung Institute. hlm. 57; Ronald H.Chilcote. 2004. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. (terj.). Jakarta: Rajagrafindo. hlm. 471.

membagi masyarakat berdasarkan alat-alat produksi, yakni kaum yang menguasai alat produksi (*the ruling class*) dengan yang tidak memiliki alat produksi.

Sirkulasi elite lokal di masa orde baru ditentukan oleh ABRI, Birokrasi, dan Golkar, maka di masa reformasi kekuatan politik berubah digantikan oleh kekuatan politik yang lain. Adanya pergeseran komposisi suara di DPRD turut memberi kesempatan munculnya aktor-aktor politik, serta kelompok strategis ekonomi-politik (pengusaha) juga turut mempengaruhi pergantian kekuasaan di tingkat lokal. Nurhasim membagi elite lokal dalam dua kategori yaitu:

a. Elite politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD, anggota DPRD, dan pimpinan partai politik.

b. Elite non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan memiliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elite organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan sebagainya.

Pembedaan tipe elite dimaksudkan untuk membedakan ruang lingkup dan memberi penjelasan tentang hubungan antara elit politik maupun elit masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di tingkat lokal.¹²

¹² Nurhasim. 2005. *Konflik Antarelite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 11.

Pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum yang terbuka turut dipengaruhi oleh strategi kampanye politik kontestan (*political marketing*) dalam memenangkan pemilihan umum dan perilaku politik masyarakat (*voting behavior*). Sejalan dengan pandangan Mannheim yang menekankan pentingnya seleksi berdasarkan prestasi dan pengurangan jarak antara elite dan massa untuk menciptakan kecocokan antara elite penguasa dan pemerintahan demokratis dengan asumsi bahwa demokrasi ditandai tidak dengan menghilangkan strata elite tapi dengan cara seleksi elite yang baru dan interpretasi sendiri (*self interpretation*) elite yang baru....Elit demokratis mempunyai background massa, karena itulah pengurangan jarak antara mereka mempunyai makna bagi massa.¹³ Dalam setiap pemilihan umum, setidaknya terdapat tiga struktur politik utama yang dominan yakni; pemerintah, partai politik dan rakyat. Dimana masing-masing struktur tersebut mengambil manfaat dari berinteraksi satu sama lain, pilihan tujuan, polarisasi struktur dan cara interaksi akan menentukan demokratis tidaknya sebuah pemilu.

2.2 Desentralisasi

Proses demokratisasi di Indonesia dalam upaya mencapai masyarakat demokratis secara maksimal, satu hal yang diupayakan adalah mengurangi dominasi elite politik pusat dalam proses pengambilan keputusan. Usaha untuk memperkecil sentralisasi kekuasaan dan mengurangi dominasi elite pusat tersebut dengan penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dengan kebijakan desentralisasi.

Sebelum lebih lanjut membahas tentang pengertian desentralisasi ada baiknya jika kita mengetahui asal mula timbulnya pemerintah lokal. Pemerintah daerah/lokal berasal

¹³ Bottomore. 2006. *Elite dan Masyarakat*. (terj.). Jakarta: Akbar Tanjung Institute. hlm. 140-141.

perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Dimana muncul satuan-satuan wilayah (*municipal*) di tingkat dasar yang membentuk suatu lembaga pemerintahan. Yang dalam perkembangannya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan dalam sistem administrasi negara dari suatu negara yang berdaulat dan untuk kepentingan administratif ditentukanlah kategori, batas wilayah, kewenangan dan bentuk kelembagaan. Sesuai kepentingan politik negara maka pemerintah daerah/lokal dibagi dua, yakni: satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar, yang di Indonesia dikenal; organisasi perantara disebut provinsi sedangkan satuan organisasi dasar disebut kabupaten/kota.

Sekarang kita membahas asal kata desentralisasi, desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti Lepas dan Centrum yang berarti Pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat, sehingga desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan namun tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat.¹⁴

Dalam konteks negara Indonesia, sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahan dan politik lokalnya.

¹⁴ Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. hlm. 7.

Dalam sejarah Indonesia terdapat korelasi antara rezim yang sedang berkuasa dengan produk kebijakan yang dihasilkan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rezim Politik dan Kebijakan Otonomi

Tahun Berlaku	Rezim	Produk Hukum	Hakekat Otonomi
1	2	3	4
1945-1949	Demokrasi	UU No.1/1945 UU No.22/1948	Otonomi luas, desentralisasi
1950-1959	Demokrasi	UU No.1/1957	Otonomi luas, desentralisasi
1959-1966	Otoriter	Penpres No.6/1959 UU No.18/1965	Sentralistik dekonsentrasi
1966-1971	Demokrasi	Tap MPRS No.21/1966	Otonomi luas, desentralisasi
1971-1998	Otoriter	UU No.5/1974	Sentralistik, dekonsentrasi
1998-Sekarang	Demokrasi	Tap MPR No.IV/1998 UU No.22 & 25 /1999 UU No.32 & 33 /2004	Otonomi luas, desentralisasi

Sumber: Materi Kuliah Analisis Politik Indonesia. Dosen Pengampu Dra. Fitriyah, M.A

Indonesia sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduk yang terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan dan memeluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerinah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

A.H. Manson membagi desentralisasi menjadi dua yaitu desentralisasi politik yang disebut juga devolusi dan desentralisasi administrasi/birokrasi yang disebut juga dekonsentrasi...agar kewenangan itu dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang yang lebih rendah, yang disebut desentralisasi. Jadi desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi dibawahnya (pemerintah daerah).¹⁵ Karena pemerintah daerah disertai wewenang baik secara politik maupun administrasi sehingga disebut memiliki otonomi, yang berarti masyarakat di daerah tersebut bebas mengatur dan mengurus kepentingan lokal bukan kepentingan nasional. Jadi otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan azas desentralisasi pada pemerintah daerah.

Sementara Henry Maddick menyebutkan desentralisasi mencakup pendelegasi kewenangan/melepaskan fungsi-fungsi khusus departemen pusat kepada staf pusat yang berada di luar kantor pusat (dekonsentrasi) dan pemberian kekuasaan secara sah untuk melepaskan fungsi-fungsi yang ditentukan pada kewenangan daerah (devolusi), dimana terjadinya penyerahan kewenangan atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.¹⁶

Sedangkan menurut Rondinelli, desentralisasi mencakup empat hal, yaitu:

1. Dekonsentrasi; penyerahan beban kerja dari kementerian pusat kepada pejabat-pejabatnya yang berada di daerah. Penyerahan ini tidak diikuti oleh kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya.
2. Devolusi; pelepasan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintah baru yang tidak dikontrol secara langsung, yang bertujuan untuk

¹⁵ Ibid., hlm. 8.

¹⁶ Henry Maddick. 2004. *Desentralisasi Dalam Praktek*. (terj.). Yogyakarta: Pustaka Kendi. hlm. 85.

memperkuat satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan cara mendelegasikan fungsi dan kewenangan. Devolusi dalam bentuk yang paling murni memiliki lima ciri fundamental; a) Unit pemerintah setempat bersifat otonom, mandiri dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan langsung terhadapnya, b) unit pemerintahan tersebut memiliki batas geografi yang jelas dan legal, yang mempunyai wewenang untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan, c) Pemerintahan daerah berstatus berbadan hukum dan memiliki kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, d) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah mempunyai pengaruh dan kewibawaan terhadap warganya, e) Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah nasional dan bukan sebagai elemen yang independen dari pemerintah pusat, yang dalam devolusi tidak ada hirarkhi antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya, karena yang menjadi dasar adalah koordinasi dan sistem saling hubungan antara satu unit dengan unit yang lain secara independen dan timbal balik.

3. Pelimpahan wewenang pada lembaga semi otonom (delegasi), yaitu pendelegasian pembuatan keputusan dan kewenangan administratif kepada organisasi-organisasi yang tidak ditempatkan dalam struktur regular pemerintah (BUMN).
4. Penyerahan fungsi pemerintah pusat kepada lembaga non pemerintah (privatisasi), pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan

swadaya masyarakat atau dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta, misalnya BUMN dan BUMD menjadi PT.¹⁷

Dari keempat pengertian desentralisasi di atas, tesis ini difokuskan pada pengertian desentralisasi politik atau devolusi. Desentralisasi politik diupayakan untuk mendorong demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik rakyat dikarenakan lemahnya akses dan dukungan elite politik di tingkat lokal serta kuatnya dominasi elite politik pusat di masa orde baru. Penyerahan wewenang pusat ke daerah adalah wewenang untuk pengambilan keputusan-keputusan politik disebut juga *democratic dezentralization*.

2.3 Politik Identitas Etnis

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik, pertama kali disimposiikan pada Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina tahun 1994 yang menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktek politik identitas dan menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Pemahaman politik identitas mengacu pada seorang filsuf poststrukturalis-postmodernis Perancis, Michel Foucault yang mengkritik konsekuensi-konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakannya pada “wacana-wacana yang tertindas” dari “wacana besar” yang mendominasi dan mengontrol, yang kemudian disebut politik identitas (*biopolitik*) seperti perbedaan-perbedaan tentang politik tubuh. Agnes Heller mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan

¹⁷ Nurcholis, Op. cit., hlm. 9-11.

etnis.¹⁸ Sedangkan munculnya politik etnis diawali tumbuhnya kesadaran orang yang mengidentikan diri mereka ke dalam salah satu kelompok etnis tertentu, yang kesadaran itu memunculkan solidaritas kelompok. Dari teoritisasi poststrukturalis kemudian postmodernitas yang mengkritik modernitas khususnya terhadap wacana etnis dalam konteks politik (*ethnic politic*). Politik identitas etnis merupakan proses dari kegagalan modernitas dalam memenuhi janjinya.

Sejalan dengan proses demokratisasi di Indonesia sering timbul gejala-gejala negatif seperti ekses-ekses yang mementingkan kelompok dan suku sendiri (sukuisme), adanya kecenderungan untuk menggunakan nilai-nilai kelompok. Etnisitas berkaitan dengan lahirnya demokrasi di dunia pada permulaan abad ke-21. Maraknya proses demokrasi yang sejalan dengan politik desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memperoleh kebebasan dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah sendiri. Etnisitas yang menjadi ikatan yang sangat emosional dan mendalam telah melahirkan perjuangan kelompok-kelompok etnis tertentu dari dominasi etnis mayoritas. Etnisitas berkaitan pula dengan kebudayaan masing-masing yang memiliki ciri khas dari kelompok etnis tersebut, dalam kelompok tersebut terjadi keterikatan antara orang-orang dalam kelompok tersebut atau dikenal sebagai primordialisme. Sehingga tidak jarang keterikatan etnis ini dimanipulasi dan dijadikan alat atau kendaraan oleh kelompok elite dalam memperebutkan sumber kekuasaan, terutama di daerah yang penduduknya heterogen.

¹⁸ Agnes Heller seperti yang dikutip Ubed Abdillah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: IndonesiaTera. hlm. 22.

Pengertian etnisitas berasal dari *Etnos* bahasa Yunani kuno, yang pada dasar pengertiannya adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama.

Handelman membedakan empat tingkat perkembangan yang dipertunjukkan di dalam komunitas budaya manusia, yakni: Pertama; Kategori Etnis, keterhubungan seseorang dengan masyarakat merupakan suatu ikatan yang agak longgar dan sekadar suatu gambaran adanya perbedaan budaya antara kelompoknya dengan dunia luar. Contoh kelompok etnis yang ikatannya telah longgar namun tetap masih menjaga ikatan etnisnya adalah daerah Tapanuli, Aceh dan Sulawesi Selatan, Kedua; Jaringan Etnis sudah terdapat interaksi yang teratur antara anggota-anggota etnis tersebut sehingga dengan jaringan tersebut terjadi distribusi sumber-sumber antara anggotanya. Pada tingkat asosiasi etnis, para anggotanya telah mengembangkan minat yang sama dan membentuk organisasi-organisasi politik dalam pernyataan-pernyataan kolektif, contohnya Persaudaraan Saudagar Bugis-Makassar yang sudah mempunyai agenda kegiatan rutin, Ketiga; pada tingkat Masyarakat Etnis (*ethnic community*) kelompok masyarakat tersebut telah memiliki teritori yang tetap serta terikat di atas organisasi politiknya seperti misalnya yang terlihat di dalam suatu negara nasional (*nation state*). Schermerhorn melengkapinya dengan mengatakan bahwa suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen-elemen simbolik yang menyatakan akan keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau

kombinasi dari sifat-sifat tersebut yang pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok.¹⁹

Pada dasarnya suatu kelompok etnis mempunyai enam sifat, sebagai berikut: 1) Memiliki nama yang khas yang mengidentifikasikan hakikat dari suatu masyarakat, misalnya Mallarangeng dan Mappanyukki yang identik dengan etnis Bugis, Sijaya dan Rewa yang identik dengan etnis Makassar. 2) Memiliki suatu mitos akan kesatuan nenek moyang, kesamaan akan asal usul dalam waktu tertentu sehingga kelompok tersebut membentuk suatu kekeluargaan yang fiktif, misalnya etnis Bugis dan etnis Makassar yang mempercayai mitos *La galigo* (awal mula dunia di huni) dan *To Manurung* (Pemimpin yang turun dari langit). 3) Kelompok tersebut mempunyai ingatan historis yang sama atau mempunyai memori masa lalu yang sama seperti pahlawan, kejadian-kejadian tertentu, misalnya Arung Pallakka dari Bugis dan Sultan Hasanuddin dari Makassar yang terlibat dalam Perjanjian Bungaya yang kemudian menjadi konflik yang berkelanjutan namun terselubung sampai sekarang antara orang-orang Bugis dengan Makassar. 4) Kelompok tersebut memiliki kesatuan elemen-elemen budaya seperti agama, adat istiadat dan bahasa, pada dasarnya Bugis-Makassar memiliki kesamaan adat istiadat dan agama yang dianut namun memiliki perbedaan bahasa walaupun menggunakan aksara yang sama. 5) Kelompok tersebut terikat dengan tumpah darah baik secara fisik maupun hanya sebagai keterikatan simbolik terhadap tanah leluhurnya seperti pada kelompok-kelompok diaspora Bugis-Makassar yang tersebar di penjuru Nusantara. 6) Memiliki suatu rasa solidaritas dari penduduknya.

¹⁹ Handelman & Schemerhom seperti yg dikutip Tilaar. 2007. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 5.

Terdapat berbagai perbedaan sudut pandang dalam teori etnisitas sehingga melahirkan berbagai pengertian pula. Namun dalam kajian ini terdapat dua pendekatan dalam memahami etnisitas. Dua pendekatan dalam teori etnisitas yaitu:

1. Pendekatan Primordialisme

Diperkenalkan pertama kali oleh Edward Shills (1957) yang menemukan berbagai ikatan sosial yang dibedakan atas ikatan personal, primordial, dan sakral. Ikatan-ikatan tersebut masih bertahan dalam dunia yang sudah modern. Pendekatan ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objek sebagai hal yang tidak bisa dibantah. Walaupun pandangan primordialisme ini banyak mendapat kritik karena tidak melihat kepada kemampuan seseorang individu untuk melaksanakan berbagai identitas dalam berbagai situasi.

2. Pendekatan Instrumentalisme

Di dalam pendekatan ini etnisitas dianggap sebagai suatu sumber dan kekuatan sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah melihat kompetisi dari kelompok-kelompok elite dalam menguasai sumber-sumber dukungan massa sehingga memanipulasi berbagai simbol untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik ketika kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas. Pendekatan ini pun menuai kritik karena dianggap terlalu materialistik, tidak memperhitungkan keterkaitan primordial dari seseorang terhadap etnisnya.²⁰

²⁰ Ibid., hlm. 7

Klaus Von Beyme yang menganalisis karakter gerakan politik identitas dalam tiga tahap perkembangan; Pertama; tahap pramodern yang terjadi perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh, dimana terjadi mobilisasi ideologis oleh para elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang baru. Kedua; Pada tahap modern, gerakan muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi, terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada pembagian kekuasaan. Ketiga; perkembangan postmodern, munculnya gerakan berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya.²¹ Dalam situasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan.

Dalam konstelasi politik di Indonesia terkadang muncul kekerasan dalam interaksi antaretnis, apalagi menyangkut aspek kepemimpinan, perebutan sumber-sumber kekuasaan, dan sumber-sumber alam serta keegoan masing-masing identitas etnis. Sebagai contoh adalah ketika terjadinya perubahan oleh reformasi politik yang kemudian memunculkan ketegangan etnis baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam perebutan lahan kekuasaan dan ekonomi dengan munculnya pemekaran wilayah, seperti yang dipaparkan dalam tulisan Lorraine V. Aragon mengenai persaingan elite yang

²¹ Klaus Von Beyme seperti yang dikutip Ubed Abdillah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: IndonesiaTera. hlm. 17.

berubah menjadi politik identitas keagamaan dan berkembang menjadi politik identitas etnis di Sulawesi Tengah, pemekaran Kepulauan Mentawai sebagai hasil aktivitas elite lokal dengan segala macam eksklusionisme berdasarkan sentimen etnis (Myrna Eindhoven), dan perebutan provinsi di daerah Luwu-Tana Toraja di Sulawesi Selatan sebagai akibat elite-elite lokal yang termarginal di tingkat provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengangkat isu pemekaran provinsi sebagai simbol identitas etnis Luwu dan agama (Dik Roth).²² Munculnya politik identitas atau *biopolitik* sebagai akibat runtuhnya masyarakat yang terkontrol dan direncanakan secara ilmiah yang memaksakan identitas nasional dan membangkitkan kekuatan pada kekuasaan tertentu, sehingga kemudian memunculkan perjuangan kelompok minoritas yang merasa identitasnya terpinggirkan.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada umumnya transisi menuju demokrasi didasarkan pada negosiasi dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung rezim otoriter dengan alasan-alasan; permulaan demokrasi (*democratic openings*) yang biasanya terjadinya perpecahan koalisi kekuatan-kekuatan rezim otoriter, dimana kekuatan-kekuatan tersebut menginginkan bentuk pemerintahan yang lebih demokratis sehingga memungkinkan mereka memperoleh kekuasaan, demokrasi dianggap pula dapat mengembalikan legitimasi tertib sosial dan dapat menyediakan sistem pengambilan keputusan yang teratur dan terbuka sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk menjalankan roda perekonomian. Sebagaimana model korporatisme-negara dari Philippe C. Schmitter bahwa: "korporatisme adalah suatu sistem perwakilan kepentingan dimana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan

²² Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 49-188.

(keanggotaan), tidak saling bersaing, diatur secara hirarkis yang diakui atau diberi izin (kalau tidak diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan mematuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pimpinan mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan.”²³

Korporatisme sebagai tanggapan terhadap kepentingan kapitalis dalam menciptakan tatanan politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi ada dua macam, tergantung tahap perkembangan ekonomi di tiap negara. Pertama; Korporatisme Masyarakat: terjadi di negara-negara yang maju kebutuhan utamanya adalah kestabilan rezim yang didominasi borjuis karena kaum usahawan yang dominan itu harus menghadapi persaingan dalam ekonomi internasional, maka kebutuhan itu dipenuhi dengan cara menggandeng dan melibatkan anggota-anggota kelas bawah kedalam proses politik dan memberi mereka keuntungan material. Sehingga kapitalis dapat bersaing dengan baik di dalam ekonomi internasional yang kemudian menyebabkan merosotnya politik pluralis secara bertahap dan munculnya korporatisme masyarakat. Kedua; Korporatisme Negara: biasanya terjadi pada negara-negara berkembang, dimana lemahnya kaum borjuis dan ketergantungan pada faktor-faktor eksternal dan kurangnya sumber daya negara sehingga membatasi negara untuk memenuhi tuntutan kelas bawah, sehingga negara memandang perlu untuk menciptakan “ketentraman sosial” bukan dengan memasukkan mereka dalam sistem politik tapi menindas dan menutup kemungkinan artikulasi tuntutan kelas bawah secara bebas sehingga memunculkan korporatisme negara.²⁴ Sistem politik Indonesia termasuk dalam jenis korporatisme

²³ Masoed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik*. Jakarta: LP3ES. hlm. 12.

²⁴ Ibid., hlm. 14.

negara ini. Namun kemudian terjadi perubahan dengan mengadakan pemilihan kepala daerah langsung, sehingga korporatisme negara berakhir dan sebagai wujudnya di daerah adalah desentralisasi.

Berdasarkan pemahaman tersebut sehingga penulis menggunakannya sebagai pijakan dalam melihat pecahnya korporatisme kekuatan lama yang mana di masa orde baru berusaha untuk melakukan penekanan dan penutupan akses politik, namun kemudian munculnya kekuatan-kekuatan baru yang memecahkan dominasi kekuatan-kekuatan yang lama sehingga kekuatan-kekuatan lama tidak mampu lagi melakukan penetrasi.

Sebenarnya persaingan antara etnis Bugis dan Makassar dalam memperebutkan pengaruh di Sulawesi Selatan sudah berlangsung lama. Pada masa penjajahan terjadi persaingan antara Sultan Hasanuddin dari Makassar dengan Arung Palakka dari Bugis. Pada masa orde lama pengangkatan pejabat politik dilakukan harus mengkomodir aspirasi kedua etnis Bugis dan Makassar, sebagai contoh pengangkatan Andi Pangerang Pettarani yang dianggap mewakili kedua etnis tersebut. Namun pada orde baru persaingan antar etnis Bugis dan Makassar tidak muncul ke permukaan karena berhasil ditekan oleh pemerintah pusat dengan pengangkatan pejabat politik dari pemerintah pusat dan berdasarkan usulan dari kelompok-kelompok yang mengajukan aspirasi pada saluran tertentu seperti misalnya kelompok kepentingan berbasis ekonomi (Kadin, Gapensi, dll), berbasis militer (Pepabri, LVRI, dll), termasuk kelompok yang berbasis keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan selain partai politik yang mengusung kandidat calon kepada panitia pemilihan dalam wadah lembaga penerima aspirasi yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian

menyaring bakal calon yang diajukan kemudian diserahkan ke setiap fraksi untuk diseleksi. Setelah reformasi, korporatisme negara tidak lagi dapat bertahan yang kemudian berubah menjadi pluralis karena sumber kekuasaan tidak lagi berasal dari pengangkatan pemerintah pusat dan berdasarkan akomodasi dari kelompok kepentingan tertentu karena terbukanya ruang politik bagi masyarakat dalam menyampaikan calon pemimpin sesuai dengan kepentingannya sehingga kemudian sumber kekuasaan menjadi banyak saluran termasuk dari masyarakat dengan pemilihan langsung sebagai wujud desentralisasi politik, dimana kemudian terjadi sirkulasi elite dari elite etnis Bugis kemudian digantikan oleh elite dari etnis Makassar dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2007 yang lalu.

Demokratisasi yang berjalan dengan desentralisasi dengan asumsi bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat tidak hanya dilayani dengan baik namun juga diberikan ruang akses yang cukup dalam proses pengambilan keputusan salah satunya dalam pemilihan kepala daerah, sehingga kepala daerah yang dipilih oleh representasi rakyat secara murni tanpa intervensi dan patronase pemerintah pusat. Karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Dalam proses peralihan dari korporatisme negara ke pluralis tersebut mengakibatkan perubahan struktur elite politik di Sulawesi Selatan terjadi peralihan dari elite etnis Bugis yang selama ini mendominasi di Sulawesi Selatan ke elite etnis Makassar.

Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan korporatisme negaranya Philippe C. Schmitter sebagai alat

analisis dalam kajian masalah dalam studi ini. Sementara dalam mengkaji terjadinya pergantian dari elite Bugis digantikan oleh elite dari etnis Makassar dalam konteks politik di Sulawesi Selatan (sirkulasi elite) yang dimaksudkan dalam studi ini menggunakan teori yang dikemukakan Pareto tentang pergantian elite yakni diantara kelompok-kelompok elite yang memerintah dan pergantian diantara elite dengan penduduk lainnya yang bisa saja berasal dari individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok yang sudah ada atau individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elite yang sudah ada. Ditambahkan pendapat Mosca bahwa diperlukan kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik dan pergantian elite terjadi jika elite yang berkuasa tidak mampu memberikan layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikan dianggap tidak bernilai lagi, atau muncul agama baru, atau terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, maka perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.²⁵

Untuk melengkapi teori tentang elite, penulis merasa perlu memaparkan tentang elite politik lokal di Sulawesi Selatan. Dimulai dari perbedaan etnis Bugis dengan etnis Makassar melalui pengelompokan rumpun budaya yang berkecenderungan geografis dimana rumpun budaya orang Makassar mendiami kawasan barat daya hingga selatan, orang Bugis mendiami kawasan timur, tenggara hingga barat laut. Walaupun pada pembahasan lain mengungkap adanya pertalian darah (genealogis) yang amat kental antar kelompok masyarakat ini yang berasal dari satu asal yaitu tanah Luwu. Masyarakat Bugis Makassar pada awalnya diliputi mitos *Sure Galigo* yang menceritakan awal mula dihuninya negeri Bugis, dimana Pemimpin (*Batara Guru*) dari *Bottinglangi* (dunia atas)

²⁵ Varma. 2007. *Teori Politik Modern*. (terj.). Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 201- 203.

bertemu di tanah Luwu dengan *we'nyelli'timo* dari *Buri'liung* (dunia bawah). Simpung siang di Luwu, Sengingridi di Bone, Petta Sekkanyili di Soppeng, Putri Temmalate di Gowa yang kesemuanya adalah *To Manurung* (pemimpin yang turun dari langit) yang membentuk masyarakat Bugis Makassar. Perbedaan kondisi sosial dan corak politik yang kental pada tiap masyarakat ini yang membedakan kemunculan *To Manurung* (pemimpin yang turun dari langit) di wilayah Bugis Makassar. Untuk wilayah Makassar disebabkan ketidakstabilan politik dan kehilangan otoritas yang bisa mengendalikan suasana sosial, bahkan terjadi pergeseran sistem kekuasaan yang mana kedaulatan yang dipegang oleh sembilan negeri kecil beralih ke *To Manurung* (pemimpin yang turun dari langit) sebagai pemegang otoritas kekuasaan di Gowa, sementara untuk wilayah Bugis (Bone, Luwu, Soppeng dan Wajo) disebabkan suasana krisis ekonomi, kepemimpinan atau politik dan krisis moral bahkan religi. Mitos *To Manurung* (pemimpin yang turun dari langit) inilah yang menjadi sumber nilai dalam pembentukan kebudayaan Bugis Makassar.

Dalam konteks politik lokal di Sulawesi Selatan, elite politik lokal dapat dilihat dalam tiga kategori. Pertama, elite berdasarkan pelapisan sosial yang terdiri atas tiga kelompok sosial, yaitu raja dan kerabat/kelompok bangsawan, kelompok orang yang merdeka/memiliki kebebasan, dan kelompok hamba. Kedua, elite berdasarkan kharisma (elite strategis) dalam sistem pemerintahan kerajaan, yaitu pemimpin adat, dan agama. Ketiga, elite berdasarkan kegiatan fungsional, yaitu cendekiawan, usahawan, dan pahlawan. Elite fungsional ini menempati elite strategis dalam piramida sosial, yang dengan terbukanya peluang untuk menjadi elite bagi setiap lapisan masyarakat di

Sulawesi Selatan menyebabkan pengelompokan berdasarkan kelompok militer, suku, bangsawan, ulama, dan kelompok lainnya.²⁶

Pandangan Foucault yang mencakup dua komponen kunci yakni politik wacana dan biopolitik. Dalam politik wacana, kelompok-kelompok marginal (yang tertindas) yang berusaha untuk menghadapi wacana-wacana hegemonik yang memposisikan individu-individu ke dalam “*straitjacket*” (pengekang) identitas-identitas normal untuk melepaskan kebebasan bermainnya perbedaan-perbedaan. Dalam masyarakat apapun wacana adalah suatu bentuk kekuasaan karena hukum-hukum yang mendeterminasi wacana memaksakan norma-norma yang dianggap rasional, sehat atau benar. Dengan demikian berbicara di luar hukum-hukum tersebut berisiko terpinggirkan dan terabaikan. Dalam pandangan Foucault semua wacana dihasilkan oleh kekuasaan, tetapi mereka tidak tunduk total terhadapnya dan dapat menggunakannya sebagai titik tolak untuk menolak bahkan pijakan awal bagi suatu strategi perlawanan. Sebaliknya dalam biopolitik (*biostruggle*) entitas-entitas individual berusaha untuk memberontak dari cengkaman kekuasaan disiplin dan menanam kembali tubuh (sebagai sebuah lembaga) dengan menciptakan model-model kesenangan dan kepuasan baru. Namun keduanya bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan bentuk-bentuk baru dari subjektivitas dan nilai-nilai.²⁷

Penulis menggunakan politik identitas etnis dalam memahami peralihan dari korporatisme negara menjadi pluralis dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sulawesi Selatan, dengan menggunakan dua pendekatan terhadap etnisitas yakni pendekatan primordial yang membedakan ikatan sosial atas ikatan primordial, personal

²⁶ Jayadi Nas. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan 2003*. Jakarta: Yayasan Massaile & LEPHAS. hlm. 39-149.

²⁷ Ubed, Abdillah. 2002. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*. Magelang: IndonesiaTera. hlm. 48-50.

berdasarkan kesatuan kewilayahan, agama, kebudayaan. Dimana dalam persaingan mendapatkan simpati dan suara terbanyak, elite politik menggunakan mesin-mesin politiknya untuk mempertajam kesatuan-kesatuan politik diantaranya dengan mengangkat identitas etnis yang sebenarnya berada dalam alam bawah sadar masyarakat sebagai bagian dari etnis tersebut. Etnisitas menjadi aspek yang penting dalam gagasan tentang pembedaan bermunculan sebagai politik identitas dari kelompok-kelompok etnis Makassar yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi etnis Bugis, dan menggunakan pendekatan instrumentalism yang melihat etnisitas sebagai sumber kekuatan sosial, budaya dan politik dari kelompok-kelompok atau elite-elite dalam hal ini antara pasangan Syahrul-Agus (etnis Makassar dan etnis Bugis) dengan pasangan Amin-Mansyur (keduanya etnis Bugis) serta pasangan Aziz Qahhar-Mubyl (keduanya juga berasal dari etnis Bugis) yang sedang berkompetisi memperoleh sumber kekuasaan dengan memanipulasi simbol etnis untuk mendapat dukungan massa dalam pilkada yang lalu.

2.5 Definisi Konseptual

- Etnisitas

Etnisitas adalah penyatuan dan keterikatan antara orang-orang terhadap kelompoknya berdasarkan kesamaan agama, suku, bahasa, adat istiadat.

- Primordialisme

Primordialisme adalah ikatan emosional dan mendalam yang terbentuk oleh konstruksi dari kondisi sejarah untuk menjaga keutuhan solidaritas kelompok.

- Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Langsung adalah sarana untuk mewujudkan aspirasi daerah dengan memilih pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung. Dilakukan untuk memilih Gubernur maupun Walikota dan Bupati.

- Jejaring Politik

Jejaring Politik adalah penyatuan kekuasaan dan pengaruh dalam suatu kelompok yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan hubungan timbal balik para anggotanya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang dan sebagai pusat pengembangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, sehingga menjadi konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam mengelola kemajemukan masyarakat dari berbagai latar agama, pendidikan, sosial ekonomi dan budaya tersebut. Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang masyarakatnya multietnis memiliki warna tersendiri dalam konstelasi politik nasional dan lokal. Kondisi politik lokal di Sulawesi Selatan dapat dijadikan barometer kondisi politik Indonesia Bagian Timur.

3.2 Tipe dan Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.²⁸ Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.²⁹

²⁸ Tanjung. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Tesis)*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 63.

²⁹ Straus, Anselm & Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 5.

Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.³⁰

3.3 Teknik Pengumpulan Data/Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowballing*. Cara memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan *gatekeeper* yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis selama penelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai, kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.

³⁰ Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 68.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif-kualitatif yang dilakukan untuk memahami tanggapan informan dalam menarik suatu pernyataan yang mendukung dari pemahaman atas keadaan sebenarnya, kemudian dilakukan pembahasan dan penyimpulan atas data hasil penelitian yang dinyatakan dengan tulisan, kata-kata atau kalimat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Profil Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Kota Makassar merupakan sebuah propinsi yang berada di bagian selatan pulau Sulawesi, secara keseluruhan propinsi ini mempunyai luas wilayah 45.519,24 km (setelah pemekaran propinsi Sulawesi Barat) dengan 20 Kabupaten dan 3 Kotamadya. Kabupaten Luwu Utara adalah Kabupaten terluas dengan luas wilayah 7.502,68 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,48 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat di bagian utara, Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tengah di bagian timur, Selat Makasar di bagian barat dan timur masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores di bagian selatan. Posisi propinsi ini membentang dari 0,12-8 LS dan 116,48-122,36 LU, tepat berada di tengah alur perdagangan laut Indonesia.

Sulawesi Selatan beriklim tropis dengan variasi suhu antara 22,8-34,7 derajat celsius disepanjang tahun 2007, setiap elevasi 200 meter dari permukaan laut suhu turun sekitar satu derajat celcius. Pada bulan November hingga Maret, angin barat membawa hujan lebat di pantai barat, dengan curah hujan tertinggi pada Desember hingga Januari. Angin barat kadang-kadang juga membawa hujan ke wilayah tengah sampai ke lereng pegunungan sebelah Timur. Pada bulan April hingga Oktober, angin timur bertiup membawa curah hujan yang tidak terlalu tinggi ke pantai dan dataran rendah sebelah timur sementara curah hujan tertinggi pada Mei dan Juni.

Kawasan ini kini didiami oleh berbagai suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun pendatang dari Asia Tengah dan Selatan. Suku Bugis,

Makassar, Toraja, dan Mandar diklaim sebagai suku asli Sulawesi Selatan sementara suku lain seperti Minahasa, Jawa, Padang, Timor, Flores, Ambon, Ternate, dan lain-lainnya adalah suku asli Indonesia yang berdatangan untuk melanjutkan hidup di kawasan ini. Keturunan Tionghoa, Pakistan, India, Arab juga mewarnai masyarakat kawasan ini, untuk selanjutnya pada bagian masyarakat dan sosial budaya Sulawesi Selatan hal ini akan diulas detail.

Tabel 4.1
Komposisi etnis di Sulawesi Selatan Tahun 2000

Etnis	Jumlah	Persen (%)
1	2	3
Bugis	3.266.440	41.90
Makassar	1.982.187	25.43
Toraja	702.951	9.02
Lainnya	596.369	7.65
Mandar	475.505	6.10
Luwu	318.134	4.08
Jawa	212.273	2.72
Duri	121.688	1.56
Selayar	93.183	1.20
Sunda	8.145	0.10
Madura	5.788	0.07
Minangkabau	4.294	0.06
Betawi	4.065	0.05
Banjar	3.657	0.05
Banten	244	0.00

Sumber : Leo Suryadinata dkk. 2003. *Penduduk Indonesia: Etnisitas dan Agama Dalam Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES. hlm. 11.

Sulawesi Selatan sebagai provinsi asal etnis Bugis dengan 65,19 persen dari semua etnis Bugis tinggal di provinsi ini, lainnya tinggal menyebar di provinsi lain. Konsentrasi etnis Bugis menurut propinsi, paling tinggi terdapat di Sulawesi Selatan yakni 41,90 persen. Sebagai perbandingan perkembangan komposisi etnis di provinsi ini, penulis menyertakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia dibawah ini:

Tabel 4.2
Perbandingan Sampel Survei dan Komposisi Etnis Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Etnis	Sampel (N = 440)		Populasi /BPS (%)
	Survei Juli 2007 (%)	Survei Okt 2007 (%)	
1	2	3	4
Bugis	44.2	49.9	41.90
Makassar	28.6	24.2	25.43
Toraja	10.3	10.5	9.02
Mandar	0.7	0.1	6.10
Luwu	4.8	3.2	4.08
Jawa	3.9	1.6	2.72
Lainnya	7.5	10.5	10.75

Sumber: Eriyanto. 2008. Faktor Etnis dalam Pilkada, *Lingkaran Survei Indonesia*. Edisi 09. hlm. 13.

Kini kawasan ini berkembang amat pesat dari daerah pertanian dan pelabuhan singgah menjadi daerah perdagangan yang kompleks. Dari dulu kawasan ini merupakan kawasan pertanian dengan hasil andalan seperti padi (pemasok stok beras nasional) dan biji-bijian (seperti jagung), kelapa yang dipergunakan sebagai bahan multiguna untuk kebutuhan keseharian (diperas untuk santan, dibuat minyak kelapa, cuka atau gula), coklat (daerah pengeksport coklat terbesar di Indonesia), serta hasil lainnya. Ini belum termasuk hasil laut dalam berbagai macam yang diambil dari perairan laut dan sungai sebagai sumber protein. Kini wilayah ini berkembang menjadi kawasan multi usaha karena pola pertanian/perkebunan dan perikanan yang menjadi based pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan tetap bertahan malah ditambah lagi dengan adanya kawasan industri (kawasan industri) yang menghasilkan berbagai hasil produk mulai dari minyak gosok hinggaomotif, daerah pertambangan mulai dari penghasil semen hingga biji besi. Sehingga

dapat dikatakan kawasan ini merupakan pemasok semua kebutuhan di wilayah timur Indonesia yang tentunya juga kantong devisa nasional karena hasil eksportnya.

4.2 Sejarah Pemerintahan dan Wilayah Administrasi

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Selatan terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan. Menurut catatan sejarah, ada tiga kerajaan besar yang pernah berpengaruh luas yakni kerajaan Luwu, Gowa dan Bone. Sulawesi Selatan pada awalnya terbentuk menjadi salah satu bagian dari Propinsi Sulawesi dengan ibukota Makassar dan kemudian atas kemauan dan ikrar raja-raja serta masyarakat setempat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1950. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 daerah Swatantra Tingkat II dan 2 (dua) Kotapraja yakni Makassar dan Pare-Pare.

Status Propinsi Administratif Sulawesi berakhir pada tahun 1960 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1960, dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah dengan ibukota Manado. Akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964, Sulawesi Selatan resmi menjadi daerah otonom bersama Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2004, wilayah Sulawesi Selatan menjadi lebih kecil dengan ditetapkannya 5 wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Polmas dan Mamasa sebagai wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Saat ini Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 20 kabupaten dan 3 kota, Kota Makassar, Pare-Pare, dan Bone.

Secara administratif, luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan setelah terpisah dari wilayah Propinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004 berkurang dari 6.336.171 km² menjadi 45.574,53 km² dan terdiri dari 20 Kabupaten dan 3 kota. Wilayah yang terluas adalah Kabupaten Luwu Utara, yaitu 14.788.96 km² dengan populasi 1.164.380 jiwa atau memiliki kepadatan lebih kurang 6.627 jiwa perkilo meter persegi. Sebagai pusat pelayanan Kawasan Indonesia Timur Indonesia dengan fungsi perdagangan, jasa dan pendidikan menjadikan pertumbuhan Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir sangat tinggi. Mempertimbangkan pengaruh perkembangan Kota Makassar yang sangat besar terhadap wilayah sekitarnya, maka telah dikembangkan konsep pembangunan perkotaan terpadu dalam kawasan metropolitan MAMMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar).

Sebagai kota kedua terbesar, Kota Pare-Pare memiliki luas 99.33 km² dengan jumlah penduduk 114.933 jiwa atau memiliki kepadatan penduduk rata-rata 1157 jiwa perkilometer persegi. Fungsi utama kota ini adalah sebagai daerah perniagaan yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Samudera Pare-Pare. Kota Pare-Pare juga berfungsi sebagai pusat pelayanan sekaligus "outlet" kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-Pare yang meliputi wilayah Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap, Enrekang dan Kota Pare-Pare.

4.3 Elite Politik di Sulawesi Selatan

4.3.1 Asal Usul Elite di Sulawesi Selatan

Sebenarnya asal usul elite politik di Sulawesi Selatan dimulai pada mitos *To manurung* (pemimpin yang turun dari langit) yang tradisi lisan Bugis menyebutkan setelah era Sawerigading-La Galigo terdapat jeda waktu lama kosongnya penguasa bumi

(daerah Bugis-Makassar), kemudian tiba-tiba datanglah seseorang dari langit maka disebut *To Manurung* (Bugis) atau *Tau Manurung* (Makassar). Kisah *To Manurung* (pemimpin yang turun dari langit) ini terdapat banyak versi karena setiap tempat di Sulawesi Selatan mempunyai versi masing-masing, dalam penulisan ini diambil dua versi yakni versi Gowa *Manurunga Ri Tamalate* (yang turun di Tamalate) serta versi Bone *Tomanurung Di Matajang* (yang turun di Matajang).

Versi Gowa menceritakan bahwa suatu saat di Gowa ada sembilan kerajaan kecil yang lebih mirip kampung adat, mereka kemudian membentuk suatu penggabungan dengan penunjuk seorang pejabat yang disebut *Paccalaya* sebagai ketua. Seiring waktu kebutuhan untuk mempunyai raja amat dibutuhkan sementara diantara mereka tidak ada yang mau menerima kedudukan sebagai raja, maka diputuskan untuk memohon pada dewata agar diutuslah seorang untuk menjadi raja. Suatu hari seorang Putri tersebut turun lengkap dengan istananya sehingga diyakinilah bahwa permohonan mereka dikabulkan oleh para dewa, telah diturunkan seorang raja dari langit. Sang putri kayangan kemudian dinobatkan sebagai Raja Gowa Tumarungga Ri Tamalate/Gowa, Putri tersebut kemudian kawin dengan Karaeng Bayo seorang dari Tana Toraja. Perkawinan ini menghasilkan keturunan yang secara terus menerus memerintah Gowa hingga sekarang.

Versi Bone juga menuturkan setelah era Sawerigading dan La Galigo berakhir tanah Bone dalam keadaan kacau balau karena tidak ada yang memimpin. Pada suatu hari yang cerah tiba-tiba cuaca berubah rakyat Bone melihat seseorang berbaju putih dan mengira orang tersebut adalah dewa yang turun dari langit maka mereka memintanya menjadi raja di Bone. Oleh orang tersebut dikatakan bahwa ia bukan dewa yang turun dari langit namun ia bersedia mengantar rakyat Bone menemui *Tomanurung* (pemimpin

yang turun dari langit). Di Matajang ada sebuah lapangan, ditengah lapangan tersebut terlihat seorang laki-laki berbaju kuning duduk diapit 3 orang, orang yang berbaju putih tadi mendatangi orang berbaju kuning dan mengaturkan sembah/hormat sehingga semua rakyat Bone yakin bahwa orang berbaju kuning adalah benar-benar *Tomanurung* (pemimpin yang turun dari langit). Mereka kemudian meminta *Tomanurung* (pemimpin yang turun dari langit) menjadi raja Bone dan membangun istana di Bone. Pada saat itu kerajaan lain seperti Pallakka, Awangpone, Cina, dan Pattiro lama kelamaan bergabung dengan Bone di bawah kepemimpinan *Tomanurung* (pemimpin yang turun dari langit) yang bergelar Mattasi'LompoE. Kemudian ia menikah dengan Manurunge ri Toro' bernama Tenriawaru dan dikarunia 5 orang anak, keturunan inilah yang hingga sekarang menjadi raja di Bone. Perbedaan antara versi Gowa dan Bone hanya persoalan jenis kelamin *Tomanurung* (pemimpin yang turun dari langit) jika di Gowa *Tomanurung* (pemimpin yang turun dari langit) seorang perempuan maka di Bone *Tomanurung* (pemimpin yang turun dari langit) seorang laki-laki.

4.3.2 Stratifikasi Sosial Masyarakat

Stratifikasi sosial masyarakat Sulawesi Selatan dalam Latoa memberikan peranan dalam kehidupan, bukan hanya menurut penjiwaan. Pada umumnya persekutuan orang Bugis berdasarkan prinsip genealogis atau persekutuan kekerabatan, sehingga orang Bugis Makassar tidak terlalu terikat kepada wilayah tertentu dalam mencari nafkah. Karena dimana saja mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu persekutuan genealogis seperti dijumpai adanya:

1. *Ajjoareng* (orang yang menjadi pemimpin) bernama *Arung* (Bugis) dan *Ponggawa* (Makassar) adalah tokoh yang dijadikan sumbu kegiatan integratif dan perkembangan

hidup kebudayaan secara keseluruhan. Sejak Kerajaan Bone kehilangan kedaulatannya (1950) istilah *ajjoareng* (pemimpin) tidak lagi berarti aparat kekuasaan pemerintahan formal.

2. *Joa* (pengikut) pada zaman dulu terdiri atas lapisan masyarakat *maradeka* (merdeka) yang menunjukkan kesetiaan kepada *ajjoareng* (pemimpin). Dalam proses integrasi kegiatan antar lingkaran pusat dan lingkaran di luarnya diatur oleh *Pangadereng* (pedoman hidup) yang meliputi semua lingkaran kehidupan.

Sekarang tidak ada lagi *arung* (Bugis) atau *pampawa ade* (penjaga adat) dalam arti *ajjoareng* (pemimpin), namun puncak piramida sosial diduduki oleh kelompok elite baru yang terdiri atas aparat kekuasaan negara, seperti gubernur dan bupati/walikota, golongan cendekiawan, militer dan pemilik modal. Setelah masa penjajahan Belanda golongan elite kembali menempati kedudukan elite yang baru komposisi elite inilah yang berlangsung sampai kemerdekaan RI, sebagai berikut:

1. *Kaum Anakarung* (bangsawan) yang setia kepada Belanda dan golongan bangsawan yang berpendidikan (*ambtenaar*) sebagai kelas utama.
2. Kaum *ambtenaar gubernermen*, kalangan cendekiawan yang mendapatkan pendidikan formal dan kalangan ulama Islam/adat serta pemimpin gerakan sosial sebagai kelas menengah.
3. Kaum hartawan, pedagang dan pengusaha, sebagai elite kelas dasar.

Lebih lanjut adalah pelapisan sosial dalam Makassar adalah:

1. *Karaeng* (bangsawan), terdiri dari bangsawan murni (*anak ti'no'*), bangsawan setengah murni (*anak sipue*) dan bangsawan darah (*anak cerak*) dan bangsawan rendah (*anak karaeng sala*).

2. *Tumaradeka* (orang biasa dari lapisan menengah yang merdeka), terdiri dari orang baik-baik (*tubajik*) dan orang kebanyakan (*Tusamarak*).
3. *Ata* (abdi), sebagai lapisan bawah yang terdiri dari abdi karena keturunan (*ata sossorang*), abdi yang diusir dari lingkungan keluarganya (*ata nibuang*) dan abdi yang digadaikan/tidak mampu bayar utang (*tumanggirang*).

Sedangkan pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis, khususnya di Bone adalah:

1. Bangsawan Bone (*anakarung to Bone*) terdiri dari anak bangsawan penuh (*anakarung matase*) yang terbagi lagi menjadi putra mahkota (*anakarung mattola*) dan putra/putri raja (*anakarung matase*) dan bangsawan (*anakarung*) yang terbagi lagi menjadi bangsawan warga istana (*anakarung ri bolang*), bangsawan separuh (*anakarung sipue*) dan bangsawan berdarah campuran (*anak cerak*).
2. Orang merdeka (*to maradeka*) terdiri dari kepala kaum/anang (*to deceng*) dan rakyat kebanyakan (*to sama*)
3. Hamba (*ata*) yang terdiri dari hamba karena keturunan (*ata mana*) dan hamba baru (*ata mabuang*).³¹

Setelah *To Manurung* disepakati sebagai elite sentral dalam kehidupan masyarakat, terjadi pengelompokan elite baik secara struktural dan fungsional. Secara struktural ada kelompok elite bangsawan yang disebut *Arung*(raja), *Anakarung*, *Gallarang*, *Karaeng*, *Ana karaeng*, *Puang* dan *Daeng* serta *Matoadi*, *Ulu anang* dan *Ampu lembang*. Pengelompokan elite bersifat vertikal dan antara elite terjadi stratifikasi sesuai dengan posisi dan kekuasaan yang dimiliki dalam pemerintahan. Disamping terjadi

³¹ Mattulada. 1995. *Latoa Lukisan Analitis thd Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin Pers. hlm. 438.

pengelompokan elite secara struktural terjadi pula pengelompokan secara fungsional, dimana elite dikelompokkan sesuai dengan kemampuan, kelebihan dan fungsinya dalam masyarakat. Terjadi pengelompokan elite seperti cendikiawan/akademisi (*tu caradde*), pengusaha/orang kaya (*tu kalumannyang*), pemberani/pahlawan (*tu barani*), pemimpin pemerintahan (*to mapparenta*) dan pemimpin kerohanian (*tu panrita*). Pengelompokan elite secara fungsional lebih bersifat horizontal. Setiap lapisan masyarakat dapat menjadi bagian dari kelompok elite sepanjang memiliki kemampuan sesuai dasar pengelompokan, tanpa membedakan asal usul dan status dasar.

Terbukanya peluang untuk menjadi elite bagi setiap lapisan masyarakat menyebabkan munculnya berbagai pengelompokan elite di Sulawesi Selatan. Setiap elite membentuk kelompok sesuai dengan profesinya. Ada kelompok militer, pengusaha, partai politik, suku, bangsawan, ulama dan berbagai kelompok elite lainnya.³²

4.3.3 Hubungan Antarelite

Hubungan antarelite di Sulawesi Selatan khususnya antara elite Bugis dan elite Makasar dari sebelum penjajahan sampai sekarang ini senantiasa diwarnai konflik. Dimulai pada abad XV-XVI terjadi persaingan dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan dan pengaruh antarelite di wilayah Makassar dan Bugis, yang dalam memperluas wilayah kekuasaannya, elite politik melakukan penaklukan sehingga terjadi konflik dan walaupun terkadang berakhir dengan perdamaian. Kemudian pada kedatangan *To Manurung* (pemimpin yang turun dari langit) pada abad XIV, untuk

³² Ibid., 497; Christian Pelras. 1966. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar. hlm. 122-167; Jayadi Nas. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Massaile & LEPHAS. hlm. 115-120.

meredakan konflik yang terjadi. Namun terkadang konsensus dilanggar oleh generasi berikutnya yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan sampai masa penjajahan.

Di masa penjajahan pun pada abad XVII hubungan antarelite utama diwarnai persaingan antara Sultan Hasanuddin (Raja Gowa) dengan Arung Palakka (Raja Bone) yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh politik di Sulawesi Selatan, yang kemudian Belanda menawarkan perdamaian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya. Namun muncul penolakan dari kalangan elite Kerajaan Makassar sehingga kemudian berlanjut menjadi persaingan antara sekutu Bone-Soppeng yang dipimpin Arung Palakka dengan sekutu Gowa-Wajo yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Ali, yang dimenangkan oleh Arung Palakka dengan menyatukan negeri-negeri di Sulawesi Selatan selama dua tahun. Keberhasilan perdamaian Arung Palakka dan Sultan Amir Hamzah sampai Raja Gowa itu wafat tahun 1674 yang kemudian diganti oleh Sultan Muhammad Ali. Terjadinya pergantian Raja Gowa meregangkan kembali hubungan dengan Arung Palakka dengan campur tangan pihak Belanda untuk memecah belah negeri ini dengan terpolarisasinya elite politik akibat politik adu domba Belanda dalam pengangkatan Karaeng Pangkajene menjadi Raja Gowa.

Namun setelah kemerdekaan suasana politik di Sulawesi Selatan mengalami perubahan dengan munculnya perasaan patriotisme dan nasionalisme dalam masyarakat yang berpengaruh dalam perubahan politik. Muncul gerakan politik dan pemberontakan dari kalangan elite yang berasal dari kelompok lapisan bawah dengan latar belakang pendidikan agama Islam yang bermaksud melawan Belanda. Memasuki tahun lima puluhan elite politik lokal mulai berbeda pandangan dalam menanggapi proses kemerdekaan, dimana setiap elite dan kelompok kepentingan bersaing untuk

mendapatkan sumber kekuasaan. Jadi sepanjang sejarah Sulawesi Selatan, hubungan antarelite selalu diwarnai persaingan.

Pada masa orde lama pun terjadi persaingan antarelite golongan federalis yang dipelopori A. Massarapi, A.C. Manoppo, Baoesat A. Baso dan Andi Azis yang mendukung negara federalis dengan golongan unitaris yang dipelopori Yusuf Bauty, Makkarang, Moh. Riri Amin Daud, Abd. Rahman Tamma, R. Sukarto, Hamang yang menginginkan kembali ke Negara Kesatuan Republik DI/TII dan Permesta. Pemberontakan Qahhar Mudzakar ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan elite politik Sulawesi Selatan. Upaya menghancurkan kekuatan gerakan DI/TII yang melibatkan elite TNI yang berasal dari Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan ikatan provinsionalisme dan keluarga oleh pemerintah pusat justru berakibat konflik antarelite politik lokal di Sulawesi Selatan tidak dapat dihindari.³³

Sistem politik otoriter dan sentralistik pada masa orde baru berhasil menekan persaingan antaretnis tidak muncul dipermukaan dalam pengambilan keputusan. Elite politik lokal cenderung bersatu untuk membangun daerahnya. Malah yang sering muncul adalah konflik antarelite politik di pusat dengan masyarakat di tingkat lokal atau persaingan antarelite pusat untuk memperebutkan pengaruh di tingkat lokal. Namun kondisi ini berubah ketika reformasi berlangsung dengan terbukanya ruang politik masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Terjadi persaingan antarelite politik lokal dalam mendapatkan kekuasaan baik berdasarkan etnisitas, aliran politik maupun strata sosial.

³³ Jayadi Nas. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Massaile & LEPHAS. hlm. 173-183.

4.4 Budaya Masyarakat di Sulawesi Selatan

Dalam nilai dasar budaya politik Bugis Makassar yang terdiri dari lima nilai yang disebut sebagai lima pegangan (*lima akkateningeng*) yang dijadikan pegangan dalam menjalankan pemerintahan, yakni;

- a. Konsisten (*ada tongeng*), bahwa seseorang patut dijadikan pemimpin adalah kata-katanya dapat dipegang.
- b. Kejujuran (*lempuk*), bahwa seorang raja/pemimpin memelihara kejujuran dan tidak mengambil hak rakyatnya.
- c. Ketegasan (*getteng*), bahwa ketegasan dan keteguhan pemimpin berpegang pada prinsip pengayom masyarakat.
- d. Kepatutan (*asittinajang*), bahwa seseorang diangkat menjadi pemimpin berdasarkan kepatutan/kepatantasan, yang berhubungan dengan kemampuan jasmani dan rohani.
- e. Saling menghargai (*sipakatau*), bahwa dalam interaksi sosial harus saling menghargai.
- f. Tawakal (*mappesona ri pawinruk seuwae*), nilai religius yang mempedomani tindakan manusia dan pertanggungjawaban kepada penciptanya.

Selain kelima pedoman hidup yang disebut pangadereng bagi orang Bugis Makassar juga sangat memegang kuat yang namanya *Siri' Na Pacce* (perasaan malu dan sepenanggungan). *Siri'* merupakan salah satu nilai penting dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang secara fenomenal mewarnai kebudayaan di seluruh suku asli di Sulawesi Selatan. Secara harfiah *Siri'* dalam Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar berarti rasa malu, dan lebih dihayati sebagai makna kultural. Makna kultural *siri'* diartikan sebagai sistem nilai kultural kepribadian sebagai anggota masyarakat Bugis Makassar.

Menurut Erlington bahwa *siri* bagi orang Bugis merupakan tujuan hidup yang paling tinggi dan penting untuk menjaga *siri*'nya, akibatnya bahwa jika seseorang bangsawan tinggi yang cukup bijaksana dan punya keluarga besar secara otomatis punya pengaruh yang besar dalam masyarakat. Karena jika banyak orang yang bersatu *siri'* (*maseddi siri'*) dengannya dan akan mendengarkan petunjuk dan nasehatnya, maka mereka telah menjaga *siri'* (harga diri) keluarga atau kelompoknya, orang Bugis Makassar lebih menerima nasehat dari orang tuanya atau keluarganya daripada orang lain. Sehingga dalam masyarakat Sulawesi Selatan hanya dikenal dua golongan yaitu keluarga dan orang lain dalam pengertian *maseddi siri'* (bersatunya rasa malu).³⁴

Konsep yang berpadanan dengan *siri'* adalah *Pacce* (Makassar), *Pesse* (Bugis) yang berarti sependudukan. *Pacce* berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, serta pemuliaan humanitas (*sipakatau*) sebagai motivasi kesetiakawanan sosial suku bangsa Bugis Makassar, sehingga bagi orang Bugis Makassar *Siri* dan *Pacce* adalah ikatan pemersatu dalam upaya menegakkan serta memulihkan harga diri (*siri'*).

Zaman dahulu banyak orang Bugis Makassar yang merantau dan tinggal di luar daerah asalnya seperti di Kalimantan, Sumatera, bahkan Malaysia, merupakan akibat pelaksanaan tekad orang Bugis Makassar untuk meninggalkan rajanya, apabila menganggap tidak setuju dengan kepemimpinan rajanya bahkan masih terjadi sampai sekarang. Jadi keputusan merantau bagi orang Bugis Makassar selain faktor ekonomi, juga sebagai wujud ketidaksetujuan dengan tindakan pemimpinnya. *Siri'* yang berarti malu dimaksudkan sebagai upaya pengekan diri terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan wujud totalitas dalam sistem budaya, sedangkan *siri'* dalam arti

³⁴ Sally Erlington. 1977. *Siri, Darah, dan Kekuasaan Politik* (Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan). Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. hlm. 40-60.

harga diri/martabat merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum.

BAB V

PERGESERAN ELITE POLITIK DI SULAWESI SELATAN PRA DAN PASCA REFORMASI ORDE BARU

5.1 Pengangkatan Gubernur Sulawesi Selatan Masa Orde Baru

5.1.1 Pengangkatan Ahmad Lamo (1966-1978)

Pada masa orde baru, pengangkatan pejabat politik dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengakomodasi aspirasi kedua etnis Bugis dan Makassar. Sehingga persaingan tersebut tidak muncul dipermukaan karena berhasil ditekan oleh pemerintah pusat dengan penunjukan pejabat politik. Seperti pengangkatan pejabat gubernur berasal dari kalangan militer, pengangkatan Ahmad Lamo pada tahun 1966 sampai pada tahun 1978. Untuk menetralsir situasi Sulawesi Selatan yang ketika itu Indonesia baru saja terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI.³⁵ Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Ahmad Lamo yang etnis Bugis-Duri dianggap tokoh yang berhasil melakukan penataan pelaksanaan pemerintahan yang baru saja ditetapkan sebagai daerah otonom dan menjaga stabilitas keamanan yang ketika itu tidak menentu. Jika dianalisis pengangkatan Ahmad Lamo yang dari kalangan militer karena waktu itu pejabat-pejabat pemerintahan berasal dari kalangan militer dengan mempergunakan jaringan militernya yang dekat dengan Suharto, karena keberhasilannya menciptakan stabilitas politik sehingga dicalonkan kembali pada periode berikutnya dengan surat keputusan Presiden Suharto ketika itu.

Pengangkatan Ahmad Lamo selama dua periode kepemimpinan dianalisis sebagai akibat dari kekuasaan yang sentralistik di masa orde baru menyebabkan penunjukan pejabat politik selalu berasal dari kalangan militer yang dikaryakan yang disebabkan

³⁵ Dijelaskan dalam tulisan Christian Pelras. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.

kedekatan dan afiliasi kalangan militer dengan penguasa orde baru. Sehingga untuk jabatan gubernur dan bupati selalu dijabat dari kalangan militer. Pemerintahan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mempertegas pentingnya stabilitas politik maka pelaksanaan pembangunan dilakukan secara sentralistik dengan mengandalkan kekuatan militer.

Peralihan dari rezim orde lama ke orde baru menyebabkan perubahan dalam sistem politik Indonesia dengan tiga kekuatan politik yang menopang kekuasaan Suharto yaitu militer, birokrasi, dan Golkar yang menguasai jabatan dan posisi-posisi strategis. Sehingga yang menarik dalam menganalisis tentang dominasi etnis Bugis terhadap etnis Makassar, Mandar, dan Toraja lebih didasarkan beberapa pertimbangan; Pertama, kedekatan elite-elite etnis Bugis di tingkat nasional dengan pemerintah pusat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pengangkatan pejabat politis di Sulawesi Selatan, termasuk kedekatan dengan tokoh dari Sulawesi Selatan, Prof Baharuddin Jusuf Habibie yang merupakan elite politik nasional. Kedua, pergantian gubernur selalu berasal dari kalangan militer untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan menempatkan kepala daerah dari kalangan militer juga yang loyalitas yang tinggi kepada pimpinannya.

5.1.2 Pengangkatan Andi Oddang (1978-1983)

Setelah Ahmad Lamo menjabat gubernur selama dua periode, dilanjutkan dengan pengangkatan Andi Oddang yang bangsawan dari Barru (daerah Bugis) dan juga masih dari kalangan militer, sebelumnya Andi Oddang yang berpangkat Kolonel infantri adalah mantan Kepala Staf Kodam VII Wirabuana menggantikan Ahmad Lamo, semakin menguatkan pengaruh militer dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah ini. Namun

keberhasilan Andi Oddang dalam menjaga stabilitas politik di Sulawesi Selatan tidak diperpanjang untuk masa jabatan yang kedua kalinya karena pemerintah pusat yang justru mengangkat Prof. Dr. A. Amiruddin menggantikan Andi Oddang sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Dari gubernur yang menjabat sebelumnya, Andi Oddang termasuk gubernur yang hanya menjabat satu periode saja. Berdasarkan fenomena ini maka dianalisis berdasarkan pertimbangan bahwa suasana di Sulawesi Selatan sudah stabil untuk pembangunan sehingga digantikan oleh pejabat gubernur yang berasal dari kalangan sipil.

Data ini di pertegas oleh hasil pengamatan Prof. Hamka Naping yang ketika penulis menanyakan mengapa gubernur Sulawesi Selatan di masa orde lama dan orde baru hampir selalu beretnis Bugis, dijelaskan oleh beliau bahwa pengangkatan gubernur ketika itu disebabkan karena sentralistiknya kekuasaan pada Presiden Suharto dan itu bisa dimanfaatkan oleh elite-elite etnis Bugis yang kebetulan punya akses terlebih dahulu kesana.

“...karena alat kontrolnya dari tingkat pusat, sehingga lebih disebabkan pihak mana yang lebih dahulu memiliki akses ke Presiden Suharto.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin ini menggambarkan bahwa pengangkatan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan bukan terletak pada etnis Bugis yang mayoritas dari segi kuantitas tapi lebih disebabkan oleh kemudahan akses dan afiliasi orang-orang Bugis kepada penguasa tunggal ketika itu, seperti yang ditambahkan oleh beliau:

“Artinya justru orang Bugis jadi gubernur pada masa orde baru bukan karena representasi kebugisan dan kemakassaran tapi karena gubernur yang dulu

diangkat sehingga dia lepas dari etnis, cuma persoalannya kebetulan orang yang mengangkat itu punya afiliasi politik dengan orang Bugis. Yah, itu kenyataan lain tapi seandainya orang yang mengangkat itu punya afiliasi politik dengan orang Makassar atau Toraja, tidak menutup kemungkinan orang Makassar/Toraja yang jadi gubernur.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009).

Pengangkatan elite politik dari kalangan militer untuk menduduki jabatan politik di Sulawesi Selatan menguntungkan bagi elite militer dari etnis Bugis yang terlebih dahulu memiliki akses dan afiliasi dengan pemerintah pusat, kemudahan akses tersebut dimanfaatkan elite-elite etnis Bugis yang berada di pusat untuk melobi pemerintah pusat dalam pengangkatan gubernur-gubernur berikutnya yang memang semua berasal dari etnis Bugis terutama daerah Bosowa (Bone, Soppeng, dan Wajo).

5.1.3 Pengangkatan Ahmad Amiruddin (1983-1993)

Prof. Dr. Ahmad Amiruddin yang doktor Atom pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kimia dan Biologi ITB dan Deputy Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional, dan terakhir sukses memimpin Universitas Hasanuddin. Kemudian diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan atas rekomendasi Jenderal (Purn) M.Yusuf dan B.J. Habibie kepada Suparjo Rustam selaku Menteri Dalam Negeri dan kepada Panglima ABRI agar mengamankan pencalonan Amiruddin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.³⁶ Pengangkatan Amiruddin mendapat penolakan karena dianggap bukan berasal dari kalangan bangsawan atau keluarga yang pernah jadi pemimpin. Desakan-desakan tersebut disebabkan perilaku bangsawan kelas atas Bugis-Makassar enggan diperintah oleh lapisan strata yang berada di bawah mereka, namun setelah dirunut silsilah keluarganya baru kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Pertimbangan dominan pengangkatan gubernur di masa orde baru adalah stabilitas politik sehingga jabatan-

³⁶ Seperti yang ditulis Rudi Harahap. 1999. *A. Amiruddin “Nahkoda Dari Timur”*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Latimojong.

jabatan strategis dan jabatan politik didominasi oleh kalangan militer dan berasal dari keluarga bangsawan. Penulis kemudian menanyakan fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut kepada bapak Hamka Naping. Beliau menjelaskannya sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap keturunan bangsawan/orang-orang yang pernah memerintah seperti penjelasan beliau:

“Karena ada anggapan bahwa bakat-bakat pemimpin adalah bakat yang diwariskan. Padahal yang sebenarnya kepemimpinan itu walaupun terpengaruhi bakat, tapi bisa saja diperoleh kalo orang mau belajar tentang kepemimpinan. Tapi disini (maksudnya Sulawesi Selatan) yang dominan mengatakan bahwa yang bisa jadi pemimpin adalah yang sudah jadi pemimpin yang diwariskan dari orang tuanya.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Sebelumnya Ahmad Amiruddin tidak pernah diperhitungkan untuk menduduki jabatan tersebut, namanya baru disebut-sebut menjelang pelantikan sebagai gubernur bahkan ada upaya menolak kehadirannya. Namun kemampuannya dalam memimpin Sulawesi Selatan dengan Tri Konspeksi Pembangunannya, yakni: Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Komoditas, dan Petik Olah Jual, membawanya menduduki jabatan gubernur selama dua periode. Hal tersebut memperlihatkan pengangkatan seorang gubernur sangat ditentukan oleh Presiden Suharto ketika itu. Terbukti ketika Sarwono Kusumaatmaja menghadap Suharto mengusulkan agar Amiruddin diangkat menjadi menteri tapi Presiden Suharto kala itu masih memberikan kepercayaan untuk kembali memimpin Sulawesi Selatan.

Ketika pergantian Ahmad Amirudin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dipercepat karena terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI dan kemudian digantikan oleh Z.B. Palaguna yang berasal dari kalangan militer. Kariernya yang bagus dalam militer termasuk dipercayakan sebagai DANREM 132/TADULAKO DAM VII/Wirabuana di

Palu Sulawesi Tengah, kemudian diangkat sebagai Anggota MPR utusan Fraksi ABRI tahun 1983-1988. Pada akhirnya diangkat sebagai wakil gubernur mendampingi H. Ahmad Amiruddin yang berasal dari kalangan akademisi. Penunjukan Z.B. Palaguna yang berasal dari militer untuk mendampingi Ahmad Amiruddin yang sipil sebagai representasi sipil-militer. Keduanya yang berasal dari etnis yang sama (Bugis) tentu telah dipertimbangkan sebelumnya yang jika gubernurnya diganti maka wakilnya yang berpeluang untuk menggantikan, sehingga dominasi etnis Bugis tidak tergeser. Terbukti dengan dipercepatnya pergantian Ahmad Amiruddin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

5.1.4 Pengangkatan Z.B. Palaguna (1993-2003)

Mayjen TNI Z.B. Palaguna yang sebelumnya adalah wakil gubernur muncul menjadi Gubernur Sulawesi Selatan periode 1993-1998 setelah melalui proses penjaringan dan pemilihan oleh anggota DPRD. Baharuddin Lopa yang merupakan tokoh masyarakat Mandar yang terkenal jujur dan taat terhadap hukum, setelah mengetahui adanya rekayasa politik dengan ditempatkan sebagai boneka saja dengan hanya akan mendapatkan 5 (lima) suara saja dalam pemilihan oleh anggota DPRD memilih mengundurkan diri sebelum hari pemilihan, sedangkan Basri Hasanuddin yang juga etnis Mandar yang akan mendapatkan 7(tujuh) suara, memilih tidak mengundurkan diri untuk menghargai calon gubernur lain, anggota DPRD dan masyarakat Mandar yang sudah mendukungnya.³⁷ Sehingga bisa dipastikan dari 75 (tujuh puluh lima) suara dari anggota DPRD, 63 (enam puluh tiga) suara memilih Z.B. Palaguna yang disebabkan jumlah etnis Bugis yang dominan dalam anggota DPRD dan adanya usulan mantan gubernur A. Amiruddin dari etnis Bugis yang menitipkan calon gubernur yang memang mendapat

³⁷ Diolah dari Klipping Berita Seputar Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 1993-1998.

dukungan dari Partai Golkar yang di masa orde baru begitu berkuasanya dan fungisionarisnya dominan etnis Bugis.

Sama halnya ketika Z.B. Palaguna terpilih kembali untuk periode berikutnya pada tahun 1998 yang untuk pertama kalinya melalui proses penjaringan dan kemudian dipilih langsung oleh anggota DPRD Sulawesi Selatan dan direstui pemerintah pusat/Presiden RI. Panitia Khusus yang dibentuk beranggotakan unsur pimpinan dewan dan fraksi-fraksi yang dominan etnis Bugis. Dari tiga orang calon gubernur yang masuk dalam agenda Panitia Sebelas yakni Z.B. Palaguna yang masih gubernur Sulawesi Selatan yang mengikuti pemilihan lagi untuk kedua kalinya berhasil meraih 33 suara mengalahkan Rady A.Gany yang memperoleh 8 suara dan Masnawai 4 suara.

Untuk memperjelas uraian diatas, penulis menanyakan hal tersebut kepada bapak Kausar Bailusy, Pengamat Politik dan etnik dari Universitas Hasanuddin. Beliau menjelaskan bahwa dominasi etnis Bugis dengan selalu menduduki jabatan Gubernur Sulawesi Selatan selama masa orde baru menyulitkan etnis lain untuk menduduki posisi tersebut, kondisi ini menurut beliau:

“...Pak Harto itu lebih senang orang Bugis, tapi kalo situasi kacau, orang Makassar yang dipasang sebagai panglima karena *rewa ki* (jagoan).Cocok dijadikan panglima perang karena suka berperang, makanya orang Bugis bikin koalisi karena kalo tidak koalisi tidak bisa melawan Makassar.”(Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Pengangkatan Gubernur Sulawesi Selatan di masa orde lama dan orde baru banyak dipengaruhi oleh kondisi anggota DPRD yang didominasi oleh etnis Bugis yang memiliki strategi menempatkan orang-orang Bugis mewakili daerah etnis Makassar, Mandar dan Toraja. Sehingga wakil-wakil rakyat di DPRD walaupun berasal dari daerah Makassar, Mandar, dan Toraja tapi tidak mewakili etnis tersebut karena sebenarnya

mereka berasal dari etnis Bugis. Dengan dukungan yang kuat dari anggota-anggota DPRD yang mayoritas etnis Bugis sehingga kepemimpinan orang-orang Bugis di Sulawesi Selatan tidak bergeser yang datanya sengaja penulis lampirkan untuk memperkuat keterangan dari informan. Secara historis, dominasi etnis Bugis ini juga disebabkan perkawinan politik yang dilakukan oleh bangsawan-bangsawan Bugis untuk memperluas daerah kekuasaannya dengan menikahi perempuan etnis lainnya dengan tujuan agar etnis Bugis bisa diterima dan menguasai wilayah etnik lain. Sehingga sekarang berpengaruh pada posisi etnis Bugis di semua wilayah dan jabatan strategis di Sulawesi Selatan.³⁸

Dominasi elite-elite etnis Bugis di masa orde baru juga didasarkan atas tingkat pendidikan dan kemampuan yang merupakan hasil kebangkitan etnis Bugis. Pengangkatan Lanto Dg Pasewang dari etnis Makasar menjadi gubernur di awal kemerdekaan karena waktu itu tingkat kecerdasan/pendidikan masyarakat bagian selatan atau etnis Makasar yang mengecap pendidikan di Bantaeng dan Makassar jauh lebih baik dibandingkan masyarakat Bugis yang berada di utara, sehingga memacu orang-orang Bugis di daerah utara untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahkan menyekolahkan sampai ke Jawa. Setelah melalui waktu yang lama baru kemudian nampak di masa orde baru dengan berusaha mendapatkan dan menguasai jabatan politis dan jabatan-jabatan strategis di semua wilayah di Sulawesi Selatan.³⁹ Analisis ini diperkuat oleh pernyataan Prof. Abu Hamid yang melihat bahwa

³⁸ Dijelaskan pula oleh Serly Erlington tentang perkawinan politik orang Bugis dalam *Siri, Darah dan Kekuasaan Politik, (Bingkisan Budaya SulSel)*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. hlm.30.

³⁹ Mattulada. 1995. *Latoa Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin Press. hlm. 478-480.

kunci keberhasilan etnis Bugis di masa orde baru utamanya karena tingkat kecerdasan/pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan masyarakat etnis Makasar.

“Masalahnya adalah mutu pendidikan, masalah wawasan. Mana orang Makasar yang banyak doktor, di Bugis banyak yang berpendidikan. sedangkan di Makassar kurang berpendidikan karena situasi desa di daerah Makasar dan daerah Bugis dan Toraja tidak sama. Situasi desa di daerah Makasar masih banyak yang terkungkung/tertutup sedangkan desa di daerah Bugis terbuka apalagi Toraja yang terbuka, wawasan orang-orang di desanya lebih terbuka sedangkan desa-desa Makasar lebih tertutup dan curiga terhadap orang luar kalo ada orang baru masuk desa langsung dicurigai, lebih-lebih Toraja dengan pariwisatanya. Berarti masyarakatnya disana masih tertutup karena pendidikannya yang terbatas. Itulah tidak ada orang Makasar yang menonjol, karena desanya lebih tertutup tidak dipentingkan bagaimana orientasi memperbaiki pendidikan untuk mendapatkan jabatan tapi yang pokoknya bagaimana bisa hidup.” (Hasil Wawancara, 27 Maret 2009).

Masa orde baru adalah era kebangkitan masyarakat Bugis dan kemudian menguasai posisi-posisi jabatan politis dan jabatan strategis di Sulawesi Selatan makin kencang ketika usaha yang dijalankan keluarga Jusuf Kalla makin besar dan sampai ke tingkat nasional, disusul kedudukan Jusuf Kalla sebagai menteri di masa orde baru yang memudahkan akses orang-orang Bugis terutama Bugis Bosowa (Bone, Soppeng, Wajo) untuk mendapatkan jabatan politis dan jabatan strategis baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.⁴⁰ Ditambah kuatnya ikatan kekeluargaan orang Sulawesi Selatan. Pada umumnya memperluas jaringan kekerabatan di kalangan orang Bugis merupakan satu jalan untuk mencapai relasi sosial yang luas. Sehingga jalan terbaik untuk mendekati orang Bugis dalam kehidupan sosialnya adalah melalui perkawinan. Orang yang diterima dalam jaringan kekerabatan yang melahirkan hubungan *siri* (sepenanggungan) dan solidaritas kaum.

⁴⁰ Dijelaskan dalam tulisan Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar. hlm. 432-435.

5.2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Pasca Reformasi Orde Baru (Pemilihan Amin Syam 2003-2008)

Situasi politik nasional yang sudah mulai memasuki transisi dari era orde baru ke era reformasi turut mempengaruhi proses Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003, yang mana pengangkatan gubernur tidak lagi berdasarkan keinginan pemerintah pusat namun berdasarkan pemilihan dari anggota DPRD Provinsi yang menjadi penyalur aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan politik seperti dalam partai politik di DPRD dan kelompok kepentingan yang berada diluar parlemen.

Polarisasi kepentingan semakin menguat, di dalam parlemen muncul faksi-faksi elite politik berdasarkan kepentingan kelompok dan perorangan. Di luar parlemen juga terjadi polarisasi kepentingan berbagai kelompok, diantaranya dari kalangan militer seperti Persatuan Purnawirawan ABRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan yang mendukung Amin Syam, Syahrul Yasin Limpo, dan Andi Jaya Sose. Dari partai politik terutama Golkar sebagai partai besar juga mengusulkan elite partainya Nurdin Halid, Aksa Mahmud, Andi Mattalatta dan Amin Syam. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan Nurdin Halid dan Andi Podji, sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan Aksa Mahmud dan K.H. Jamaluddin Amien.

Setelah melalui proses penjaringan dan seleksi oleh setiap fraksi maka ditetapkan tiga pasangan calon yakni pasangan Nurdin Halid-Iskandar Mandji yang diusulkan oleh Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dan merupakan representasi partai politik dan pengusaha, pasangan Aksa Mahmud-Abdul Malik Hambali yang dicalonkan oleh Fraksi

Amanat Nasional dan sebagai representasi elite partai politik, ekonomi, birokrasi dan kelompok aliran agama, dan pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo dicalonkan oleh Fraksi Partai Golkar yang merupakan representasi elite militer, elite partai politik, elite birokrasi, dan kelompok aliran nasionalis.⁴¹

Dari perspektif etnisitas, ketiga pasangan kandidat berasal dari dua etnis yang mayoritas di Sulawesi Selatan. Pasangan Nurdin Halid-Iskandar Mandji keduanya mewakili etnis Bugis, Aksa Mahmud-Abdul Malik Hambali juga mewakili etnis Bugis sedangkan pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo merupakan representasi etnis Bugis dan Makassar. Dari ketiga pasangan kandidat, Amin Syam-Syahrul yang memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan kuat dari kedua etnis Bugis dan Makassar dari pada pasangan lain dari etnis Bugis.

Situasi politik yang berubah dari orde baru ke reformasi orde baru pada tahun 1998, dimana masyarakat mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi politiknya, sehingga memunculkan persaingan baru berdasarkan kepentingan etnis dan kedaerahan antara elite politik lokal dalam memperebutkan kekuasaan. Dengan munculnya tiga elite Partai Golkar dalam bursa calon yaitu Amin Syam, Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo membuat perpecahan dukungan dalam Partai Golkar. Anggota Partai Golkar yang berasal dari etnis Makassar mendukung Syahrul Yasin Limpo, sehingga Syahrul memiliki pendukung 16 (enam belas) anggota DPRD dari Partai Golkar ditambah anggota dari partai lain yang berasal dari etnis Makassar.

Dukungan yang bulat dari anggota-anggota DPRD dari etnis Makassar dan masyarakat etnis Makassar yang menuntut adanya penyatuan paket calon gubernur dan

⁴¹ Polarisasi konflik yang dijelaskan Jayadi Nas. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Masaile & LEPHAS. hlm. 185-186.

wakil gubernur dari kedua etnis Bugis Makasar. Karena selama orde baru perkembangan daerah utara/daerah Bugis lebih maju dan dominasi elite politiknya diberbagai jabatan strategis menimbulkan kecemburuan dari masyarakat bagian selatan yang jauh tertinggal, dan elite dari daerah selatan tidak pernah diperhitungkan dalam menduduki posisi kekuasaan. Mereka akan memilih memisahkan diri dengan membentuk provinsi baru, Provinsi Makassar Raya meliputi Kabupaten Pangkep, Maros, Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan sebagian Kabupaten Sinjai. Sehingga Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 dijadikan momen strategis menuntut diperhitungkan menduduki posisi kekuasaan yang selama orde baru di monopoli elite-elite etnis Bugis dari daerah bagian utara.

Tuntutan agar Amin Syam dipasangkan dengan Syahrul Yasin Limpo sebagai representasi Bugis Makasar yang mewakili daerah utara dan selatan. Posisi Syahrul Yasin Limpo yang memiliki dukungan bulat dari 16 (enam belas) anggota DPRD dari Partai Golkar dan anggota DPRD etnis Makassar dari partai lain, ditambah makin kencangnya tuntutan pemekaran Provinsi Makassar Raya. Sehingga Moeh Roem yang awalnya akan berpasangan dengan Amin Syam memilih mengalah dengan pertimbangan dirinya dan Amin Syam adalah sama-sama dari etnis Bugis. Amin Syam yang memiliki dukungan riil dan posisinya yang strategis sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua Partai Golkar memutuskan memilih Syahrul dengan pertimbangan untuk mengakhiri konflik antarelite yang didasarkan pada kepentingan suku/wilayah dan justru akan mendapatkan dukungan suara dari kedua etnis dan memperhatikan keutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.

Posisi Syahrul sebagai wakil etnis Makasar satu-satunya dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur merupakan strategi bargaining yang dilakukan etnis Makasar untuk menduduki posisi tersebut, karena sebelumnya Syahrul juga didekati oleh tim sukses Nurdin Halid. Namun Syahrul yang mendapat dukungan kuat dari anggota DPRD yakni adiknya Ichsan Yasin Limpo, iparnya Susilo MT Harahap dan anggota DPRD dari etnis Makassar memilih menerima tawaran Amin Syam.

Kondisi ini juga diceritakan oleh bapak Ashabul Kahfi, Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan yang waktu itu bapaknya K.H. Jamaluddin Amien juga masuk bursa pencalonan yang diusulkan oleh PAN. Di internal PAN sendiri Ashabul Kahfi bukan satu-satunya generasi penerus K.H. Jamaluddin Amien, saudaranya Abdul Hadi Jamal juga mantan Anggota DPD dari Sulawesi Selatan. Menurut beliau:

“Kalo dulu itu anggota DPRD yang terpolarisasi antara siapa yang mendukung siapa, sehingga ada semacam dukungan yang didasarkan pada ikatan-ikatan berdasarkan kepentingan, kewilayahan atau kesukuan, begitupun dalam partai. Kemudian muncul faksi-faksi yang berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok elit yang disebabkan perbedaan, persaingan antar anggota internal partai supaya kepentingannya yang terpenuhi. Kalo kita lihat pada pemilihan gubernur tahun 2003, di DPRD juga Pak Syahrul punya banyak dukungan terutama dua saudaranya, ada juga iparnya ditambah lagi anggota-anggota yang berasal dari Gowa dan dari suku Makassar” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2009)

Persaingan dalam memperebutkan kekuasaan antara etnis Bugis dan Makassar telah berlangsung lama, terutama antara Bugis-Bone dengan Makasar-Gowa. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kausar Bailusy tentang konflik laten yang terjadi antara Bugis dan Makassar di mulai dari persaingan Arung Palakka dari Bone dengan Sultan Hasanuddin dari Gowa, walaupun kekuatan keduanya bisa disatukan oleh kesamaan kepentingan.

Sebanyak 39 jumlah suara anggota DPRD yang mendukung pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo diperoleh dari 35 anggota Fraksi Partai Golkar, 4 suara dari partai lain. Kemenangan pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo atas pasangan Aksa Mahmud-Abdul Malik Hambali dan Nurdin Halid-Iskandar Mandji banyak ditentukan oleh kemampuan Syahrul melakukan pendekatan terhadap anggota DPRD di bandingkan Amin Syam yang lebih mengandalkan dukungan anggota partainya. Syahrul mampu melakukan pendekatan kekeluargaan, kewilayahan dan kesukuan, partai lain, keorganisasian yang telah lama dilakoninya serta memiliki kecerdasan intelektual yang menonjol. Sehingga dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 Syahrul lebih memiliki pengaruh terhadap kemenangan yang diraihinya.

BAB VI

KEKALAHAN POLITIK ETNIS: MUNCULNYA POLITIK JEJARING

6.1 Rekonstruksi Politik Etnis Makassar

6.1.1 Munculnya Figur Syahrul Yasin Limpo

Figur Syahrul Yasin Limpo sebagai salah satu wakil etnis Makassar berawal pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2003 mampu meraih dukungan dari berbagai pihak terlepas dari dukungan Partai Golkar, dukungan tersebut berdasarkan ikatan kekeluargaan, ikatan suku/kewilayahan, ikatan organisasi partai politik dan di luar partai politik. Ikatan kekeluargaan yang digunakan Syahrul karena didukung oleh kedudukan ayahnya H.Yasin Limpo purnawirawan tentara, mantan pejabat, tokoh Muhammadiyah; ibunya Nurhayati Yasin Limpo mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1994-1999, dan sekarang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) Sulawesi Selatan, kakaknya Tenri Olle Yasin Limpo sebagai Ketua Partai Golkar Gowa, adiknya Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa dan Wakil Bendahara Partai Golkar, Haris Yasin Limpo sebagai Wakil Ketua Golkar Makassar, Dewie Yasin Limpo sekarang Ketua DPD Partai Hanura, Irman Yasin Limpo yang merupakan salah satu pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal), dua orang kakaknya memilih mengelola bisnisnya di Jakarta dan istrinya Drg. Ayunsri Harahap, dokter/pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar serta iparnya Susilo MT Harahap yang merupakan fungsionaris Partai Golkar Sulawesi Selatan. Ikatan kesukuan/kewilayahan didapat dari dukungan elite-elite etnis Makassar yang menduduki posisi strategis diantaranya dukungan dari Malingkai Maknun (Wakil Ketua Golkar Gowa) serta tokoh-

tokoh di luar Partai Golkar. Namun dukungan yang didapatkan tersebut tidak lepas dari kecerdasan intelektual dan kemampuan Syahrul untuk meyakinkan segenap komponen masyarakat.

Pencalonan Syahrul sebagai calon satu-satunya dari etnis Makassar waktu itu sangat mempunyai nilai tawar terhadap calon-calon berasal dari etnis Bugis untuk berpasangan dengan Syahrul, karena hampir dipastikan dukungan etnis Makassar secara bulat kepada Syahrul. Pada pemilihan gubernur sebelumnya, keputusan Syahrul menerima tawaran berpasangan dengan Amin Syam membuahkan kemenangan bagi pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 yang lalu.

Kemudian pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007 kemarin, Syahrul muncul sebagai kandidat gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang untuk pertama kalinya diadakan pemilihan langsung yang membawa angin segar bagi etnis Makassar yang selama pemerintahan orde baru tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi bergengsi tersebut yang disebabkan sistem pemilihan yang tertutup. Sekaligus merupakan kesempatan bagi etnis Makassar untuk berkompetisi secara fair dengan wakil dari etnis Bugis. Syahrul yang muncul sebagai representasi etnis Makassar tidak lepas dari kesuksesannya memimpin Kabupaten Gowa selama dua periode yang kemudian mengantarkannya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003.

Hasil perolehan suara yang diterima KPU Provinsi Sulawesi Selatan, perolehan suara pasangan Syahrul-Agus adalah 1.432.572 suara atau unggul 27.662 suara dari

pasangan Amin-Mansyur yang memperoleh 1.404.910 suara. Untuk lebih jelas terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan 2007**

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara	Presentase (%)
1	2	3	4
1.	H.M. Amin Syam dan Prof.Dr.H.Mansyur Ramly	1.404.910	38,76%
2.	H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar dan Ir.H.Mubyl Handaling	786.792	21,71%
3.	H.Syahrul Yasin Limpo,S.H,M.Si,M.H dan Ir.H. Agus Arifin Nu'mang, M.S	1.432.572	39,53%
	Jumlah	3.624.274	100%

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Syahrul memang memiliki kemampuan yang lebih menonjol dari tingkat intelektual maupun dari kemampuan membangun jaringan yang luas dari berbagai kalangan. Syahrul memiliki jaringan di berbagai organisasi karena kedudukannya seperti sebagai Ketua KNPI tahun 1990-1993, Ketua AMPI tahun 1993-1998, Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ketua FKPPi, Ketua FORKI, Ketua Pramuka, Ketua KOSGORO, Ketua IKA FH Unhas, dan penyiar di Radio Suara Celebes miliknya serta masih banyak lagi organisasi yang ditekuninya.⁴² Menonjolnya figur Syahrul dibandingkan figur-figur etnis Makassar lainnya dibenarkan oleh Prof. Kausar Bailusy, menurut beliau:

⁴² Jabatan-jabatan tersebut seperti yang ditulis Syahrul Yasin Limpo. 2005. *Jangan Marah Di Muara*. Makassar: Citra Pustaka.

“Faktor utamanya adalah terletak pada figur Syahrul itu sendiri selain kemampuannya mendekati semua kalangan, termasuk kemampuannya mendekati orang-orang Bugis untuk memilihnya. Dia itu aktif di banyak organisasi, ditambah lagi pemilihannya kan sudah terbuka/langsung oleh masyarakat.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Prof. Hamka Naping, dosen Antropologi Unhas, yang melihat figur Syahrul yang menonjol sebagai faktor utama kemenangannya pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dibandingkan oleh calon lainnya.

“Saya melihat bukan persoalan etnis, tapi pada kapasitas dan perjuangan Syahrul dan kepiawiannya dalam politik dan kemampuan membentuk jaringan yang saya anggap luar biasa.” (Hasil Wawancara, 23 Maret 2009).

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur langsung di Sulawesi Selatan yang untuk pertama kalinya, dibutuhkan upaya para kandidat untuk mendapatkan suara dari pemilih, terutama para pemilih yang belum menentukan pilihan dengan menggunakan cara yang cukup rasional. Salah satunya dengan menawarkan visi, misi dan program kerja yang akan mereka lakukan ketika terpilih. Kematangan berdemokrasi yang ditunjukkan oleh pemilih dengan lebih rasional dan independen dalam merespon visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh setiap kandidat. Kematangan tingkat rasionalitas rakyat dalam merespon setiap peristiwa politik yang terjadi, termasuk pemilihan kepala daerah dapat dijadikan tolak ukur kematangan berdemokrasi sebuah negara bangsa. Dimana para pemilih memiliki tingkat independensi yang terlepas dari ikatan struktur sosio-psikologis yang melingkupinya.

Sewaktu penulis menanyakan tentang visi, misi, dan program yang ditawarkan Syahrul kepada informan, pendapat informan tentang visi, misi dan program kerja yang ditawarkan oleh Syahrul pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah:

“ Saya lihat visi misi yang dijual sama Pak Syahrul memang bagus, tepat dengan masalah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Artinya bahwa perumusan visi misi itu lahir dari kemampuan dirinya dan kepeduliannya dengan apa yang dilihat di masyarakat, memang saya akui Pak Syahrul itu orangnya pintar.”(Hasil Wawancara, 14 Maret 2009)

Dari informasi ini terlihat rasionalitas pemilih sudah mulai menguat, dengan merespon kritis visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh para calon dan mulai melemahnya ikatan emosional kesukuan. Fenomena mudarnya loyalitas pemilih pada partai politik, juga menjadi titik awal untuk menggali lebih jauh pengaruh figur atau ketokohan dalam pemilihan gubernur yang lalu. Terdapat beberapa kecenderungan yang menunjukkan pentingnya pengaruh ketokohan dalam mempengaruhi perilaku pemilih, yaitu kepercayaan, nilai dan penghargaan.

Kemampuan yang dimiliki Syahrul yang Doktor Hukum ini mampu menandingi kemampuan calon-calon lain dalam merumuskan visi, misi, dan program yang akan dijual pada saat kampanye. Tentang visi, misi, dan program yang ditawarkan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, salah seorang informan dari kalangan intelektual menanggapi:

“Sewaktu Pak Syahrul masuk ke kampus memang kelihatan kalo beliau sangat menguasai pemerintahan dan kemampuannya untuk merumuskan visi misi berasal dari kapasitas dirinya.” (Hasil Wawancara, 20 Maret 2009).

Pernyataan ini dibenarkan oleh pendapat bapak Kausar Bailusy yang mengamati kemampuan tiap calon dalam pemilihan tersebut. Menurut beliau bahwa Syahrul memiliki kemampuan melihat kebutuhan masyarakat untuk diangkat dalam kampanye politiknya.

“Memang dari segi visi, misi, Syahrul unggul dalam artian dia mengangkat isu pendidikan dan kesehatan gratis yang menarik bagi masyarakat dibandingkan visi, misi calon lain. Visi, misinya Amin menciptakan masyarakat yang religius dan melanjutkan pembangunan di Sulawesi Selatan, padahal pada kenyataannya Amin

pada kepemimpinan sebelumnya dianggap belum berhasil. Kalo Azis, visi misinya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Memang pemerintahan di Sulawesi Selatan harus bersih tapi untuk sekarang ini masyarakat lebih membutuhkan pelayanan kesehatan gratis juga pendidikan gratis bagi anak-anaknya.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh bapak Hamka Naping selaku kalangan intelektual dalam melihat kemampuan Syahrul merumuskan visi misinya.

“...dan kemampuan untuk merumuskan visi, misi, pertama-tama didasari oleh kemampuan membaca tanda-tanda jaman kemudian kemampuan memproyeksikan apa yang akan terjadi di depan. Itu yang dimiliki Syahrul dan menjadikan determinan untuk memenangkan pertandingan.” (Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Sehingga jika dicermati dari figur dan kemampuan yang dimiliki Syahrul sejalan dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat etnis Makassar yang menginginkan munculnya figur yang kuat dari kalangan mereka untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur yang lalu.

6.1.2 Kebangkitan Etnis Makassar

Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan yang dianggap sebagai persaingan tiga kerajaan besar di masa lalu; Kerajaan Bone yang diwakili Amin Syam, Kerajaan Luwu yang diwakili Azis Qahhar Mudzakkar dan Kerajaan Gowa diwakili Syahrul Yasin Limpo, dapat dilihat berdasarkan perolehan suara menurut kabupaten/kota jelas terlihat pasangan Amin Syam-Mansyur Ramli yang berasal dari etnis Bugis menang mutlak di Kabupaten Bone yang merupakan daerah asalnya dan basis etnis Bugis, sementara Azis Qahhar Mudzakkar yang berasal dari Kabupaten Palopo juga meraih kemenangan mutlak didaerahnya begitupun dengan Syahrul Yasin Limpo sebagai wakil etnis Makassar mampu meraih kemenangan di daerah asalnya Kabupaten Gowa dan juga daerah basis etnis Makassar.

Apabila pengamatan dipersempit lagi persaingan antara pasangan Amin Syam-Mansyur Ramli dengan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Numang di daerah basis kedua etnis ini diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, dan Syahrul kalah dalam perolehan suara di daerah basis etnis Bugis tersebut, sebaliknya Syahrul memenangkan perolehan suara di daerah Selatan-Selatan seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bulukumba serta daerah kepulauan Selayar, yang memang merupakan daerah basis etnis Makassar.

Usaha kompetitif yang dilakukan oleh Syahrul sebagai wakil etnis Makassar dengan mempertahankan daerah basisnya untuk tidak dimenangkan oleh calon lainnya dimana Syahrul menang telak di kandangnya dapat dilihat dari perolehan suara di Kabupaten Gowa, pasangan Syahrul-Agus memperoleh suara 266.025 atau 78,54 persen, kemudian pasangan Amin-Mansyur dengan perolehan suara 46.880 atau 13,84 persen, dan Aziz Qahhar-Mubyl dengan perolehan 25.803 suara atau 7,62 persen. Sedangkan di daerah Bantaeng berdasarkan hasil perolehan suara partai pada Pemilu 2004, dari 114.477 pemilih atau 2,3 persen, 94,5 persen etnis Makassar dan etnis Bugis 2,8 persen serta oleh etnis lain. Ditunjang oleh pemilih pada Pemilu 2004 dari koalisi PAN di daerah ini sebanyak 13.059 (15 persen), PDI P 5.251 (6,0 persen), PDK 1.809 (2,0 persen) mampu mengimbangi suara Partai Golkar pada Pemilu 2004. Begitupun sebaliknya Amin Syam berusaha mempertahankan perolehan suara di daerah Bosowa (Bone, Soppeng, Wajo) yang merupakan basis inti etnis Bugis, terutama Bone dengan perolehan suara 255.801, mengalahkan perolehan suara Aziz 54.957 dan Syahrul 38.653 suara. Di Kabupaten Wajo berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilu 2004, PAN 16.302 (5,3 persen), PDK 8.005 (2,1 persen) dan PDI P 6.037 (1,5 persen) hanya mampu

meraup total suara 8,8 persen jauh di bawah perolehan suara Partai Golkar 96.607 (67,2 persen) dan PPP 6.719 (1,5 persen) dengan total suara 68,7 persen. Begitupun untuk daerah basis kedua etnis Bugis yaitu daerah Ajatappareng meliputi Barru, Sidrap, Pare-Pare, Pinrang, dan Enrekang, Amin Syam mampu menguasainya kecuali Barru, dimana Syahrul menang tipis dari perolehan suara Amin Syam. Amin Syam menang mutlak di Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu basis inti etnis Makassar.

Bentuk dukungan orang-orang Makassar dengan diadakannya sistem pemilihan langsung, dimana terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan mereka.

Pernyataan informan yang beretnis Makassar mengatakan:

“Saya yang tadinya pengurus Golkar memilih keluar ketika Pak Syahrul Sekretaris DPD Golkar karena saya tidak sefaham sama dia (Syahrul). Tapi justru ketika Pak Syahrul mencalonkan menjadi gubernur, saya memilih beliau, naluri yang kuat adalah naluri pemilih sebagai orang Makassar karena calonnya orang Makassar.” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2009).

Ketika penulis menanyakan kepada bapak Kausar, seberapa besar dukungan etnis Makassar terhadap kemenangan Syahrul dan dijawab oleh beliau bahwa begitu besar dukungan etnis Makassar terhadap kemenangan Syahrul, seperti penjelasan beliau:

“ Besar, buktinya Syahrul mampu memenangkan semua daerah Makassar kecuali Jeneponto. Itu berarti orang Makassar bersatu untuk Syahrul, sementara suara orang Bugis terbagi antara Amin Syam dan Aziz, coba lihat perolehan suaranya Amin hanya kuat di daerah Bosowa, Ajatappareng agak lemah.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Dianalisis keterkaitan terhadap kecenderungan polarisasi suara etnis Makassar terhadap partai politik khususnya Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai pendukung Syahrul dikarenakan di jazirah bagian selatan lebih banyak pemilih Islam Muhammadiyah yang masuk PAN, dan masih kuatnya loyalitas rakyat biasa kepada kalangan bangsawan yang di masa sekarang ini banyak terjun dan aktif sebagai pengurus

partai politik malah sebagai ketua DPC partai politik di daerah sehingga turut mempengaruhi suara pemilih terhadap salah satu calon. Berbeda dengan etnis Bugis yang kebanyakan masuk Partai Golkar karena Golkar mampu mendekati para kalangan bangsawan Bugis daerah bagian utara jazirah Sulawesi Selatan.

Dijelaskan pula oleh Ketua Dewan Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan juga Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin sekaligus menjabat Rektor Universitas 45 Makassar, bapak Abu Hamid yang telah banyak menulis buku tentang antropologi dan antropologi politik di Sulawesi Selatan ini menjelaskan:

“...Anggota-anggota lembaga adat memang bisa berpolitik tapi tidak bisa mempengaruhi anggota-anggota yang lain dalam lembaga adat itu. Jadi rakyat sebenarnya tidak banyak dipengaruhi oleh ketua lembaga adat di daerah karena memang dilarang, ketua lembaga adat dan pengurus-pengurusnya juga tidak ada pengurus partai tapi mereka anggota partai. Jadi antara lembaga adat dan partai ada ikatan tapi secara individual saja bukan organisasi.” (Hasil Wawancara, 27 Maret 2009)

Sehingga dengan kedudukan ketua partai dan pengurus lembaga adat akan berimbas kepada penggalangan suara dari rakyat biasa yang menjadi para pengikutnya karena kondisi di Sulawesi Selatan masih kuat hubungan patron klien antara bangsawan dan rakyatnya. Untuk daerah bagian selatan, kedudukan *Karaeng* (bangsawan) yang menduduki posisi sentral secara kultural kemudian meluas secara ekonomi dengan menjadi tuan tanah dan mempunyai banyak pekerja serta dalam kehidupan politik dengan menjadi pengurus bahkan ketua partai politik di daerah mempengaruhi dukungan masyarakat pemilih terhadap Syahrul. Dalam perubahan sistem politik di Sulawesi Selatan, munculnya partisipasi politik masyarakat Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh besarnya peranan kelas elite berpartisipasi dalam partai politik yang sangat berkaitan sebagai kelas elite yang merupakan kelas penentu yang mempunyai kemampuan untuk

menggalang massa untuk mendukung suatu partai politik. Disinilah kemampuan Syahrul yang etnis Makassar mendekati dan meyakinkan para *Karaeng* (bangsawan) di daerah Makassar dan *Puang* (bangsawan) di daerah Bugis untuk mendukungnya dalam pemilihan gubernur.

Memang pembelahan Sulawesi Selatan secara geografis membuat isu kesukuan makin menguat ditambah dengan kesenjangan perkembangan pembangunan antara daerah selatan yang mayoritas etnis Makasar dengan daerah utara yang mayoritas etnis Bugis, termasuk dominasi elite politik Bugis dalam menduduki posisi strategis di bidang politik, birokrasi, ekonomi, dan pendidikan, yang lebih disebabkan lamanya dominasi etnis Bugis pada posisi-posisi tersebut. Sehingga kedua isu ini dijadikan tuntutan elite politik etnis Makassar dalam mengungkapkan aspirasi politiknya.

Kemenangan Syahrul juga tidak lepas dari dukungan kuat elite-elite Makassar baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal dalam menggalang dukungan. Di tingkat elite lokal, penyampaian aspirasi etnis Makassar telah muncul pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, namun tidak mendapatkan perhatian malah yang terjadi adalah posisi gubernur Sulawesi Selatan di masa orde baru selalu berasal dari elite-elite dari daerah utara. Seperti penyampaian aspirasi oleh Forum Komunikasi Lintas Partai Politik Sulawesi Selatan yang mengusulkan gabungan etnis Bugis dari daerah utara dengan etnis Makassar dari daerah selatan dalam satu paket calon gubernur dan wakil gubernur dengan alasan bahwa selama ini tokoh-tokoh dari daerah selatan/Makasar kurang mendapat kesempatan. Sebenarnya wacana perekrutan elite-elite dari daerah selatan untuk menduduki posisi strategi di Sulawesi Selatan sudah lama dimunculkan dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dari daerah selatan.

Terpilihnya Syahrul sebagai Gubernur Sulawesi Selatan kali ini merupakan kali ketiga Sulawesi Selatan dipimpin etnis Makassar, setelah sebelumnya di masa orde lama, Lanto Dg Pasewang yang orang Jeneponto (Makassar) memimpin dari tahun 1953 sampai tahun 1955. Pengangkatan Lanto Dg Pasewang ketika itu mendapat reaksi keras dari etnis Bugis walaupun akhirnya bisa menerima karena pengangkatannya didasarkan alasan tingkat pendidikan etnis Makassar di daerah selatan waktu itu lebih baik dibandingkan etnis Bugis di utara. Kemudian digantikan oleh Andi Pangerang Pettarani yang masih bangsawan Bugis Makassar, namun cenderung ke Bugis karena ayahnya berasal dari etnis Bugis-Barru dan ibunya dari Makassar-Gowa karena Sulawesi Selatan menganut sistem patrilineal (garis dari ayah). Pengangkatan Andi Pangerang Pettarani bisa diterima oleh masyarakat karena campuran Bugis Makassar sehingga dianggap netral dalam mengakomodasi aspirasi etnis Bugis Makassar. Perbedaannya sekarang Syahrul terpilih menjadi gubernur berdasarkan pemilihan langsung dari masyarakat Sulawesi Selatan yang multietnis. Berarti yang determinan adalah kemampuan Syahrul membangun relasi dengan semua kalangan dan yang terpenting adalah kecerdasan, kemampuannya berorasi, dan pengalamannya di birokrasi.

6.2 Keterampilan Politik Syahrul Yasin Limpo Dalam Mendapatkan Dukungan

6.2.1 Dukungan Lintas Partai Politik

Pemilihan kepala daerah diatur melalui beberapa aturan atau regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.

Mekanisme pencalonan yang dibuat untuk mengatur tentang persyaratan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mendaftarkan pasangan calon yaitu memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Sulawesi Selatan, dan hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon

Pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pengajuan dari Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD adalah tiga pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar dan Mubyl Handaling, Amin Syam dan Mansyur Ramly, serta Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang. Aziz Qahhar Mudzakkar berpasangan dengan Mubyl Handaling didukung oleh 8 Partai Politik, yakni PPP, PBB, PARTAI MERDEKA, PSI, PPP, PPIB, PPNUI, dan PNBK yang mengantongi 15,83 persen dari total suara pada pemilu 2004. Amin Syam dan Mansyur Ramly yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, PKB, PKPI, dan PBSB mengantongi 57 persen dari total suara, sementara Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang yang didukung empat partai politik, yaitu PAN, PDK, PDIP, dan PDS dengan representasi 23 atau 33,2 persen, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.2

Peta Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Politik Yang Mengajukan
1	2
H.M. Amin Syam dan Prof.Dr.H. Mansyur Ramly	Partai Golkar 1.644.635 (43,85%) PKS 266.314 (7,10%) Partai Demokrat 99.107 (2,64%) PKB 65.751 (1,75%) PKPI 57.736 (1,54%) PBSB 14.983 (0,40%)

1	2
H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar dan Ir.H. Mubyl Handaling	PPP 240.417 (6,41%) PBB 110.235 (2,94%) Partai Merdeka 80.951 (2,16%) PSI 53.292 (1,42%) PPD 32.708 (0,87%) PPIB 24.042 (0,64%) PPNUI 28.409 (0,76%) PNBK 23.533 (0,63%)
H.Syahrul Yasin Limpo S.H, M.Si, M.H dan Ir.H. Agus Arifin Nu'mang, M.S	PAN 257.861 (6,88%) PDK 251.715 (6,71%) PDIP 184.563 (4,92%) PDS 71.445 (1,91%)

Sumber: Data hasil olahan, 2009.

Selain pencalonan ketiga pasangan tersebut, Ilhamsyah Mattalatta dan Benyamin Bura yang keduanya adalah tokoh Sulawesi Selatan yang dianggap berhasil di Jakarta didukung oleh Partai Pelopor, PNI Marhaenis, Partai Patriot, dan Partai Patriot Pancasila, diterima oleh KPU namun belum memenuhi persyaratan karena baru mengantongi 3,17 persen suara dari keempat partai politik pendukungnya. Calon independen juga muncul dalam pencalonan ini, pasangan Hasruddin dan Jamaluddin yang mendaftar di KPU namun berkasnya tidak diverifikasi dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai rekomendasi perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Pengajuan Calon Independen.⁴³

Keputusan Syahrul untuk maju sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak melalui pintu Partai Golkar tetapi justru diusung oleh PAN, PDK, PDIP, dan PDS, merupakan bentuk kemampuan Syahrul membangun jaringan yang luas tidak hanya mengandalkan Partai Golkar. Partai Amanat Nasional yang merupakan partai yang pertama kali memutuskan untuk mengusung dalam pemilihan, justru menimbulkan reaksi

⁴³ Diuraikan dalam buku "KPU Sulawesi Selatan Menepis Badai" yang dibuat KPU Sulawesi Selatan untuk mendeskripsikan kerja KPU Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Pilkada Sulawesi Selatan.

keras dari Ketua Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan, bapak Ashabul Kahfi.

“... PAN adalah partai yang pertama kali mendukung Syahrul, atas rekomendasi ketua DPP PAN...”(Hasil Wawancara, 17 Maret 2009)

Ketika penulis kembali menanyakan pertimbangan politik Partai Amanat Nasional ketika memutuskan mendukung Syahrul maju dalam pencalonan gubernur, dijawab oleh beliau berdasarkan dua pertimbangan; yakni pertimbangan objektif, dan pertimbangan subjektif, seperti yang dijelaskan oleh Ketua DPW PAN tersebut:

“Kompetensi menjadi sangat penting dalam kriteria memilih pemimpin karena pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan, kedua adalah pengalaman beliau sebagai pamong yang sangat berpengalaman mulai dari camat, kepala bagian, semua jenjang sudah pernah dia (Syahrul) lalui. Jadi dia (Syahrul) itu ahli pemerintahan yang dibutuhkan oleh kondisi Sulawesi Selatan yang kekurangan sumber daya manusia, kemudian dia itu masih muda dan cerdas. Itu pertimbangan objektifnya, tentu juga ada pertimbangan subjektifnya, apakah itu mau ditulis atau tidak. Pertimbangan subjektifnya karena dia lahir dan besar di lingkungan Muhammadiyah.”(Hasil Wawancara, 17 Maret 2009)

Pertimbangan kompetensi dari pernyataan Ketua DPW PAN ini sama dengan pertimbangan PDK untuk mendukung Syahrul, seperti yang diungkapkan bapak Andi Zainal Abidin ketika penulis menanyakan hal tersebut kepada beliau dan secara panjang lebar beliau menerangkan alasannya.

“ Memang dalam pencalonan gubernur yang lalu ada beberapa faktor, Pertama; yaitu figur, figur dalam arti kata punya kompetensi di bidang pemerintahan, artinya dia mengetahui seluk beluk pemerintahan, kemampuan manajerial, punya inovasi baru, terutama ide-ide baru dalam menjawab tantangan kedepan dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Kedua; punya kredibilitas, dia sudah teruji dalam arti kata punya pengalaman, katakanlah dari camat, bupati, dia diberi kesempatan untuk berbuat. Ketiga; komitmen, bisa dipercaya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya waktu dia bupati, saya sekondanya, waktu pembangunan Dam Bili-Bili, dia tidak mau mengorbankan masyarakat. Ya, memang banyak program-program yang ditujukan kepada masyarakat, misalnya pendidikan dan kesehatan gratis dan juga beliau saya anggap lebih hebat adalah dia punya jaringan dalam semua aspek masyarakat, baik tokoh masyarakat, agama, pemuda, masyarakat bawah, bukan hanya jaringannya yang di Gowa.

Bagaimana caranya mau diangkat jadi terpilih kalo tidak punya jaringan, dan dia tidak mengandalkan jaringan partai.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009).

Sebelumnya Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2003-2008, namun mereka hanya bisa akur selama dua tahun masa kepemimpinan, selebihnya keduanya sama-sama membangun kekuatan, berinvestasi dalam jumlah merebut simpati pemilih untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007. Persaingan antara Amin Syam dan Syahrul berlangsung selama dua tahun sebelum memasuki tahap pemilihan, yang menyebabkan roda pemerintahan di Sulawesi Selatan menjadi tidak stabil.⁴⁴

Keduanya yang sama-sama dari Partai Golkar juga masing-masing membangun kekuatan di internal Partai Golkar. Pada Januari 2007, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberi peluang supaya Syahrul tetap bisa mengikuti konvensi, bahkan Ketua DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla merekomendasikan Syahrul untuk maju dalam konvensi bersaing bersama tiga tokoh Golkar lainnya yaitu Amin Syam, Agus Arifin Numang, Moh Roem dan Prof. Dr. Mansyur Ramly yang Kepala Balitbang Depdiknas, yang bukan berasal dari internal Partai Golkar. Namun Syahrul menolak ikut konvensi Partai Golkar dengan pertimbangan jika kemudian kalah, maka memperkecil peluangnya untuk maju kembali melalui partai lainnya. Menyadari ketatnya persaingan di Golkar dengan keinginan Amin Syam selaku Ketua DPD Partai Golkar untuk maju kembali. Sehingga Syahrul sejak awal memilih partai politik lain sebagai pintunya, dengan mengikuti petunjuk dan cara Jusuf Kalla maju ke Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 yang tidak melalui pintu Golkar.⁴⁵

⁴⁴ Ilham menggambarkan ketidakakuran Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo (Tribun Timur, 9/05/2007)

⁴⁵ Syahrul mengatakan “Kalau ada yang tanya saya, mengapa tidak pakai pintu Golkar.Saya ingat persis Pak Jusuf Kalla (Ketua Umum DPP Partai Golkar)bilang sama saya, saya ikut ketua umum tidak melalui

Berbeda dengan Amin Syam yang karena pengaruhnya sangat kuat secara aklamasi ditetapkan sebagai pemenang konvensi. Dalam konvensi juga yang digadagadag adalah Agus Arifin Numang bersama Moh Roem yang disebut sebagai calon kuat untuk mendampingi Amin Syam. Menurut keterangan salah satu kader Golkar, bahwa munculnya figur Mansyur Ramly sebagai pengaman karena Agus Arifin Numang dan Moh Roem sama-sama kader Golkar. Apabila diantara keduanya maju sebagai calon wakil gubernur maka akan menimbulkan perpecahan di internal partai. Setelah melalui perdebatan panjang yang akhirnya menetapkan secara aklamasi Mansyur Ramly sebagai calon wakil gubernur mendampingi Amin Syam, dengan pertimbangan jika Amin Syam berpasangan dengan Agus Arifin Numang atau Moh Roem tidak akan menambah suara karena sama-sama kader Golkar.

Dengan tidak terpilihnya Agus Arifin Numang untuk mendampingi Amin Syam dan kemudian memilih mendampingi Syahrul Yasin Limpo. Dukungan dalam Partai Golkar menjadi terbelah disusul dengan pernyataan Wakil Sekretaris Golkar Sulawesi Selatan Chaidir Arief Karaeng Sijaya yang secara terus terang mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang. Yang terjadi kemudian secara tegas dan terang-terangan sebanyak 10 elite Partai Golkar ikut mengantarkan Pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang saat mendaftar di KPU Sulawesi Selatan. Kesepuluh orang itu terdiri dari keluarga Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang, serta beberapa elite Partai Golkar lainnya. Mereka adalah Tenri Olle (Ketua Golkar Gowa/kakak Syahrul Yasin Limpo), Ichsan Yasin Limpo (Wakil Bendahara Golkar Sulawesi Selatan/adik Syahrul), Haris Yasin Limpo (Wakil Ketua Golkar Makassar/adik

pintu Golkar tapi saya tetap Golkar. Yang ajar saya itu Pak Jusuf Kalla dan sampai mati pun saya tetap Golkar". Keengganan Syahrul tersebut diutarakan dalam sebuah wawancara Khusus (Tribun Timur, 26/8/2007).

Syahrul), Malingkai Maknun (Wakil Ketua Golkar Gowa/kerabat Syahrul), Andi Altin Noor (Anggota Dewan Penasehat Golkar Sulawesi Selatan/kerabat Syahrul), Susilo MT Harahap (Fungsionaris Golkar Sulawesi Selatan/iparnya Syahrul), Opu Sidik (Wakil Dewan Penasehat Golkar Sulawesi Selatan/kerabat Agus), Musafir Kelana (Wakil Ketua Golkar Sidrap/kerabat Agus Arifin Numang), Kallo Bandaso (Anggota Dewan Penasehat Golkar Sulawesi Selatan), dan Erwin Aksa (Wakil Bendahara Golkar Sulawesi Selatan).⁴⁶ Dukungan dari elite-elite Partai Golkar tersebut tidak lepas dari usaha Syahrul dan saudara-saudaranya membangun jaringan dengan mereka. Kehadiran mereka kemudian semakin memperuncing konflik antara Amin Syam dengan Syahrul Yasin Limpo, yang kemudian dalam rapat tertutup DPD Partai Golkar memberikan peringatan tertulis kepada mereka.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada salah seorang kader Partai Golkar, tentang kecenderungan untuk mendukung berdasarkan figur, ditanggapi oleh beliau bahwa:

“ Kita tidak lihat Pak Syahrul sebagai kader Golkar, tapi kita dia sebagai calon pemimpin yang siap untuk memimpin Sulawesi Selatan, apalagi dia itu masih muda, cerdas, mampu membangun jaringan ke semua kalangan.”(Hasil Wawancara, 14 Maret 2009)

Dari pernyataan diatas jelas bahwa dalam internal Partai Golkar sendiri terjadi poliriasasi dukungan antara anggotanya. Hal ini didasari oleh penilaian individual terhadap kapasitas Syahrul sebagai kader yang mempunyai kemampuan dalam manajerial pemerintahan dan kemampuan merangkul semua kalangan yang merupakan salah satu syarat menjalankan pembangunan di Sulawesi Selatan.

⁴⁶ Seperti yang dituturkan A. Zainal Abidin dalam buku buku “KPU Sulawesi Selatan Menepis Badai” yang dibuat KPU Sulawesi Selatan untuk mendeskripsikan kerja KPU Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Pilkada Sulawesi Selatan.

Perpecahan internal Partai Golkar tidak luput dari sikap Jusuf Kalla sebagai Ketua Golkar untuk memilih sesuai hati nurani secara tersirat memperlihatkan dukungan terhadap Syahrul yang maju dalam pemilihan sama seperti ketika Jusuf Kalla maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut bapak Kausar Bailusy, semestinya Jusuf Kalla menggerakkan mesin Partai Golkar untuk memenangkan Amin Syam sesuai hasil konvensi Partai Golkar.

Visi, misi, dan program yang ditawarkan Syahrul Yasin Limpo juga menjadi dasar partai pengusung untuk mendukung, selain perhitungan kans kemenangan dari tiap calon. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan ketika penulis menanyakan pertimbangan politik partainya untuk mendukung Syahrul Yasin Limpo.

“Dia (Syahrul) punya program yang dibutuhkan masyarakat, ada pemimpin yang bikin program untuk diri sendiri. Saya berkesimpulan Syahrul menyusun program berdasarkan karakteristik masyarakat yang kemudian dia jual sebagai program pokok. Memang PDK selalu mengatakan kita harus jual program,...”.(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Dalam rapat partai pengusung Syahrul pun muncul banyak perdebatan tentang siapa yang cocok berpasangan dengan Syahrul untuk melawan Amin Syam. Yang kemudian Syahrul mencari calon pendampingnya dari partai-partai pengusungnya. PDK juga bersikeras kadernya yang akan mendampingi Syahrul. Figur yang dianggap cocok untuk mendampingi Syahrul adalah Andi Zainal Abidin, Ketua DPK PDK Sulawesi Selatan. Namun keinginan jajaran Dewan Pengurus Provinsi PDK dalam rapat partai di tolak oleh beliau seperti yang diutarakan kepada penulis.

“...memang saya didorong, saya bilang jangan saya. Memang keputusan partai mendorong saya siapapun gubernur, kalo PDK mendukung (maksudnya calon gubernur tersebut) saya didorong, Pak Syahrul mengiyakan dan bilang sama Pak Ryaas tapi saya tidak mau, saya diam saja.” ((Hasil Wawancara, 23 Maret 2009).

Di internal PAN muncul perdebatan siapa yang akan mendampingi Syahrul. Muncul beberapa nama diantaranya Buhari Qahhar Mudzakkar adik kandung Aziz Qahhar Mudzakkar yang mendapat dukungan empat DPC PAN Se-Luwu Raya dan Yuliani Paris yang keduanya adalah kader potensial yang layak mendampingi Syahrul.

Tidak berbeda dengan PAN dan PDK, PDI P juga mengajukan kader potensialnya untuk mendampingi Syahrul, diantaranya Rachmat Endong Patompo putra mantan Walikota Makassar dan Prof.Dr. Hamka Haq Ketua DPP PDI P Bidang Kerohanian dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menyatakan kesediaannya menurut keterangan salah seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kepada penulis.

Syahrul yang semula berkeinginan menggandeng Aziz Qahhar Mudzakkar untuk berpasangan melawan kekuatan Amin Syam, ditanggapi dingin oleh Aziz yang kemudian Aziz memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Jika dilihat keinginan Syahrul ini didasarkan pertimbangan suara yang dimiliki oleh Aziz sebagai anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak kedua atas dukungan basis islamnya terutama Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang menyebar di seluruh Sulawesi Selatan dan pertimbangan Syahrul akan menguasai perolehan suara pemilih di daerah Selatan-Selatan yang berbasis etnis Makassar dan daerah Luwu Raya yang merupakan basis etnis Bugis dan Toraja untuk mengantisipasi perolehan suara Amin Syam di daerah Etnis Bugis Bosowa dan Ajatappareng. Keinginan Syahrul ini juga ditentang oleh Ketua DPK PDK Sulawesi Selatan, bapak Andi Zainal Abidin.

“Saya bicara dengan Pak Ryaas, saya juga bicara dengan Pak Syahrul setelah itu, kalo saya punya pendapat untuk di Sulawesi Selatan, kita jangan paketkan

Syahrul dengan Aziz, saya menolak, saya menolak. Aziz membawa garis pendekatan syariat Islam, karena syariat Islam di Sulawesi Selatan tidak sama dengan yang diterapkan di Aceh. Di Aceh syariat Islamnya diperjuangkan sebelum Indonesia merdeka, Qahhar Mudzakkar memperjuangkan syariat Islam bukan untuk syariat Islam tapi untuk kepentingan politiknya, bukan pribadi saya menolak Qahhar Mudzakkar dengan anak-anaknya tapi dari segi politik yang saya tolak. Saya bilang: kita harus carikan pasangan yang nasionalis, saya juga yang mendorong Pak Syahrul agar paket hanya tiga (maksudnya tiga pasangan calon), saya bilang: Aziz tidak usah dikejar-kejar, dia kelihatannya tidak mau berpasangan dengan Syahrul. Mungkin juga karena dia (Aziz) punya komitmen dengan Koalisi Keumatannya. Saya bilang sama Pak Syahrul biarkan saja Aziz maju juga, karena kalo dia (Aziz) tidak maju, suara pengikut-pengikut loyalnya Qahhar Mudzakkar yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan akan lari ke Amin Syam. Makanya kalo Aziz maju, suara akan terpecah antara Aziz dan Amin Syam.” (Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Ditambahkan pula oleh Ketua DPK PDK Sulawesi Selatan ini, pertimbangan untuk tidak memasangkan Syahrul dengan Aziz agar paket pencalonan gubernur hanya tiga yang akan memecahkan suara etnis Bugis kepada Amin Syam dan Aziz Qahhar Mudzakkar.

Kekecewaan Agus terhadap sikap Amin Syam mendapat perhatian dari PAN, PDK, dan PDI P dengan mengajak Agus mendampingi Syahrul. Setelah sebelumnya Partai pengusung ini menggodok kader-kadernya untuk mendampingi Syahrul. Keterangan diperkuat dari pernyataan Ketua PDK Sulawesi Selatan, bapak Andi Zainal Abidin.

“Saya liat Agus kecewa dengan Golkar, makanya saya dekati dia, saya bicara diruang kerja, dan dia (Agus) mau.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Sementara dukungan partai politik terhadap pasangan Ilhamsyah Mattalatta dan Benyamin Bura menimbulkan masalah di internal Partai Damai Sejahtera, karena sebagian fungsionarisnya menginginkan dukungan terhadap pasangan Ilhamsyah dan Benyamin Bura, dengan pertimbangan Benyamin Bura adalah putra daerah yang

mewakili etnis Toraja dan agama Kristen sehingga keduanya adalah representasi etnis Bugis dan Toraja dan juga representasi Islam dan Kristen, tapi sebagian menginginkan dukungan kepada pasangan Syahrul dan Agus. Terutama DPC PDS Toraja yang merupakan lumbung suara terbesar Partai Damai Sejahtera di Sulawesi Selatan yang mayoritas anggotanya adalah etnis Toraja.

Awal perpecahan internal Partai Damai Sejahtera adalah dalam rapat wilayah ditentukan dukungan kepada pasangan Syahrul-Agus, tetapi kemudian DPP PDS di Jakarta menginginkan dukungan kepada Ilhamsyah-Benyamin. Berlanjut pada pencopotan Ketua DPW PDS Sulawesi Selatan, DPP PDS mengangggap Mathius Timang melawan instruksi partainya. DPP PDS juga membekukan kepengurusan. Mathius kemudian digantikan oleh Otto de Ruiters yang ditunjuk sebagai pejabat sementara, bapak Mathius Timang menceritakan kronologis pencopotannya itu:

“Saya betul-betul mempertaruhkan jabatan saya, karena waktu itu DPP PDS di Jakarta merekomendasikan Ilhamsyah-Benyamin dengan pertimbangan Benyamin itu khan sama-sama orang Toraja, tapi saya bilang, kecil kemungkinannya untuk menang. Buat apa kita mendukung orang yang tidak mungkin bisa menang? dan jika orang yang kita dukung tidak menang dalam pemilihan ini, akan berdampak pada kepercayaan orang dan perolehan suara di pemilu mendatang. Itu pukulan berat buat Partai.”(Hasil Wawancara, 19 Maret 2009)

Lebih lanjut bapak Mathius Timang yang pensiunan dalam lingkup Dirjen Pajak dan kemudian memimpin sebuah akademi keperawatan di Makassar. Sekarang maju lagi dalam pencalonan untuk Anggota DPRD Sulawesi Selatan di daerah pemilihan Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur ini menceritakan tekanan psikologis yang dialami pasca pencopotan tersebut.

Syahrul yang memiliki pengalaman kepemimpinan dalam pemerintahan serta memiliki jaringan dan pengaruh yang luas dalam kelompok etnis/wilayah Makassar dan

organisasi kemasyarakatan terutama dalam FKPPI, AMPI, PRAMUKA, dan Muhammadiyah, dimana orangtuanya adalah purnawirawan tentara, mantan pejabat, tokoh pembina Pramuka, dan tokoh Muhammadiyah yang kesemuanya merupakan organisasi yang mempunyai banyak anggota yang tersebar di Sulawesi Selatan, sehingga dari hubungan-hubungan subjektif dari anggota organisasi-organisasi tersebut yang kebetulan juga memiliki kedudukan sebagai ketua partai atau pengurus partai mendasari alasan objektif partai untuk mendukungnya. Sementara hubungannya dengan Partai Damai Sejahtera yang beraliran Kristen lebih disebabkan kedekatannya dengan tokoh-tokoh agama Kristen karena Syahrul yang alumni Sekolah Katolik Cenderawasih masih tetap menjalin hubungan baik dengan almamater dan teman-temannya. Keuntungan itulah yang memudahkannya memasuki komunitas Kristen di Sulawesi Selatan.

6.2.2 Dukungan Lintas Etnis

Keputusan Syahrul maju dalam pencalonan gubernur didukung oleh kalangan elite etnis Makassar yang berada di Jakarta dan Makassar serta elite etnis Makassar di daerah Selatan-Selatan. Dukungan elite etnis Bugis juga datang dari ketiga ketua partai pengusung Syahrul yaitu Ketua PDIP, bapak Andi Zainal Basri Palaguna adalah bangsawan Wajo dan pernah menduduki jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di masa orde baru dari tahun 1993 sampai 2003, Ketua DPK PDK Sulawesi Selatan, bapak Andi Zainal Abidin juga bangsawan Wajo, serta Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan, bapak Ashabul Kahfi yang termasuk elite etnis Bugis. Serta dukungan Ketua PDS, bapak Mathius Timang dari etnis Toraja/Luwu.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan yang merupakan salah satu partai pengusung Syahrul Yasin Limpo dalam pemilihan yang lalu. Bapak

Andi Zainal Abidin yang merupakan salah satu elite etnis Bugis dan masih keturunan bangsawan Wajo menyatakan:

“Saya memutuskan untuk mendukung Pak Syahrul tidak melihat dia dari suku Bugis atau Makassar, yang kita dukung adalah orang punya kompetensi.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Menyangkut sikap etnis lain selain Bugis dan Makasar tentang etnisitas di Sulawesi Selatan sebenarnya tersirat dari pernyataan salah satu fungsionaris partai pengusung Syahrul Yasin Limpo, seperti yang utarakan kepada penulis yang mengatakan:

“Saya sama Pak Syahrul sudah lama berteman, pada satu kesempatan saya bilang sama beliau, kapan ini orang Makasar jadi gubernur? kenapa Bugis terus.” (Hasil Wawancara, 19 Maret 2009)

Dari pernyataan itu mengandung makna kejenuhan dari etnis lain terhadap kepemimpinan di Sulawesi Selatan yang hampir selalu dipegang oleh orang Bugis, yang berdampak pada ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan. Dimana daerah-daerah utara yang mayoritas daerah etnis Bugis, pembangunannya lebih maju daripada daerah Selatan-Selatan yang mayoritas etnis Makasar serta daerah-daerah pegunungan di ujung utara Sulawesi Selatan yang mayoritas etnis Toraja.

Dengan sistem pemilihan secara langsung merupakan angin segar bagi elite-elite etnis lain untuk bersaing secara fair untuk menduduki pucuk kepemimpinan di Sulawesi Selatan tersebut, dukungan etnis lain terhadap Syahrul merupakan alat bargaining etnis lain untuk menempatkan orang-orangnya pada posisi strategis dalam pemerintahan. Dimana pada kepemimpinan sebelumnya yang selalu dipegang oleh elite etnis Bugis berdampak menjadi dominasi elite-elite etnis Bugis dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam struktur pemerintahan, seperti pernyataan bapak Mathius Timang:

“Pak Syahrul memang melihat daerah-daerah mana yang perlu membangun dan dikembangkan terus dan kita lihat dalam hal kepegawaian, sekarang banyak dipakai orang-orang anu (Toraja) yang punya kemampuan...”(Hasil Wawancara, 19 Maret 2009)

Dari pertimbangan untuk mendukung Syahrul dari ketua partai pengusung yang notabene berasal dari etnis Bugis dan Toraja, bapak Kausar Bailusy melihatnya sebagai bagian dari kemampuan Syahrul untuk mendapat dukungan dari semua etnis dan kalangan di Sulawesi Selatan seperti pernyataan beliau berikut ini:

“Pak Syahrul mempunyai kemampuan mendekati semua kalangan, termasuk kemampuannya mendekati orang-orang Bugis untuk memilihnya.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Selain itu dukungan pemilih Tionghoa walaupun hanya 400 ribu (7,6%) dari 5,2 juta suara yang berasal dari Persatuan Pengusaha Katolik Tionghoa Sulawesi Selatan dari status sosial mayoritas adalah pengusaha yang merekrut banyak tenaga kerja memberikan dukungan kepada Syahrul tidak bisa dinisbikan, berasal dari hubungan subjektif sebagai alumni Sekolah Menengah Atas Katholik Cenderawasih dimana Syahrul sebagai salah satu alumni dan tetap menjalin hubungan yang intens dalam ikatan alumni dimana Syahrul selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah ini.

Dukungan juga berdatangan dari kalangan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Intelektual Sulawesi Selatan (KISS) yang ikut mendukung Syahrul dengan menyerukan kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk tidak memilih pemimpin yang gagal dalam Pilkada Sulawesi Selatan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hukuman dengan tidak memilih lagi penguasa puncak politik yang gagal melaksanakan amanah yang dibebankan oleh rakyat. Serta masih banyak lagi dukungan yang muncul dari kelompok kepentingan kepada Syahrul.

6.2.3 Dukungan Lintas Agama

Masyarakat Sulawesi Selatan terutama dari etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan sebagian kecil etnis Toraja adalah penganut agama Islam yang taat. Hal ini disebabkan karena agama Islam ditetapkan sebagai agama kerajaan dan penerimaan Islam menjadi agama kerajaan yang hanya butuh waktu beberapa tahun untuk menjadikannya berpengaruh kuat dalam tatanan budaya dan politik masyarakat Sulawesi Selatan sampai sekarang.

Penyebaran gerakan Muhammadiyah yang bertujuan menyebarkan dasar-dasar ajaran Islam dengan mendirikan sekolah sekolah swasta pertama kali di daerah Sengkang (Bugis) walaupun sekarang telah menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan dan malah sekarang lebih kuat di daerah selatan. Sehingga memiliki korelasi terhadap dukungan masyarakat etnis Makasar kepada Syahrul yang disebabkan oleh ikatan kesukuan dan ikatan afiliasi masyarakat daerah selatan yang mayoritas Muhammadiyah terhadap Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu partai pendukung Syahrul dalam pencalonan Gubernur Sulawesi Selatan.

Upaya etnis Bugis supaya dominasi kekuasaannya tidak tergeser oleh etnis lain diperkuat oleh kekuasaan Partai Golkar yang sangat dominan dibandingkan partai lainnya. Masyarakat bagian utara jazirah Sulawesi Selatan memilih berafiliasi dengan Partai Golkar karena kemampuan Partai Golkar untuk mendekati bangsawan-bangsawan Bugis menjadi ketua dan pengurus partai di daerah-daerah utara, ditambah lagi menggunakan agama Islam dalam menjalankan kampanye sehingga bisa diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Untuk memperkuat uraian diatas, penulis menanyakan kepada Prof. Abu Hamid. Beliau menjelaskan mengapa Partai Golkar begitu

mengakar di Sulawesi Selatan dan didominasi oleh elite-elite etnis Bugis, menurut beliau bahwa:

“Etnis Bugis Makassar beragama Islam tapi Islamnya ini memasuki semua partai yang berbau Islam tapi tidak berarti Golkar ideologinya tidak berbau Islam, tetapi ada yang sudah lama masuk Golkar dan Golkar menjalankan kampanye politik dengan memanfaatkan Agama Islam sebagai orientasinya partainya, maka orang-orang tertarik tapi pengaruh dari politik dari dulu adalah Golkar. Jadi Golkar itu karena pengaruh budayanya sejak lama, itulah yang bertahan sampai sekarang, sebagian jazirah di sebelah utara Sulawesi Selatan lebih banyak Golkar, sedangkan jazirah bagian selatan lebih banyak PAN.”(Hasil Wawancara, 27 Maret 2009).

Kebulatan dukungan dari PDS diwujudkan dengan dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan yang melakukan sosialisasi di gereja-gereja seperti yang diungkap secara hati-hati oleh salah seorang kader partai berlambang salib ini dan tidak mau namanya disebutkan. Beliau mengungkapkan besarnya dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan tersebut hampir menyamai banyaknya dukungan etnis Bugis terhadap Amin Syam.

“Makanya Pak Syahrul menang karena semua Pendeta Se-Sulawesi Selatan berjanji mendukung, kalo pendeta *mi* (sudah) bicara, menyuruh jamaah gereja, sudah pasti itu. Pak Syahrul tidak akan menang tanpa dukungan dari Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan. Memang kami maksimal sosialisasikan beliau (Syahrul) di gereja-gereja, walaupun dukungan Bugis sama Pak Amin, besar, tapi dukungan kami yang bulat sama Pak Syahrul sangat berarti.”(Hasil Wawancara, 18 Maret 2009).

Dari pernyataan dari informan yang salah satu pengurus partai tersebut, jelas dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan tersebut cukup signifikan mempengaruhi kemenangan Syahrul dalam pemilihan gubernur yang lalu. Jika dianalisis berdasarkan dukungan etnis Bugis Makassar yang beragama Islam terbagi terhadap tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, akan menyamai suara yang bulat dari

pemilih beragama Kristen kepada pasangan Syahrul-Agus. Terlebih lagi dukungan dari Partai Damai Sejahtera Toraja kepada pasangan Syahrul-Agus disosialisasikan selain melalui gereja-gereja juga melalui *kepala lembang* (kepala desa) dan sejumlah tokoh masyarakat Toraja. Untuk pemilih di Toraja sendiri sama seperti daerah-daerah Bugis Makasar lainnya, dimana status ketua dewan adat sekaligus ikut melekat status pemuka agama. Sehingga ikatan patron klien yang masih kental di masyarakat Sulawesi Selatan turut mempengaruhi afiliasi politik masyarakat terhadap partai dan calon yang didukung oleh partai politik tempatnya berafiliasi.

Untuk memperkuat uraian diatas, penulis menanyakan kepada bapak Abu Hamid selaku Ketua Dewan Adat Sulawesi Selatan, melengkapi informasi yang didapatkan penulis dari lapangan, menurut beliau:

“Kalo Toraja jelas, Partainya berbau Kristen maka mereka masuk PDS tapi di Toraja juga sudah mulai ada Islam dan Islamnya Muhammadiyah maka mereka ada yang masuk PAN. Jadi banyak juga disana orang Toraja masuk PAN tapi tidak mutlak itu, pengaruh politik dari dulu adalah Golkar.” (Hasil Wawancara, 27 Maret 2009)

Kemenangan Syahrul di Toraja yang berjumlah 138.204 suara menyamai perolehan suara Amin Syam di tiga Kabupaten di daerah Bugis/Ajatappareng. Serta jika dilihat berdasarkan perolehan suara PDS pada Pemilu 2004 di Kabupaten Toraja, PDS menempati urutan kedua setelah Partai Golkar dengan perolehan suara 29.079 atau 14,4 persen.

Sehingga dianalisis bahwa kemenangan Syahrul atas Amin Syam dan Aziz adalah kemampuan Syahrul untuk mendapatkan dukungan lintas partai politik, lintas etnis dan terutama lintas agama yang tidak mampu dilakukan oleh calon lainnya karena keterbatasan ruang lingkup jaringan yang dimiliki, seperti Amin Syam yang hanya

mengandalkan pada dukungan etnis Bugis dan Makasar yang beragama Islam dan terfokusnya dukungan terhadap Aziz dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam yang justru menjadi batu sandungan untuk bisa diterima oleh pemilih beragama Kristen terutama masyarakat Toraja. Penolakan terhadap Aziz juga datang dari Partai Damai Sejahtera yang mayoritas kadernya adalah etnis Toraja dan beragama Kristen. Aziz dianggap pernah melukai perasaan orang-orang Toraja dan Aziz membawa pendekatan Islam aliran keras dengan keinginan menegakkan Syariat Islam di Sulawesi Selatan dengan terbentuknya Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam dan dia sebagai ketuanya.

6.3 Hubungan Etnis Bugis dan Makassar Dalam Politik

Ruang kontestasi yang terbuka pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tidak lepas dari persaingan antaretnis dalam merebut superioritas, dominasi dan hegemoni. Hal ini disebabkan kemajemukan etnis di Sulawesi Selatan yang di masa orde lama dan orde baru tidak muncul kepermukaan karena berhasil diredam dengan pengangkatan gubernur oleh pemerintah pusat. Namun hal tersebut berubah dengan terbukanya persaingan antar kandidat yang menggunakan identitas dan simbol etnis dalam mendapatkan simpati dan suara sebanyak-banyaknya.

Kemajemukan etnis di Sulawesi Selatan dalam analisa politik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan, satu sisi kemajemukan etnis tersebut menjadi sumber harmoni sosial dan akulturasi politik sementara disisi yang lain dapat menjadi sumber konflik dan disintegrasi yang laten. Superioritas, dominasi dan hegemoni salah satu etnis terhadap etnis lainnya terkadang melahirkan resistensi bagi etnis yang di subordinasikan. Sehingga

proses politik terkadang bermakna persaingan antar etnis dalam merebut superioritas termasuk pemilihan kepala daerah yang di masa reformasi mengalami perubahan dengan pemilihan langsung.

Persaingan antaretnis terutama etnis Bugis dan Makassar tidak ketat disebabkan keduanya berasal dari satu keturunan dan adanya hubungan kawin campur antar kedua etnis tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Hamka Naping, dosen Antropologi Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa keterikatan etnis di daerah ini agak longgar dan mulai didasarkan oleh kesamaan kepentingan.

“Bugis-Makassar memang saudara karena Raja Bone, Raja Luwu, Raja Gowa adalah saudara karena satu keturunan sebenarnya. Namun untuk kepentingan politis yang lebih luas dengan memperlambat politik lokal itu, tapi kepentingan itu menurut saya tidak substansial dalam arti bahwa kepentingan yang substansinya, bahwa orang Makassar dan orang Bugis bisa berbeda afiliasi politiknya kalo berbeda kepentingan. Tapi sebenarnya mereka bisa bersatu, katakanlah dalam mendukung Jusuf Kalla, orang Bugis Makassar bisa bersatu karena kepentingan kewilayahan. Maksud saya, perbedaan-perbedaan afiliasi politik itu bukan sesuatu yang substansial menurut saya tapi bersifat artifisial, yang boleh diciptakan sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu. Persoalannya kemudian dalam mengarahkan orientasi politik, kepentingan apa yang dominan yang bisa jadi pemicu kearah itu.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Sikap pemilih dari etnis Bugis pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang lalu dengan tampilnya salah satu putra Makassar dan memiliki kemampuan, digambarkan informan sebagai berikut:

“ Sebenarnya sudah tidak *cocok mi* (relevan) memilih calon gubernur yang sesuku sama kita kalo tidak bisa *tonji* (juga) memimpin, biar dari suku Makassar tapi kalo mampu, itu *tommi* (saja) yang dipilih. Seperti ini Pak Amin, biar sama-sama *ka* (saya) orang Bugis tapi saya liat Pak Syahrul jauh mempunyai kapabilitas untuk memimpin Sulawesi Selatan.” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2009)

Dari pernyataan informan yang beretnis Bugis tersebut, tercermin bahwa identitas kesukuan sudah mulai memudar dalam merespon persoalan politik, walaupun tidak bisa disangkal masih ada sebagian pemilih masih memiliki identitas kesukuan.

Pengamatan terhadap sikap pemilih dari kedua etnis tersebut dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dijelaskan oleh bapak Hamka Naping:

“Kalo saya melihatnya tidak berbasis etnis tapi ada semacam emosi-emosi etnis yang mewarnai. Tapi itu juga di provokasi kandidat. Bahwa pada saat Syahrul berkampanye di daerah selatan yang dia tau beretnis Makassar yang kental, dia provokasi sentimen-sentimen etnis itu, begitu juga jika Amin berkampanye di Bone, tentu saja etnis kebugisan yang diangkat. Coba saja liat pernyataannya Amin Syam yang mengatakan “ Tidak mungkin saya dipermalukan sesamaku orang Bugis “ya khan? (*“tidak mungkin Napakasirika’ To Bone“*). Itu khan solidaritas etnis itu. Pernyataan itu adalah pernyataan etnik yang mengandung solidaritas.”(Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Berdasarkan tanggapan informan-informan tersebut menunjukkan bahwa mulai memudarnya loyalitas etnis di antara kedua etnis yang bersaing. Sentimen etnis tersebut muncul karena sengaja di bakar oleh kandidat yang ikut dalam pemilihan untuk meraup suara yang sebanyaknya. Penulis melampirkan tabel perolehan suara berdasarkan pemetaan geopolitik untuk memperjelas perolehan suara yang didasarkan pada ikatan kewilayahan/kesukuan pada pemilihan gubernur yang lalu.

Tabel 6.3

Perolehan Suara berdasarkan Pemetaan GeoPolitik

Geopolitik	Kabupaten/ Kota	Amin- Mansyur	Azis- Mubyl	Syahrul- Agus	Basis Etnis
1	2	3	4	5	6
Selatan- Selatan	Makassar	145.587	130.517	218.641	Makassar
	Gowa	46.880	25.803	266.025	Makassar
	Takalar	26.948	16.127	97.787	Makassar

1	2	3	4	5	6
	Jeneponto	82.781	9.368	76.071	Makassar
	Bantaeng	28.824	14.196	43.311	Makassar
	Bulukumba	62.385	37.742	69.006	Makassar
	Selayar	23.868	15.606	24.653	Makassar
	Maros	62.211	26.911	49.654	Makassar/ Bugis
	Pangkep	42.425	43.165	47.074	Makassar/ Bugis
Bosowa	Sinjai	58.663	26.456	20.316	Bugis
	Bone	225.801	54.957	38.653	Bugis
	Soppeng	64.661	25.200	28.260	Bugis
	Wajo	96.011	45.129	38.364	Bugis
Ajatappareng	Barru	29.481	22.772	30.531	Bugis
	Pare-Pare	24.100	15.168	13.456	Bugis
	Sidrap	59.497	24.342	43.382	Bugis
	Pinrang	70.974	47.557	37.010	Bugis
	Enrekang	42.445	21.941	18.363	Bugis/ Duri
Luwu Raya	Luwu	44.971	85.106	24.870	Bugis/ Luwu
	Luwu Timur	49.037	23.900	28.346	Bugis/ Luwu
	Luwu Utara	35.662	38.194	60.717	Bugis/ Luwu
	Palopo	17.871	27.388	19.878	Bugis/ Luwu
	Toraja	33.827	9.247	138.204	Toraja

Sumber : Data hasil olahan, 2009.

Dari hasil perolehan suara terlihat bahwa hampir di seluruh daerah Selatan-Selatan yang merupakan daerah etnis Makassar, Syahrul memenangkan suara mutlak, begitupun sebaliknya Amin Syam memimpin perolehan suara di daerah etnis Bugis terutama Bosowa (Bone, Soppeng dan Wajo). Lebih lanjut jika dicermati terjunnya Azis Qahhar Mudzakkar dalam pemilihan gubernur yang lalu cukup membagi perhatian dan dukungan dari etnis Bugis, karena dari ketiga calon gubernur tersebut, dua orang berasal dari etnis Bugis yaitu Amin Syam berasal dari Bone (Bosowa) yang merupakan daerah basis inti etnis Bugis dan Aziz Qahhar Mudzakkar yang berasal dari Palopo (Luwu

merupakan daerah Bugis Tua/asal mula kerajaan pertama di Sulawesi Selatan), sedangkan Syahrul Yasin Limpo merupakan calon satu-satunya dari etnis Makassar. Sehingga secara praktis persaingan hanya terjadi antara pasangan Amin-Mansyur dan Syahrul-Agus yang kemudian menggunakan simbol dan pendekatan etnik untuk mendapatkan simpati dan suara sebanyak-banyaknya.

Penulis melihat bahwa selama ini etnis Bugis menggunakan strategi etnik untuk menguasai Sulawesi Selatan, yang memperlihatkan Bugis mampu mendominasi etnis lainnya. Hal inilah yang digunakan oleh para kandidat dengan lebih menguatkan pendekatan etnik karena pemilih di Sulawesi Selatan masih berdasarkan terikatan emosional dan kedaerahan.

BAB VII

POLITIK IDENTITAS

7.1 Rekrutmen Jabatan Politis

(Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008)

7.1.1 Persaingan Antaretnis

Setelah kerajaan Bugis-Makassar yang punya pengaruh besar seperti Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa, dan Kerajaan Wajo tidak ada lagi dan kini menjadi daerah kabupaten/kota biasa sama seperti kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia serta dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Dalam sejarah Makassar pernah menjadi pusat pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT). Soekawati sebagai Presidennya dan Najamuddin Dg Malewa sebagai perdana menterinya. Sedangkan walikotanya adalah Abdul Hamid Dg Magasing yang memerintah dari tahun 1947 sampai 1950. Setelah Negara Indonesia Timur dibubarkan dan terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Makassar dipimpin oleh Qaimuddin kemudian seterusnya mengalami pergantian walikota, penulis melampirkan nama-nama Walikota Makasar untuk memperkuat uraian ini.

Ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Makassar sesuai Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 1971 dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkep (daerah etnis Makassar) kemudian di masa kepemimpinan H.M. Dg Patompo diganti namanya menjadi Ujung Pandang. Penggantian nama tersebut oleh banyak kalangan dinilai sebagai pengingkaran sejarah dengan mengatasnamakan pembangunan karena Makassar mencakup identifikasi suku, budaya, kerajaan dan bahasa. Berdasarkan petisi tiga budayawan Sulawesi Selatan pada tahun 1976, Prof. A. Zainal Abidin Faried, Prof. Mattulada dan Hamzah Dg Mangemba dan setelah melalui

rentan waktu yang panjang dan atas dukungan Prof. Ryaas Rasyid dan Rafiuddin Hamarung di tingkat nasional akhirnya mendapat persetujuan dikembalikan menjadi Makassar oleh Presiden B.J. Habibie dengan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1999.⁴⁷

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya heterogen dan multi etnis. Kota Makasar termasuk daerah etnis Makasar namun kedudukannya sebagai ibukota provinsi menyebabkan pluralitas masyarakat yang terdiri dari etnis Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan etnis lainnya dari seluruh Indonesia serta etnis Tionghoa dan Timur Asing. Pemetaan pemukiman tempat tinggal berbagai etnis ini walaupun hampir terjadi percampuran/pembauran di semua kecamatan, namun masih terdapat daerah-daerah yang didominasi berdasarkan etnis dan jenis pekerjaan. Etnis Makasar lebih terkonsentrasi di daerah bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa atau merupakan jalur keluar dari kota Makasar ke arah *Turatea* (daerah atas/Makasar), percampuran etnis termasuk etnis Tionghoa terdapat di daerah tengah dan barat atau daerah pusat kota sedangkan etnis Bugis, Mandar, dan Toraja lebih banyak bermukim di daerah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Maros atau jalur keluar dari Kota Makassar ke arah daerah bawah/daerah Bugis, Mandar, dan Toraja.

Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar merupakan representasi etnis Makassar, Bugis, Mandar, dan Makassar-Tionghoa. Walaupun persaingan antara etnis Bugis dan Makassar tidak terjadi secara intens tapi justru dijadikan strategi untuk memenangkan pilkada dengan memadukan dua kekuatan etnis Bugis Makasar. Dari ke tujuh pasangan calon walikota dan wakil walikota, lima pasangan mencoba menggunakan strategi pendekatan etnik ini. Pasangan yang menggunakan pendekatan etnik ini dengan

⁴⁷ Perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar seperti yang di tulis oleh H.B. Amiruddin Maula dalam buku *Demi Makassar*.

memadukan kedua etnis dalam satu paket adalah Ilham Arief Sirajuddin (incumbent) etnis Bugis Bone-Duri walaupun berpeluang mendapatkan dukungan dari etnis Makassar karena ayahnya Arief Sirajuddin pernah menjadi bupati Gowa namun tetap menggandeng Supomo Guntur sebagai representasi etnis Makasar, Supomo Guntur yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar berasal dari Kabupaten Jeneponto (daerah Turatea/Makassar). A. Idris Manggabarani yang bangsawan Bugis-Mandar, ayahnya A. Hasan Manggabarani mantan Bupati Polmas (sekarang masuk wilayah Sulawesi Barat) mempunyai 12 orang saudara kandung yang menduduki posisi-posisi penting diantaranya Komjen Yusuf Manggabarani mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan sekarang menjabat IRWASUM Polri, Achmad Manggabarani Dirjen Perkebunan Deptan RI, dan Husni Manggabarani Dirjen pada DKP RI, juga memilih berpasangan dengan Adil Patu yang berasal dari etnis Makassar. Begitu pun Halim Abdul Razak dari etnis Makassar Gowa berpasangan dengan Jafar Sodding dari etnis Bugis. Sedangkan pasangan RidwanSyahputra dan Irwan A. Paturusi keduanya berasal dari etnis Bugis.⁴⁸

. Tiga pasangan calon independen juga menggunakan strategi yang sama, yakni pasangan Firmansyah Mappasawang dan Kasma Amin, Iriantasyah Kasim dan Razak DJalle, serta Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko. Ilham Alim Bachrie yang berpasangan dengan Herman Handoko yang etnis Makasar-Tionghoa, masih mempunyai hubungan keluarga (sepupu satu kali) dengan Supomo Guntur, seperti penuturan bapak Kausar berikut ini:

“Persaingan etnis masih ada di pilkot Makasar, iya ada karena ada juga calon Makasar lain. Itu yang anaknya mantan Bupati Majene, yang sepupunya Supomo (*Wakil Walikota Terpilih*), siapa lagi namanya. oh, Ilham Alim Bachri.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009).

⁴⁸ Diolah dari Visi, Misi dan Program Calon Walikota & Wakil Walikota Makassar Tahun 2008

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dimenangkan oleh pasangan Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur, lebih merupakan perpaduan kedua kekuatan etnis Bugis Makasar. Ilham yang berasal dari Bugis mewakili kekuasaan dan luasnya jaringan kekerabatan orang-orang Bugis di Makasar yang sejak dahulu mendominasi mulai dari perdagangan maupun jenjang pemerintahan di Kota Makasar sejak sebelum kemerdekaan. Supomo Guntur yang mewakili etnis Makassar Jeneponto juga tidak kalah hubungan kekerabatan dan solidaritas etnisnya. Hampir di seluruh Sulawesi Selatan terutama di Kota Makassar, orang Jeneponto menetap, dan mencari nafkah.

Untuk memperkuat uraian diatas, penulis menanyakan kepada salah satu tim pemenang Ilham-Supomo, mengenai pertimbangan Ilham dan Supomo dipasangkan dalam satu paket, berikut penjelasan beliau:

“Pak Ilham menggandeng Pak Supomo sebagai representasi orang Makassar, karena 200 ribu pemilih semua orang Jeneponto. Jadi kebanyakan pemilih di Makassar adalah orang Jeneponto yang banyak berprofesi sebagai tukang becak, sopir dan lain-lain. Sehingga Pak Ilham menggandeng Pak Supomo. Pak Ilham sendiri walaupun besar di Gowa waktu ayahnya Bupati Gowa, tapi Pak Ilham orang Bugis Bone-Duri sehingga memang pas jika bergandengan dengan Pak Supomo yang orang Makassar.”(Hasil Wawancara, 16 Maret 2009).

Penjelasan dari informan kami diperkuat oleh penjelasan bapak Kausar Bailusy bahwa kemenangan Ilham dipengaruhi oleh dukungan orang-orang Makasar kepada Supomo Guntur selain kekuatan Ilham di Partai Golkar dan jaringan luas yang dimilikinya, termasuk kedudukannya sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM Makasar), beliau menuturkan:

“Ilham-Supomo itu memang kita lihat bahwa itu pasangan Bugis-Makassar begitu khan? pasangan Bugis Makassar itu menjadikan Ilham menang, tapi Ilham menang telak karena pertama, Ilham punya basic di Partai Golkar dan kuat di

dukung oleh orang-orang Makasar yang memilih Supomo.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Ketika penulis menanyakan alasan Ilham yang etnis Bugis menggandeng Supomo yang Makassar. Beliau melanjutkan bahwa pertimbangan Ilham berpasangan dengan Supomo dalam satu paket sebagai representasi Bugis Makassar.

“Iya, representasi orang Makasar khan? karena di Kota Makasar banyak etnis Makasar terutama orang Jeneponto. Supomo itu khan orang Jeneponto.”(Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Berbeda pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2004 sebelumnya yang sistem pemilihannya dilakukan oleh anggota DPRD Kota Makasar. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2008 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, memang tetap membutuhkan strategi memadukan kedua etnis dalam satu paket untuk mendapatkan suara dan dukungan dari semua kalangan.

Adapun Ilham dan Herry yang sebelumnya bersama-sama membangun Kota Makassar menggantikan H.B. Amiruddin Maula dan Syamsul Rijal. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar tahun 2004, Ilham yang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maju berpasangan dengan Andi Herry Iskandar, yang waktu itu adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Makassar.

Usaha putra daerah Makasar untuk kembali memimpin Makassar seperti yang dilakukan oleh Halim Razak, Firmansyah Mappasawang, Ilham Alim Bachrie mendapat tantangan dari usaha etnis Bugis untuk mempertahankan dominasi. Penulis menanyakan tentang pergantian tersebut dilihat dari perspektif politis dan antropologis. Dijelaskan oleh bapak Kausar:

“Sebenarnya pasangan Ilham-Herry yang Bugis-Bugis dan ketika pemilihan Ilham mencalonkan diri kemudian secara struktural digantikan oleh wakilnya yang Bugis

itu berarti Bugis tidak mau melepaskan itu. Nah, Ilham maju kembali karena kapan Ilham mengundurkan diri atau tidak maju kembali maka Makassar yang akan muncul di permukaan. Karena sebenarnya strategi itu yang dijalankan oleh orang Makassar, bagaimana bisa memimpin Kota Makassar.”(Hasil Wawancara, 13 Maret 2009).

Sama seperti penjelasan Bapak Kausar ketika penulis menanyakan tentang perubahan paket Bugis-Bugis (Ilham Arief Sirajuddin-Herry Iskandar) yang tidak bisa berpasangan kembali karena alasan kesehatan Andi Herry yang tidak bisa lagi untuk mendampingi Ilham dan memilih untuk mendukung Ilham maju kembali dengan berpasangan dengan Supomo. Ketika Ilham mengambil cuti untuk maju mencalonkan diri dalam pemilihan walikota, maka Andi Herry yang menggantikan menjabat Walikota Makassar sampai pada pelantikan Ilham-Supomo sebagai walikota dan wakil walikota terpilih pada bulan Mei 2009.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar merupakan ajang perebutan kekuasaan dan pengaruh antara etnis Bugis Makassar setelah level provinsi. Alasannya karena; Pertama, Prestise memimpin Makassar sebagai ibukota provinsi, Kedua, Makasar adalah wilayah percampuran banyak etnis, Ketiga, Makasar bagi putra daerah Makassar adalah bagian dari wilayah etnis Makasar. Sehingga tingkat persaingannya lebih besar dibandingkan kabupaten-kabupaten yang penduduknya homogen, misalnya Kabupaten Bone yang beretnis Bugis atau Gowa yang beretnis Makassar sehingga persaingan hanya terjadi antara putra daerah sendiri tanpa saingan dari orang-orang dari etnis lain.

7.1.2 Persaingan Partai Politik Pengusung

Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kota Makassar dalam kurun waktu yang tidak lama melakukan pemilihan kepala daerah. Sebelumnya Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 5 November 2007, kemudian beralih ke Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tanggal 29 November 2008. Pada pemilihan walikota dan wakil walikota kali ini muncul beberapa figur pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai politik. Partai politik dibutuhkan sebagai organisasi formal yang memiliki kewenangan mengusulkan bakal calon walikota dan wakil walikota.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar terdapat tujuh pasangan calon yang empat pasangan diantaranya diajukan oleh koalisi partai politik sementara tiga pasangan calon independen. Keempat pasangan yang diajukan oleh koalisi partai politik yang duduk di parlemen (DPRD) dan partai politik non parlemen, adalah pasangan Halim Abdul Razak dan Jafar Sodding yang diajukan oleh Partai Merdeka, PNBK, PKS, PNI-M, PSI, pasangan Idris Manggabarani dan Adil Patu diajukan oleh PDK dan Partai Demokrat, pasangan Ridwan Syahputra Musagani dan Idrus A.Paturusi diajukan oleh PPP dan PAN, dan pasangan Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur diajukan oleh Partai Golkar, PDIP, PBB, PDS, PPD, dan PBR. Sementara pasangan calon independen adalah Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko, Iriantasyah Kasim DM dan Abd. Razak Djalle, serta Firmansyah Mappasawang dan Kasma F. Amin. Untuk lebih jelas terdapat pada peta dukungan partai politik terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berikut ini.

Tabel 7

**Peta Dukungan Partai Politik Terhadap
Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar**

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Yang Mengajukan
1	2
1. Halim Abdul Razak dan Jafar Sodding	P. Merdeka, PNBK, PKS, PNI-M, PSI
2. Idris Manggabarani dan Adil Patu	PDK, P. Demokrat
3. Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko	Perseorangan
4. Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur	P GOLKAR, PDIP, PBB, PDS, PPD, PBR
5. Iriantasyah Kasim DM dan Abd. Razak Djalle	Perseorangan
6. Firmansyang Mappasawang dan & Kasma F. Amin	Perseorangan
7. Ridwan Syahputra Musagani dan Idrus A. Paturusi	PPP dan PAN

Sumber: KPU Kota Makassar

Setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang baru, walaupun Syahrul secara tegas belum menentukan dukungan kepada salah satu calon namun dijadikan momen bagi calon walikota untuk mendapatkan dukungan. Adil Patu yang menjabat sebagai Ketua DPK PDK adalah salah satu partai pendukung Syahrul pada pemilihan gubernur yang lalu sekaligus tim pemenangan, berpasangan dengan Idris Manggabarani yang didukung Partai Demokrat. Walaupun sempat ditolak oleh sebagian kader PDK. Berbeda pada pemilihan gubernur, pada Pemilihan Walikota Makassar, PKS tidak berkoalisi dengan Partai Golkar malah mencalonkan kadernya Jafar Sodding dengan Halim Abdul Razak dengan dukungan koalisi Partai Merdeka, PNBK, PKS, PNI-M, dan PSI. Sementara koalisi partai Islam lebih memilih mendukung Ridwan Syahputra dan Idrus Paturusi daripada berkoalisi dengan PKS. Dari partai yang memiliki kursi di DPRD Makasar yakni Partai Golkar dan PDIP ditambah partai non parlemen seperti PBR, PDS,

PPD, PBB dengan total 56,4 persen suara memilih memberikan dukungan kepada Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur.⁴⁹

Ilham dan Supomo didukung oleh Partai Golkar dimana Ilham menduduki jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar dan Supomo adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, terdorong oleh kekalahan Partai Golkar untuk memenangkan Amin Syam pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Sehingga Partai Golkar Makassar dari seluruh DPP, DPD, dan Korwil berusaha keras untuk memenangkan Ilham pada pemilihan ini sebagai pendorong kesuksesan Partai Golkar pada Pemilu 2009.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang usaha yang dilakukan tim pemenangan Partai Golkar untuk mendukung Ilham-Supomo, informan yang merupakan pengurus Partai Golkar dan memiliki andil yang cukup besar dalam pemenangan Ilham-Supomo ini menjelaskan:

“Memang kita usahakan supaya Pak Ilham bisa *oppo* (incumbent), semua kader berusaha semaksimal mungkin. Dukungan saya sama Pak Ilham selain materi, juga bagaimana caranya mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pak Ilham dalam pemilihan.” (Hasil Wawancara, Maret 2009)

Dari penjelasan salah satu kader Partai Golkar diatas, jelas bagaimana usaha mesin partai untuk memenangkan calonnya setelah kekalahan Amin Syam pada pemilihan gubernur. Dari tujuh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, persaingan sengit justru terjadi antara pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur dengan pasangan Idris Manggabarani-Adil Patu. Untuk memperkuat uraian diatas, penulis mendapatkan penjelasan dari bapak Kausar Bailusy bagaimana persaingan yang terjadi antara Adil Patu dan Ilham:

⁴⁹ Diolah dari Klipping Berita Tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2008.

“Salah satu walikota dan kader Golkar yang secara terang-terangan mendukung Amin Syam pada pemilihan gubernur adalah Ilham, sedangkan Adil Patu sebagai juru bicara Fraksi PDK adalah orang yang pertama kali mengkritik tajam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Amin Syam pada sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan, suasana panas berlanjut sampai pada pemilihan gubernur dan kemudian bertemu kembali sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Jadi rentan waktu yang dekat antara pemilihan gubernur dan pemilihan walikota sebagai salah satu penyebabnya panasnya suasana politik antara partai-partai pendukung calon. Persaingan yang terjadi sebagai kelanjutan dari pemilihan gubernur Sulawesi Selatan sebelumnya, dimana Ilham Arief Sirajuddin adalah pendukung Amin Syam dari Partai Golkar sedangkan Adil Patu yang Ketua PDK Makasar adalah tim pemenangan Syahrul. Namun kemenangan Ilham Arief Sirajuddin hampir sama dengan kemenangan Syahrul yang lebih disebabkan figur dan jaringan yang luas yang dibangun oleh Ilham melalui proses panjang dalam kariernya. Sehingga dukungan yang diberikan partai pengusung sejalan dengan dukungan di luar partai politik.

7.2 Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Honorer

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) era otonomi daerah ini banyak menimbulkan salah persepsi dari pemerintah daerah sehingga hampir setiap penerimaan CPNS menimbulkan masalah tersendiri. Pun pada penerimaan CPNS di Sulawesi Selatan. Namun untuk penerimaan CPNS dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak memasuki era reformasi tidak banyak mengalami masalah yang berarti karena proses rekrutmennya menggunakan sistem merit, berdasarkan persyaratan administrasi dan melalui tahap penyeleksian yang transparan dengan mengikutsertakan perguruan tinggi melakukan pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan skoring nilai, serta

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memantau pelaksanaan dan transparansi pelaksanaan penerimaan CPNS tiap tahunnya. Pada tahun-tahun sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempercayakan pemeriksaan lembar jawaban komputer dan skoring nilai kepada Lembaga Administrasi Negara Makassar, dan penerimaan CPNS tahun 2008 diserahkan pemeriksaannya kepada Universitas Hasanuddin. Penerimaan CPNS tahun 2008 merupakan tahun pertama dalam masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang. Untuk tahun 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat kuota 541 tenaga honorer dan 80 CPNS kelompok umum, total kuota yang didapat adalah 641 CPNS umum yang akan direkrut untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Tenaga kesehatan yang akan direkrut sebanyak 30-an orang dan tenaga teknis sebanyak 50-an orang. Dengan semakin berkurangnya jumlah tenaga pegawai tidak tetap dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah CPNS umum semakin bertambah dari jumlah tahun sebelumnya.

Memang untuk penerimaan CPNS di kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tapi tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi dalam pelaksanaannya terjadi kesalahpahaman tentang otonomi daerah oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kepentingan dalam penerimaan CPNS di daerah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kausar berikut:

“Justru CPNS juga masih luar biasa karena semua orang mengandalkan etnisnya maka selalu bermasalah setiap penerimaan CPNS selalu bermasalah karena ada kepentingan.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009)

Beliau melanjutkan bagaimana ketatnya persaingan yang terjadi setiap penerimaan CPNS di Sulawesi Selatan. Sehingga usaha yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilaksanakan pula oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tingkat kabupaten/kota.

“Lihat saja tiap penerimaan CPNS selalu ribut karena mereka merasa putra daerah situ jadi mereka yang harus diterima menjadi CPNS, sampai-sampai kalo ada dari peserta dari daerah lain yang lulus mereka protes.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009).

Prof. Hamka Naping melihat penerimaan CPNS ini sebagai persaingan berdasarkan kepentingan dan kesalahan persepsi mengenai otonomi daerah, seperti penjelasan beliau:

“Itu persoalannya karena ini pada level yang paling bawah, lebih kepada kepentingan. Kepentingan untuk memberi job kepada orang, lebih kepada basic need khan begitu? Menurut saya lebih kepada kebutuhan-kebutuhan dasar, kalo yang pada tingkatan eselon ke atas sampai pada akses ke Jakarta sudah pada sosial need dan aktualisasi diri dan itu bisa terkait dengan etnik... Semua itu adalah otonomi yang kebablasan, artinya tidak memahami dan menangkap secara substansial otonomi daerah. Bagaimana mendekati pelayanan masyarakat dan bagaimana pemerintah daerah berimprovisasi mengembangkan daerahnya sesuai potensi yang dimiliki daerahnya. Sebenarnya esensinya itu tidak terkait dengan putra daerah yang menjadi pejabat. Tapi khan ada kesalahan persepsi, memang kapasitas diri kita belum maksimal, kita belum bisa bersaing bebas, kita belum pada penilaian objektif tapi masih melihat anaknya siap ini, keluarganya siapa ini.” (Hasil Wawancara, 23 Maret 2009)

Penerimaan CPNS di tingkat kabupaten memang masih mengalami banyak masalah yang disebabkan sistem rekrutmennya berdasarkan sistem kekerabatan dan kepentingan. Apalagi jika penerimaan CPNS daerah tersebut dilakukan setelah pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga penerimaan CPNS sarat dengan “Penerimaan Balas Budi” kepada tim sukses dan kerabat pejabat terpilih. Yang terjadi di salah satu

kabupaten, yang diterima jadi pegawai adalah keluarga dan kerabat bupati terpilih, malah salah satu kerabat bupati tersebut sejak pengangkatan CPNS belum pernah menjalankan tugas sebagaimana pegawai lainnya karena masih kuliah, dan anggota DPRD setempat berkesempatan meloloskan istri atau saudaranya masuk jadi pegawai menggunakan posisinya di DPRD kabupaten/kota. Walaupun penerimaan CPNS berdasarkan sistem kekerabatan namun tidak menjadi ajang persaingan antaretnis karena tiap daerah yang membuka pendaftaran CPNS merekrut putra daerah sendiri. Dengan adanya persyaratan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah tempat mendaftar menyulitkan bagi calon pendaftar dari daerah lain ikut mendaftar di daerah tersebut dan persyaratan administrasi lainnya. Sehingga tidak memungkinkan pendaftar dari daerah Turatea (daerah selatan / Makassar) mendaftar CPNS di daerah bawah (daerah utara/Bugis) atau sebaliknya. Berbeda dengan sistem penerimaan CPNS Pemerintah Kota Makassar yang transparan dan dilaksanakan berdasarkan Juklak dan Juknis sebagai acuan, serta melibatkan Lembaga Administrasi Negara dalam pemeriksaan lembar jawaban dan hasil penilaian sehingga penerimaan CPNS tidak menimbulkan masalah dan justru menjadi ajang persaingan secara fair bagi semua pendaftar untuk mengadu keberuntungan.

Untuk penerimaan CPNS dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta diserahkan kepada Panitia Pemeriksa LJK CPNS Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Prof. Mappadjandji Amin untuk melakukan pemeriksaan dan scoring nilai ujian yang dilakukan di Unhas dengan menggunakan mesin scan, sehingga hasil skoringnya tidak bisa diubah kemudian Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengumumkan. Proses rekrutmen CPNS dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2008 sama seperti penerimaan sebelum-sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan tetap berdasarkan petunjuk teknis dan berdasarkan formasi yang didapatkan daerah tiap tahun dari Badan Kepegawaian Negara. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan yang baru, Andi Murni Amin Situru secara tegas dan tetap berhati-hati dalam menjalankan tugasnya seperti yang dituturkan oleh informan kami, pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

“Puang⁵⁰ sangat tegas dan berhati-hati dalam penerimaan pegawai, malah dibuka layanan info kalau ada pegawai yang coba-coba jadi calo atau joki akan dipecat.” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2009)

Dengan diserahkannya pemeriksaan lembar jawaban peserta kepada panitia dari Unhas, sebagai usaha pemerintah provinsi untuk mengurangi resiko banyaknya masalah/transparansi dan protes atas penerimaan CPNS, seperti yang terjadi di kabupaten/kota lain. Apalagi penerimaan CPNS dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nilai prestisenya lebih tinggi, sehingga bagi menjadi ajang persaingan pejabat-pejabat untuk memasukkan keluarga dan kerabatnya. Sehingga transparansi penerimaan CPNS salah satunya untuk meminimalisir kejadian itu. Buktinya anak pejabat yang ikut seleksi pun ada yang tidak lulus diantaranya Andi Rio Perdana anak Andi Muallim (Sekretaris Daerah) dan Andi Ansyari anak Andi Azikin Mangkona (Kepala Badan Pengawasan Daerah). Sehingga persaingan antaretnis dalam penerimaan CPNS menjadi terbuka dan makin intens, tapi dilakukan secara fair tanpa menggunakan jalur kekeluargaan dan kekerabatan seperti yang terjadi di masa orde baru.

Agak berbeda dengan penerimaan CPNS yang berdasarkan proses seleksi yang ketat dan transparan, penerimaan tenaga honorer tidak berdasarkan sistem merit tapi lebih

⁵⁰ Maksudnya Andi Murni. Sebutan/Panggilan kepada orang dari kalangan bangsawan/Andi, dan tetap dipakai dalam pelaksanaan hubungan formal di kantor pemerintah.

berdasarkan kebutuhan pegawai di tiap unit kerja yang lebih berdasarkan kepentingan orang-orang tertentu agar keluarga atau kerabatnya bisa diterima. Apalagi dengan adanya aturan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS semakin membuka peluang bagi pejabat atau orang-orang dalam lingkup pemerintahan dari level provinsi sampai level kecamatan untuk memasukkan keluarga, kerabat atau teman menjadi tenaga kontrak yang pembiayaan gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahkan menjadi tenaga sukarela walaupun tidak mendapatkan gaji tetap.

Akan tetapi proses pengangkatan dari tenaga honorer daerah menjadi CPNS melalui proses yang sudah diatur dalam Juklak dan Juknis pengangkatan CPNS dari tenaga honorer. Syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah telah mengabdikan pada instansi tersebut minimal dua tahun, telah masuk data base tenaga honorer yang akan diangkat CPNS, berdasarkan formasi penerimaan tiap tahun penerimaan yang diterima dari Badan Kepegawaian Negara dan diangkat berurutan berdasarkan lamanya masa mengabdikan, umur, dan jurusan pendidikan/bidang keahlian yang akan diterima sesuai formasi pengangkatan CPNS dari tenaga honorer.

Untuk memperjelas penulis menanyakan kepada salah satu tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS karena masa mengabdikannya belum memenuhi syarat untuk diangkat jadi CPNS, berikut penuturan informan kami:

“Saya dulu dikasi masuk sama omku yang kerja di sini tapi untuk tahun ini belum bisa terangkat karena pengangkatan CPNS diurut dari umurnya, lamanya bekerja sama ada formasi jurusannya tahun ini. Jadi yang lebih dulu masuk dan umurnya lebih tua yang diangkat duluan.” (Hasil Wawancara, 12 Maret 2009).

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS seperti penerimaan CPNS namun harus memenuhi persyaratan umur, masa mengabdikan, formasi berdasarkan kebutuhan keahlian tiap tahun penerimaan. Sehingga bagi tenaga kontrak yang berumur diatas umur 35 tahun atau pensiunan PNS yang dipekerjakan kembali, tidak bisa lagi dimasukkan dalam data base tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS.

Bapak Kausar justru melihat efektifitas penggunaan tenaga kontrak dibandingkan penerimaan CPNS dengan pertimbangan tidak akan membebani negara tapi penilaian berdasarkan pekerjaan karena perjanjian kontrak kerjanya setiap tahun dan akan diperpanjang lagi jika masih dibutuhkan dan melaksanakan kerja sesuai isi perjanjian kontrak.

“Kalo kita mau jujur penggunaan tenaga kontrak lebih bagus karena PNS tidak bisa dipecat kalo tidak kerja. Begitu juga penerimaan tenaga kontrak yang karena ada keluarganya atau kerabatnya yang kepala di dalam yang bisa memasukkan mereka menjadi tenaga kontrak. Tapi sekarang tenaga kontrak ada yang profesional dan tradisional, tapi yang tradisional yang cepat diangkat jadi CPNS.” (Hasil Wawancara, 13 Maret 2009).

Namun kenyataannya tidak sesuai dengan efektifitas penggunaan tenaga kontrak karena justru dijadikan peluang bagi pejabat atau orang-orang yang mempunyai relasi dan akses terhadap orang-orang yang berkompeten dalam penerimaan tenaga sukarela dan tenaga kontrak.

Penerimaan tenaga kontrak dan sukarela dalam pemerintahan dari level pemerintah provinsi sampai level kabupaten/kota yang justru menarik untuk dianalisis karena tidak berdasarkan sistem rasional/merit tapi lebih berdasarkan sistem kekerabatan/spoil. Hal itu disebabkan tidak adanya kesamaan aturan tentang penerimaan tenaga sukarela dan kontrak, sehingga disesuaikan oleh kebutuhan tiap pemerintah daerah masing-masing. Peluang inilah yang digunakan oleh pejabat atau orang-orang yang

mempunyai akses untuk meloloskan keluarga, kerabat atau teman menjadi tenaga sukarela dan tenaga kontrak dengan harapan akan masuk data tenaga honorer yang mempunyai peluang untuk diangkat menjadi CPNS. Tapi dengan melihat jumlah pejabat mulai eselon dua sampai eselon empat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih didominasi etnis Bugis terutama jabatan-jabatan tertentu yang dianggap strategis, sehingga peluang etnis Bugis untuk mendominasi penerimaan tenaga sukarela, tenaga kontrak sampai pengangkatan CPNS melalui jalur penerimaan tenaga honorer masih besar dibandingkan etnis Makassar, Toraja dan Mandar. Apalagi etnis Mandar yang dalam pemerintahan sebelum reformasi kurang mendapat perhatian untuk menduduki jabatan eselon, dan lebih memilih pulang kampung setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Pejabat atau mantan pejabat yang kurang merasa diperhatikan lebih banyak memilih pulang kampung setelah pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VIII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

8.1 Simpulan

Strategi etnik yang digunakan oleh etnis Bugis agar posisinya tidak tergeserkan dalam struktur politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan, mengakibatkan dominasi etnis Bugis dalam posisi politis dan jabatan-jabatan strategis dalam proses pengambilan keputusan berimplikasi pada kebijakan di pembangunan di Sulawesi Selatan. Sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antara daerah-daerah selatan yang mayoritas etnis Makassar yang jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah utara yang mayoritas etnis Bugis, serta menimbulkan kecemburuan sosial dan politik masyarakat daerah selatan/etnis Makassar.

Tuntutan etnis Makassar agar wakil mereka dipertimbangkan untuk menduduki posisi-posisi politis dan jabatan-jabatan strategis, termasuk untuk menduduki posisi gubernur dan wakil gubernur di masa orde baru tidak diperhitungkan. Hal ini disebabkan sistem pengangkatan pejabat politis di masa orde lama dan orde baru ditentukan oleh pemerintah pusat. Pertama, kedekatan elite-elite etnis Bugis di tingkat nasional dengan pemerintah pusat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pengangkatan pejabat politis di Sulawesi Selatan, termasuk kedekatan dengan tokoh dari Sulawesi Selatan, Prof. Baharuddin Jusuf Habibie yang merupakan elite politik nasional. Kedua, pergantian gubernur selalu berasal dari kalangan militer untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan menempatkan kepala daerah dari kalangan militer. Dari empat pejabat Gubernur Sulawesi Selatan di masa orde baru, tiga diantaranya berasal dari militer, yakni Ahmad Lamo, Andi Oddang dan Z.B. Palaguna,

sedangkan pengangkatan Ahmad Amiruddin yang berasal dari sipil berdasarkan pertimbangan kesuksesannya memimpin Universitas Hasanuddin. Prof.Dr. A. Amiruddin yang doktor Atom pernah menjabat sebagai Dekan fakultas Kimia dan Biologi ITB dan Deputi Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional, dan terakhir sukses memimpin Universitas Hasanuddin. Kemudian diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan atas rekomendasi Jenderal (Purn) M.Yusuf dan B.J. Habibie.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari empat etnis asli, yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, memunculkan persaingan berdasarkan kepentingan kesukuan/kewilayahan. Namun persaingan intens hanya terjadi antara etnis Bugis dan etnis Makassar yang sejak dahulu mempunyai konflik laten, yang di masa orde baru tidak muncul di permukaan karena berhasil diredam oleh pemerintah pusat dengan sistem pengangkatan pejabat politis oleh pemerintah pusat. Runtuhnya pemerintahan otoriter orde baru yang sentralistik tahun 1998 menimbulkan gelombang reformasi yang menuntut mengadakan pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat masing-masing daerah mengikuti sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Reformasi orde baru dengan diadakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung untuk pertamakalinya dilaksanakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, momen terpilihnya Syahrul Yasin Limpo dari etnis Makassar untuk memimpin Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan menggantikan Amin Syam yang etnis Bugis.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, pengajuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui pengajuan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD adalah tiga pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar dan

Mubyl Handaling, Amin Syam dan Mansyur Ramly, serta Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang. Aziz Qahhar Mudzakkar berpasangan dengan Mubyl Handaling didukung oleh 8 Partai Politik, yakni PPP, PBB, PARTAI MERDEKA, PSI, PPP, PPIB, PPNUI, dan PNBK yang mengantongi 15,83 persen dari total suara pada pemilu 2004. Amin Syam dan Mansyur Ramly yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, PKB, PKPI, dan PBSB mengantongi 57 persen dari total suara, sementara Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang yang didukung empat partai politik, yaitu PAN, PDK, PDIP, dan PDS dengan representasi 23 atau 33,2 persen. Namun persaingan intens hanya terjadi antara pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly dengan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Numang karena sebelumnya Amin Syam dan Syahrul adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2003-2008, tapi hanya mampu sejalan selama dua tahun, selebihnya selama tiga tahun masing-masing membangun jaringan politik untuk kembali maju dalam pemilihan gubernur sebagai saingan.

Ditubuh Partai Golkar sendiri, Amin Syam, Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang adalah elite partai. Namun melalui konvensi Amin Syam terpilih secara aklamasi untuk mendapat dukungan dalam pencalonan. Syahrul lebih memilih melalui pintu partai PAN, PDIP, PDK, dan PDS maju dalam pencalonan, sementara Agus yang kecewa atas keputusan Amin Syam yang berpasangan dengan Mansyur Ramly mendapat tawaran dari koalisi PAN, PDK, PDIP, untuk mendampingi Syahrul. Dengan kondisi tiga kader Partai Golkar yang maju dalam pencalonan, walaupun Syahrul dan Agus didukung partai lain menimbulkan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar, memunculkan polarisasi berdasarkan kepentingan kesukuan/kewilayahan dan kepentingan ekonomi partai terbukti ketika Syahrul dan Agus mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan diantar

oleh 10 orang elite partai yang terdiri dari keluarga dan kerabat keduanya. Pertumbuhan Partai Golkar di Sulawesi Selatan sebagai salah satu Lumbung Partai Golkar lebih disebabkan kemampuan menyesuaikan diri dengan politik lokal dan kultur masyarakat dengan sistem kekerabatan dan kepanutan (patron klien) yang sangat kental, khususnya dikalangan bangsawan. Sehingga faktor ketokohan dan pengaruh yang dimiliki kader-kader tua memperlambat proses regenerasi. Tampilnya Partai Golkar sebagai partai besar yang melahirkan kader-kader potensial kemudian menjadi bumerang untuk mengusulkan calon tunggal partai dalam pilkada.

Rekonstruksi politik etnis Makassar terjadi dengan munculnya figur Syahrul sebagai satu-satunya calon dari etnis Makassar mampu menyatukan dukungan etnis Makassar dan memecahkan dukungan dari elite dan masyarakat etnis Bugis terhadap pasangan Amin Syam dan pasangan Aziz Qahhar Muzakkar. Syahrul mampu menyakinkan semua kalangan dengan pengalaman kepemimpinan dalam pemerintahan yang dimiliki serta memiliki jaringan dan pengaruh yang luas pada etnis Makassar, termasuk etnis Bugis dan Toraja untuk mendukungnya. Kemenangan Syahrul yang didukung ketua dan pengurus partai PAN, PDK, PDIP yang merupakan elite etnis Bugis (bangsawan, mantan gubernur, tokoh Muhammadiyah) menandakan konstelasi politik di Sulawesi Selatan masih didominasi etnis Bugis, sebab dukungan yang diberikan kepada Syahrul berdasarkan kesamaan kepentingan yang tidak terakomodasi pada kepemimpinan Amin Syam. Walaupun gubernur dipegang oleh etnis Makassar namun elite-elite etnis Bugis masih mendominasi posisi dan jabatan strategis baik dalam pemerintahan maupun dalam partai politik dan DPRD.

Ketokohan dan kompetensi yang dimiliki Syahrul dalam melihat masalah yang dihadapi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan kemudian dijual menjadi visi, misi, dan program menjadi faktor yang determinan dalam memenangkan pemilihan gubernur. Selain itu Syahrul juga menggunakan pendekatan: Pertama, Partai Golkar yang didukung oleh saudara, ipar, kerabat dan kader-kader partai dari etnis Makassar. Kedua, Membangun relasi dan melakukan pendekatan partai politik dengan menjalin hubungan baik dengan semua ketua, pengurus dan fungsionaris partai politik lain selain Partai Golkar sebagai pintu lain untuk pencalonan ketika tidak bisa melalui Partai Golkar dan terbukti dengan pencalonannya yang justru didukung oleh PAN, PDK, PDIP, dan PDS. Ketiga, Syahrul mampu meyakinkan elite-elite etnis Bugis terutama ketua PAN, PDK, PDIP untuk mendukungnya. Dalam Partai Amanat Nasional, kemampuan Syahrul mampu meyakinkan bapak Ashabul Kahfi tokoh etnis Bugis dari Bantaeng, bapak Andi Zainal Abidin, Ketua PDK adalah bangsawan Bugis Wajo begitupun dengan bapak Z.B. Palaguna ketua PDIP juga bangsawan Bugis Wajo dan pernah menjabat Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (1993-2003) sebelum kemudian digantikan oleh Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo. Keempat, Syahrul yang tidak hanya mengandalkan dukungan partai pengusungnya tapi menggunakan jaringannya di luar partai politik terutama dalam FKPPI, AMPI, PRAMUKA, dan Muhammadiyah, yang mempunyai banyak anggota tersebar di Sulawesi Selatan. Kelima, Karena Syahrul tidak terlalu mengandalkan kerja mesin partai politik sehingga memutuskan menggunakan pendekatan primordial karena ikatan kekeluargaan, kesukuan dan kewilayahan lebih kuat. Walaupun komunitas etnis Bugis lebih banyak dibandingkan etnis Makassar dan memiliki wakil dalam pencalonan, tapi Syahrul mempunyai pengaruh

kepada tokoh-tokoh etnis Makassar sehingga mendapatkan dukungan penuh oleh elite dan masyarakat etnis Makassar. Keenam, Dengan latar belakang pernah bersekolah di Sekolah Katholik Cenderawasih, Syahrul membangun jaringan sejak lama dengan komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang beragama Kristen yang memberikan arti yang signifikan terhadap kemenangannya dengan dukungan Partai Damai Sejahtera dan dukungan Persatuan Pendeta Se-Sulawesi Selatan. Tetap menjalin hubungan baik dan komitmen dengan tokoh-tokoh etnis Toraja yang kurang diperhitungkan dalam pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan pembagian wilayah di Sulawesi Selatan, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007 diasumsikan mewakili tiga kerajaan besar di masa lampau. Syahrul dianggap mewakili kebangsawanan Kerajaan Gowa-Makassar, Amin Syam yang bangsawan dari Bone sebagai representasi Kerajaan Bone-Bugis dan Aziz Qahhar Muzakkar yang orang Palopo merupakan representasi Kerajaan Luwu-Bugis dan berdasarkan ketokohan ayahnya Qahhar Mudzakkar yang masih memiliki banyak pengikut setia. Serta berdasarkan perolehan suara Amin Syam masih unggul di daerah Bugis Bosowa (Amin menang mutlak di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo), dan Ajattapareng (Amin menang di Kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang, dan Pare-Pare). Termasuk menang di Kabupaten Sinjai yang masuk daerah selatan-selatan tapi masih daerah Bugis karena berbatasan dengan Kabupaten Bone di sebelah selatan. Aziz juga mampu mempertahankan daerah basisnya di daerah Luwu Raya tidak termasuk Kabupaten Tana Toraja, Aziz memenangkan dengan perolehan suara 174.588 di tiga Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Luwu yakni Luwu Timur, Luwu Utara dan Palopo. Sama halnya dengan Syahrul yang mampu mendapatkan dukungan penuh dari

daerah selatan basis etnis Makassar di Kabupaten Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, dan Pangkep kecuali Kabupaten Jeneponto yang dimenangkan oleh Amin. Ketiga kandidat mampu mempertahankan daerah basis masing-masing dan mampu menang di daerah berdasarkan etnis masing-masing kandidat.

Etnisitas dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan semakin lemah, sentimen etnis juga lemah walaupun sengaja dimunculkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ikatan-ikatan primordial. Perilaku pemilih sudah mulai berdasarkan rasionalitas dengan mempertimbangkan visi, misi dan program yang ditawarkan para kandidat saat kampanye.

Kemenangan Syahrul atas Amin Syam dan Aziz lebih disebabkan figur dan kapabilitas yang dimilikinya sehingga mampu mendapatkan dukungan baik dari lintas partai politik, lintas etnis dan lintas agama. Sehingga disimpulkan bahwa etnisitas dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dapat dikalahkan melalui kemampuan Syahrul menggalang jejaring politik. Terbukti dengan kemenangan Syahrul Yasin Limpo yang diperoleh melalui kemampuannya membangun jaringan politik yang luas.

Persaingan antaretnis Bugis dan Makassar pada Pemilihan Gubernur juga berlanjut pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Sama seperti pemilihan gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pun masih berbasis etnis dengan memasangkan etnis Bugis dan etnis Makassar dalam satu paket yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan kedua etnis tersebut. Dari tujuh pasangan calon walikota, lima pasangan calon memadukan etnis Bugis Makassar dalam satu paket. Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar merupakan ajang selanjutnya bagi kedua etnis untuk memperebutkan superioritas dan hegemoni etnis terhadap etnis lainnya.

Dari tokoh-tokoh yang pernah memimpin di Kota Makassar, dari tahun 1947 sampai tahun 1976 Kota Makassar dipimpin oleh etnis Makassar dan selanjutnya dari tahun 1976 sampai sekarang di pimpin oleh etnis Bugis.

Dengan majunya kembali Ilham Arief Sirajuddin dalam pencalonan Walikota Makassar, maka digantikan secara definitif pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Wakil Walikota Makassar Andi Herry Iskandar. Ilham Arief Sirajuddin yang berpasangan dengan Supomo Guntur (Sekretaris Daerah Kota Makassar) sebagai representasi etnis Makasar terutama untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Makasar/Jeneponto yang merupakan penduduk mayoritas di Kota Makasar.

Persaingan antara partai politik pendukung Syahrul dengan mendukung Adil Patu dari PDK dan partai politik pendukung Amin juga berlanjut dengan mendukung Ilham Arief Sirajuddin dari Partai Golkar. Kecuali PDIP yang memilih bergabung dengan Partai Golkar mendukung Ilham.

Sementara dalam pola rekrutmen CPNS dan Tenaga Honorer berbeda dengan pola rekrutmen pejabat politik. Penerimaan CPNS dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan sistem seleksi mulai dari seleksi administrasi, diadakan tes tertulis yang kemudian pemeriksaan lembar jawaban tidak lagi dilakukan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah tapi diserahkan kepada pihak perguruan tinggi untuk melakukan pemeriksaan memakai sistem scanning dan skoring nilai, sehingga terjadi transparansi dalam penerimaan CPNS daerah. Dari seleksi penerimaan CPNS umum tidak lagi menggunakan sistem kekeluargaan dan kekerabatan seperti di masa orde baru. Persaingannya menjadi terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat administrasi, batasan umur, dan berdasarkan formasi yang ada baik itu dari etnis Bugis, Makasar,

Mandar, Toraja, serta etnis lainnya. Sedikit berbeda dengan proses penerimaan CPNS umum dengan proses penerimaan CPNS melalui pengangkatan tenaga honorer daerah karena proses pengangkatannya berdasarkan standar lamanya mengabdikan minimal satu tahun pada saat keluarnya peraturan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, batas umur maksimal 35 tahun, pengangkatannya berdasarkan formasi yang dibutuhkan setiap tahun.

Sedangkan penerimaan tenaga sukarela dan tenaga kontrak diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah karena pembayaran gaji mereka berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. Begitu pun penerimaan tenaga sukarela dan tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga proses penerimaannya masih berdasarkan kebutuhan pegawai dan kepentingan sebagian pejabat untuk memasukkan keluarga dan kerabatnya dengan harapan masih akan ada pengangkatan tenaga kontrak menjadi CPNS jika Susilo Bambang Yudhoyono masih terpilih menjadi Presiden pada Pemilihan Presiden bulan Juli nanti.

Hubungan antaretnis Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, baik dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota, etnisitas sudah mulai melemah digantikan oleh kepentingan. Kedua etnis akan bersaing dalam memperebutkan kekuasaan tapi juga bisa disatukan oleh kesamaan kepentingan. Sedangkan jauh pada level rekrutmen CPNS dan tenaga honorer, masing-masing etnis berusaha memasukkan keluarga dan kerabatnya dengan pertimbangan pekerjaan pegawai negeri masih prestisius dikalangan masyarakat dan sebagai pengganti generasi penerus mereka jika nanti mereka sudah pensiun. Sehingga dengan melihat jumlah orang-orang Bugis yang masih dominan

baik yang menduduki jabatan eselon maupun staf biasa dari dulu maka penerimaan CPNS baik dari CPNS umum maupun tenaga honorer masih di dominasi etnis Bugis.

8.2 Implikasi Kebijakan

8.2.1 Implikasi Teoritik

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka studi ini menemukan implikasi teori yang mendukung dan menguatkan teori yang dijadikan alat penelitian. Pertama, teori yang dikemukakan Philippe C. Schmitter dimana korporatisme negara dimunculkan untuk menindas dan menutup kemungkinan artikulasi kepentingan kelas bawah untuk menciptakan ketentraman sosial. Studi ini melihat pecahnya korporatisme negara di masa orde baru, didominasi Partai Golkar, ABRI, dan Birokrasi namun kemunculan partai-partai baru seperti Partai Demokrat dan PKS dalam Pemilu 2004 memecahkan dominasi partai lama dan turut mempengaruhi sistem politik.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kalinya dipilih langsung oleh masyarakat, memunculkan kekuatan baru koalisi partai politik PAN, PDIP, PDK, dan PDS yang diantaranya adalah partai baru dalam ruang kontestasi Pemilihan Umum mendukung pencalonan Syahrul Yasin Limpo dan Koalisi keummatan yang terdiri dari partai politik beraliran Islam dan partai-partai kecil non parlemen mendukung Aziz Qahhar Mudzakkar serta Amin Syam yang didukung kebesaran Partai Golkar, Partai Demokrat, yang pada Pemilu 2004 muncul sebagai saingan partai besar yang sudah lama, PKB, PKPI dan PBSB. Terbukanya ruang kontestasi dengan munculnya partai-partai baru menjadi kekuatan baru saingan Partai Golkar yang selama orde baru berhasil mendukung kadernya menduduki posisi bergengsi di Sulawesi Selatan.

Kedua, teori sirkulasi elite yang dikemukakan Pareto dan Mosca, yakni terjadinya pergantian elite baik antara elite yang memerintah atau lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru, yang menurut Mosca disebabkan elite yang berkuasa tidak mampu memberikan layanan yang diperlukan massa atau karena terjadinya perubahan kekuatan sosial dalam masyarakat

Kemenangan Syahrul atas Amin Syam yang disebabkan kredibilitas dan figur Syahrul menyebabkan pergantian antarelite yang memerintah dari militer ke sipil, dari generasi tua ke generasi muda, dari etnis Bugis ke etnis Makassar.

Ketiga, Teori Michel Foucault dengan politik identitas (*biopolitik*) yang dikenal dengan politik perbedaan yang muncul dari asumsi perbedaan termasuk pertentangan etnis. Etnisitas lebih mengacu pada persamaan dan keterikatan sejarah masa lalu, dan penggunaan ikatan primordialis dan instrumentalis untuk mendapatkan dukungan etnis.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang kandidat berasal dari latar belakang etnis yang berbeda menjadi ajang persaingan etnis dalam memenangkan pemilihan. Dimana tiap kandidat menggunakan pendekatan etnis/pendekatan primordial yang lebih kuat dari ikatan partai politik dengan menggunakan pendekatan keluarga, etnis, dan kewilayahan seperti yang dilakukan Syahrul untuk mendapatkan dukungan etnis Makassar dan memainkan simbol etnis dalam kampanye seperti ketika Amin berkampanye di daerah Bugis, dia mengatakan tidak mungkin dipermalukan sesamanya orang Bugis dan membangkitkan kebesaran kerajaan Bone dan ketika Syahrul berkampanye di daerah selatan menggunakan bahasa Makassar dan membangkitkan semangat orang-orang Makassar akan kebesaran kerajaan Gowa. Begitupun Aziz ketika berkampanye di Luwu yang membangkitkan simbol-simbol kebesaran kerajaan Luwu.

Perubahan struktur elite dari elite etnis Bugis ke elite etnis Makassar merupakan implikasi dari pelaksanaan desentralisasi sejalan dengan demokratisasi dengan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

8.2.2 Implikasi Empirik

Secara empirik, hasil studi ini diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam melihat dan menyikapi munculnya isu etnisitas pemilihan kepala daerah pada daerah yang multi etnis. Hasil studi ini juga dapat memberikan perbandingan pada pemilihan di daerah lain karena tiap daerah memiliki budaya dan karakter yang berbeda.

8.3 Keterbatasan Penelitian

Penyelesaian studi ini tidak lepas dari keterbatasan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu para peneliti lain yang tertarik mengembangkan hasil penelitian ini secara lebih mendalam, diharapkan dapat memberi masukan positif bagi penulis agar lebih baik dan bermanfaat bagi keilmuan.

8.4 Agenda Penelitian Mendatang

Lebih lanjut hasil studi ini menjadi bahan rujukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap penelitian-penelitian berikutnya tentang konflik antarelite politik yang menggunakan isu etnisitas dan sentimen etnis dalam mobilisasi politik dalam pemilihan gubernur, bupati/walikota untuk mendekati kandidat dengan pemilih, sehingga mendapatkan pengelolaan dengan baik untuk melahirkan budaya politik dan sistem politik lokal yang lebih baik.

Diharapkan pula menjadi bahan rujukan dalam penelitian tentang perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah yang masyarakatnya multi etnis. Untuk melihat kecenderungan pemilih apakah masih berdasarkan ikatan primordial atau berdasarkan kompetensi dan kapabilitas kandidat dalam memilih pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*. Magelang: IndonesiaTera.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfian. 1981. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Anwar, Ibrahim. 2003. *Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. Makassar: Hasanuddin Press.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Mendesain Managemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Bottomore, T.B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. (terj.). Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. (terj.). Jakarta: Rajagrafindo.
- Darwis. 2007. *Siap Menang: KPU Sulawesi Selatan Diantara Kekuatan Pilkada 2007*. Makassar: Citra Pustaka.
- Eriyanto, 2008. Faktor Etnis dalam Pilkada. *Lingkar Survei Indonesia*, Edisi 09.
- Erlington, Rally. 1977. *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Rudi. 1999. *A. Amiruddin "Nahkoda Dari Timur"*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Latimojong.
- Haris, Syamsuddin. Ed, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kambo, Gustiana. 2007. *Politik Identitas: Studi Kualitatif Tentang Konstruksi Identitas Politik Etnik Mandar*. Surabaya: Universitas Airlangga. (disertasi, tidak dipublikasikan).

- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit*. (terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Limpo, Syahrul Y. 2005. *Jangan Marah di Muara*. Makassar: Citra Pustaka.
- Maddick, Henry. 2004. *Desentralisasi dalam Praktek*. (terj.). Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Maula, Amiruddin. 2001. *Demi Makassar*. Makassar: Global Publising.
- Mattulada. 1995a. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin Press.
- Mattulada. 1998b. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin Press.
- Mas'oe'd, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Muhtamar, Shaff. 2007. *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Moch, Nurhasim. Ed, 2005. *Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nas, Jayadi. 2007. *Konflik Elit di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Yayasan Massaile Jakarta & LEPHAS.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nordholt, Henk Schulte & Gerry Van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pelras,Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Poelinggomang, Edward L. 2004a. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L. 2004b. *Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Balitbangda.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadinata, Leo dkk. 2003. *Penduduk Indonesia: Etnisitas dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.

- Sorensen, Georg. 2004. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S.P, Varma. 2007. *Teori Politik Modern*. (terj.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan, Syaukani, Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanjung, Bahdin Nur. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Tesis)*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Tilaar. 2007. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efriza, Toni Andrianus Pito, Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah 2004*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zuhro, R. Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sugiprawaty, S. IP
Tempat dan Tgl Lahir : Pinrang, 11 September 1975
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
NIP : 580 024 498
Alamat Rumah : Jl. Kerukunan Barat No. 168 Blok J
Bumi Tamalanrea Permai Makassar
Telepon : (0411) 580 337
Kantor : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar
Telepon Kantor : (0411-326045)

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri 6 Pinrang (1982-1987)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinrang (1987-1990)
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinrang (1990-1993)
- Universitas Hasanuddin Makassar (1993-1997)

Semarang, Juni 2009

Sugiprawaty

Lampiran 1

Gubernur Sulawesi Sampai Sulawesi Selatan Sekarang

Nama Provinsi	Nama Gubernur	Etnis
Sulawesi	Ratulangi	Manado
Sulawesi	Sudiro	Jawa
Sulawesi	Lanto Dg Pasewang	Makassar
Sul Sel Ra	A. Pangeran Pettarani	Bugis Makassar
Sul Sel Ra	A. Rifai	Bugis
Sul Sel	Ahmad Lamo	Bugis
Sul Sel	A. Oddang	Bugis
Sul Sel	A. Amiruddin	Bugis
Sul Sel	Zainal B. Palaguna	Bugis
Sul Sel	Amin Syam	Bugis
Sul Sel	Syahrul Yasin Limpo	Makassar

Sumber: Gustiana. 2007. Politik Identitas: Studi Kualitatif tentang Konstruksi Identitas Politik Etnik Mandar. Surabaya: Universitas Airlangga.

Lampiran 2

Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1997

Nama	Jabatan	Etnis
Alim Bachri	Ketua	Makassar
Suwahyo	Wakil Ketua	Jawa
Dr.Nuridin.A. Mappewali	Wakil Ketua	Bugis
Drs.Tajuddin Ibrahim	Anggota	-
Muh. Adnan Tiro		-
Sahabuddin Gading		Makassar
Drs.A. Bakri Tandaramang		Bugis
Hassan Sammana		Makassar
Drs. Eddy Baramuli		Bugis
Drs.A. Syafruddin Makka		-
Pdt. A. J. Anggui MT		Toraja
A. Altin Noor		Bugis
Drs. Abdul Karim		-
M. Saleh Nurdin Agung		-
Drs. Ibnu Munzir		Makassar
Dra. A. Niniek Lantara		Bugis
Ir. Susilo MT Harahap		Batak
Dra. Syuhada Husein		Bugis
Nurhayati Yasin Limpo		-
Dra. A. Nurtiah Panawan		-
Ir. Chairul Tallu Rahim		-
Drs. A. Bintang		-
Drs. Ambas Syam		-
Alkianus Jacobs		Toraja
Dra. Maemunah Dawy		-
Adee Netty Moku		-
Dra. A. Tja Cambolang		Bugis
Dra. Ny. Jamaluddin		-
A. Kadir Dalle		Makassar
Ibrahim Tulle		Makassar
Anneke Syam		Bugis
Husni Jamaluddin		Mandar
Drs. Muchtar Husein		-
A. Maksum Dai		-
Pangerang Rahim		Bugis
Dr. A. Hermien Mattalatta		-
A. Hasit		-
I. Putu Sedana		Bali
Kallo Bandaso		Toraja

Raden Mulyono I Nyoman Suartha Syamsul Bachris Effendi Ahamad Saransi Drs Sumadi		Jawa Bali Bugis - -
--	--	---------------------------------

Sumber: Buku Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997

Lampiran 3**Nama-Nama Anggota DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2008**

Nama	Jabatan	Etnis
H. Moh. Roem, SH. M.Si	Ketua DPRD Sul Sel	Bugis
Drs. A. Zainal Abidin, M.Si	Wkl Ketua I F PDK	Bugis
Surya Darma, LC	Wkl Ketua II F PKS	Bugis
Drs. Ashabul Kahfi, M.Ag	Wkl Ketua III F PAN	Bugis
Drs. Chaidir Arif Kr. Sijaya	Anggota	Makassar
Burhanuddin, B, SE, M.Si	-	Makassar
Drs. A. Arifuddin Saransi	-	Bugis
Kamaruddin Nazar, BA	-	Makassar
Drs. H. Mapparessa Tutu	-	Bugis
Ir. Chairul Tallu Rahim, MP	-	Bugis
Ir. M. Arfandy Idris	-	Makassar
Drs. Lakama Wiyaka, MM	-	Bugis
Ir. Susilo MT. Harahap	-	Batak
A. Bahrnizai Nabeng, SH	-	-
Drs. A. Syafiuddin Makka	-	-
Ajiep Padindang, SE, MM	-	-
H. Nurdin Mangkana, SH	-	-
Junus Lamba	-	-
Ir. Markus Nari, M.Si	-	Toraja
Drs. Isjaya Kaladen	-	Bugis
Drs. Tadjuddin Idrus	-	Bugis
Hoist Z. Bachtiar, S.Sos	-	Makassar
Eddy Baramuli, SE	-	Bugis
Drs. A. Burhanuddin	-	-
Drs. A. Marzuki Wadeng	-	-
Drs. Ambas Syam, MS	-	-
Drs. Dachlan Maulana, MS	-	-
Drs. A. Iskandar Z. Latif	-	-
M. Ruslan, MA	-	-
Pangerang Rahim	-	-
Dra. A. Tja Tjambolang, MS	-	-
Ir. Abdul Majid Tahir, MS	-	-
Drs. A. Yaqkin Pajalangi, M.KES	-	-
A. Rahman AT	-	-
Dan Pongtasik, SH	-	Toraja
Husain Djunaid, SH. MH	-	Bugis
M. Yunus Baso, AB	-	-
A. Potji	-	-
Alimuddin, SH. MH	-	Makassar
Rachmad E Patompo, MBA. CRE	-	Bugis
Munawar Abd. Djabbar	-	Bugis

Susy Smita Pattihusiwa, ST	-	Maluku
Syamsari, S.Pt, MM	-	Makassar
A. Akmal Pasaluddin, SP	-	Bugis
Amru Saher, ST	-	-
Dr. A. Qayyim Munarka	-	-
Dra. Devi Santy Erawaty	-	Jawa
Muchlis A. Panaungi, SH	-	Bugis
Ir. A.Yusran Paris, MBA, MM	-	-
Azikin Saleh Toputiri, SH	-	-
H. Sahrir Thoha, S.Sos	-	-
Ir. Doddy Amiruddin	-	-
Ir. Buhari Kahar Muzakkar	-	-
Muh. Ramli Haba, SH. MH	-	Makassar
H.M. Roem Latunrung, SH	-	Duri
Drs. A. Page Sanrima	-	Bugis
Ir. Radjagaoe A. Basir	-	-
Ir. P.A. Timo Pangerang	-	-
Ir. A. Heri Suhari Attas	-	-
H. Ilham Noer Toadji	-	-
Ir. A. Adil Patu, M.Pd	-	Makassar
Muh.Nasir Dg.Mappaseng	-	Makassar
Drs.Abubakar Wasahua,MH	-	Maluku
Baso Hamzah	-	Bugis
A. Mariatang, S.Sos	-	-
Drs. Syahrir Langko	-	-
Prof.DR.H. Jalaluddin Rahman, MA	-	-
Drs. Ahmad Kelana	-	-
Zulkifli, S.Ag	-	-
Andry S Arief Bulu	-	-
Ir. Yunus Ramba	-	-
Drs. Asrullah	-	Makassar
Dra. A. Besse Marda, M.Pd	-	Bugis

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008.

Lampiran 4

Nama-Nama Pejabat Teras Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nama Pejabat	Jabatan	Etnis
A. Muallim, SH, Msi	Sekretaris Daerah	Bugis
Drs. Muh.SalehRadjab, MM	Asisten Ketataprajaan	Bugis
-	Ast Adm Pemb & Keu	-
Basrah Hafid, SH, MM	Asisten Adm	Mandar
Drs. Halfin Gau, Msi	Ka Biro Otoda	Bugis
Ir.A. Bakti Haruni, CES	Ka Biro Dekonsentrasi	Bugis
S. Simi Lopang, SH. MH	Ka Biro Hukum & Org	Toraja
A. M. Yamin, SE, MS	Ka Biro Bina Eko & Pemb	Bugis
Drs. A.Yushar Huduri, Msi	Ka Biro Keuangan	Bugis
Drs. A. Ilham Gazaling,Msi	Ka Biro Kesej, Agama & Perempuan	Bugis
Drs. Tautoto T.R.S, Msi	Ka Biro Perlengkapan	Makassar
Drs.J ufri Rahman,Msi	Ka Biro Humas & Protokol	Bugis
Drs. Ibrahim Beddu	Ka Biro Umum	Bugis

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Lampiran 5

Walikota Makassar Sampai Sekarang

Nama Walikota	Tahun	Etnis
Abdul Hamid DgMagassing	1947-1950	Makassar
Qaimuddin	1950	Makassar
J. Mewengkang	1951	Menado
H.A. Dara Syahrudin	1951-1957	Makassar
M. Junus Dg Mile	1957-1959	Makassar
Abdul Latief Dg. Masikki	1959-1962	Makassar
Aroepala	1962-1965	Makassar
H.M. Dg. Patompo	1965-1976	Makassar
Abustam	1976-1982	Bugis
Yancy Raib	1982-1988	Bugis
Soewahyo	1988-1993	Jawa
H.M. Galib	1993-1994	Bugis
Malik B. Masry	1994-1999	Bugis
Alwi Roem	1999	Bugis
H.B. Amiruddin Maula	1999-2004	Bugis
Ilham Arief Sirajuddin	2004-2008	Bugis
Andi Herry Iskandar	2008-2009	Bugis
Ilham Arief Sirajuddin	2009-2013	Bugis

Sumber: Data hasil olahan, 2009.

Lampiran 6

Transkrip Hasil Wawancara

Tanggal 13 Maret 2009

1. Transkrip Wawancara dengan Prof. Muhammad Kausar Bailusy (Pengamat Politik Unhas)

+ Bagaimana ki (*kependekan dari kata kita / Anda*) melihat posisi tiap etnis dalam politik di Sul Sel ?

= Kalo posisi tiap etnis pada pilgub kemarin terjadi perubahan karena seharusnya orang Bugis yang menang kalo kita lihat bargaining posisi, tapi Syahrul berhasil mengubah orang-orang Bugis memilih orang Makassar. Kalau etnis memilih etnis maka Makassar kalah karena secara kuantitas dan daerah, Makassar jauh lebih sedikit dibandingkan Bugis. Berarti terjadi perubahan konfigurasi pemilih berdasarkan kemampuan dan figur calon pemimpin. Keterikatan Bosowa, Ajatappareng(*daerah basis bugis berdasarkan pemetaan geopolitik*) mulai melemah.

+ Jadi kalo begitu pilgub kemarin masih berbasis etnis ya pak ?

=Masih tetap etnis tapi etnisnya mulai melemah karena kalo etnis menguat, maka Syahrul tidak menang.

+ Diantara ketiga pasangan calon yang berpeluang besar mendapat simpati dan dukungan dari etnis bugis dan makassar, apakah karena Syahrul menggandeng Agus yang berasal dari etnis bugis ?

=Tapi kalo dari segi itu, Agus mewakili Bugis yang kasar kalau itu yang dipetakan. Tapi terjadi perubahan, mereka (*pemilih*) mulai mau memilih pemimpin yang bisa memimpin Sul Sel. Elit–elit sekarang mulai mendekati Syahrul, anehnya disitu. Apalagi Jusuf Kalla mendukung Syahrul dengan mengeluarkan pernyataan:Pilih sesuai hati nurani, seharusnya JK sebagai Ketua Golkar mengerakkan mesin politik partai. Itu kesalahannya JK, seharusnya dia katakan: semua ketua kabupaten/kota memenangkan Golkar.

+Bagaimana dengan persaingan antara bugis Makassar dalam memperebutkan posisi gubernur di Sul Sel, apakah makin intens atau tidak, Pak?

= Iya itu betul, kalau dulu sistem tertutup jadi orang bisa manipulasi macam-macam, sekarang masyarakat yang memilih. Jadi persaingannya makin intens. Apalagi etnis itu sangat kuat di Sul Sel terutama kelompok Bugis dan kelompok Makassar, tapi

kelompok Makassar kesatuannya buyar, biasa menyerang sendiri-sendiri, kalau Bugis masih ada koalisinya kuat seperti Bosowa (*Bone, Soppeng, Wajo*) dan Ajatappareng (*Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang, Enrekang*) tapi yang kuat itu Bosowa.

+ Kalo dibandingkan dengan dengan masa orde baru, apa persaingan antara elite Bugis Makassar sekarang ini makin intens pak ?

= Kalo itu dulu orde baru persaingan tidak sempurna, lebih ditentukan oleh keluarga Cendana, terutama Ibu Tien. Jadi anggota DPRD hanya simbol saja. Iya, sekarang persaingannya makin intens.

+ Bagaimana pak, perubahan politik nasional dalam memberi arti atau peluang kepada elite Makassar untuk bersaing dalam berpolitik di Sul Sel ?

= Sebenarnya Pilkada itu ada juga untungnya memberi kontribusi, memberi semangat putra daerah dalam merebut kekuasaan pada tingkat lokal seperti pada pilgub yang lalu, karena yang bersaing orang lokal semua. Itu artinya putra daerah semua yang diutamakan sehingga untuk membangun suatu entitas nasional masih lemah. Karena tidak ada orang Sumatera, orang Bali (*tidak ada calon dari luar Sulawesi*) berarti NKRI kita ini masih lemah dalam penataan sistem politik lokal karena harus oleh putra daerah yang memimpin.

+ Jadi kemudian apakah elite Makassar berusaha untuk bisa tampil kompetitif karena ruang kontestasi menjadi terbuka, apa mi bentuk usahanya orang-orang Makassar untuk bisa tampil kompetitif ?

= Itu yang kita harapkan pada pemilihan walikota Makassar, calon yang didukung Syahrul kalah (*maksudnya Adil Patu, Ketua PDK Makassar*)

+ Apa karena orang Bugis lebih agresif dibandingkan orang Makassar Pak ?

= Sebenarnya orang Makasar lebih agresif tapi selalu kalah pada penyelesaian akhirnya. Pak Harto itu lebih senang orang Bugis tapi kalo situasi kacau, orang Makasar yang dipasang sebagai panglima karena *rewa ki (jagoan)*, cocok dijadikan panglima perang karena suka berperang. Makanya orang Bugis bikin koalisi karena kalo tidak koalisi tidak bisa melawan Makasar.

+Jangan-jangan masih lanjutan dari persaingannya Arung Palakka dengan Sultan Hasanuddin, pak ?

= Iya, iya itu tidak akan berhenti karena eksistensi konflik tidak akan berhenti termasuk persaingan pengaruh, ekonomi dan lainnya.

+ Jadi pasangan kandidat menggunakan pendekatan etnis untuk mendapatkan simpati dan dukungan, pak ?

= Iya, kalau Syahrul datang ke daerah selatan-selatan yang mayoritas orang Makassar, maka dia menggunakan bahasa Makassar dan menonjolkan kalau dia orang Makassar dan maju untuk orang-orang Makassar sehingga orang-orang Makassar merasa bangga ada wakil dari mereka dan memang memiliki kemampuan. Begitu juga kalau dia ke daerah Bugis, dia memperkenalkan ibunya yang orang Bugis (*sidrap*). Begitu semua yang dilakukan oleh pasangan calon supaya bisa mendapat simpati dan dukungan yang sebanyak-banyaknya.

+ Pak, seberapa besar dukungan etnis terhadap calon yang mewakili mereka ?

= Tidak besar lagi, buktinya orang-orang Bugis mendukung Syahrul yang orang Makassar, tapi sebaliknya Syahrul mendapat dukungan dan menang di daerah basis orang-orang Makassar di daerah Selatan-Selatan kecuali di Jeneponto, Sinjai dan Maros yang daerah percampuran Bugis Makassar, Amin mendapat suara terbanyak.

+ Terus bagaimana Pak, dukungan etnis Makassar kepada Syahrul ?

= Kalau kita lihat Makassar juga memang ada yang memilih Amin (*maksudnya Jeneponto*) karena permasalahan posisi di pemerintahan tapi memang ada daerah Bugis (*maksudnya Pangkep dan Barru*) yang direbut Syahrul juga termasuk Toraja, di Bone Syahrul kalah, kalau Gowa Syahrul menang, adiknya Khan Bupati Gowa.

+ Bagaimana kita lihat Pak, dukungan etnis Makassar terhadap kemenangan Syahrul

= Besar, buktinya Syahrul mampu memenangkan semua daerah Makassar kecuali Jeneponto. Itu berarti suaranya orang Makassar bersatu untuk Syahrul, sementara suara orang Bugis terbagi antara Amin dan Aziz, coba lihat perolehan suaranya Amin hanya kuat di Bosowa, Ajatappareng agak lemah.

+ Dalam mengatasi perubahan sistem politik dengan diadakannya pemilihan kepala daerah langsung, bagaimana usaha-usaha etnis Bugis Makassar mengatasi perubahan tersebut, Pak ?

= Sebenarnya era ini disebut era Bugis-Makassar, karena muncul Syahrul juga mau memetakan di beberapa posisi, bisa digunakan orang Makassar dengan Syahrul melakukan modifikasi mendukung Roem yang orang Bugis. Fenomenanya orang Makassar terbatas. Hasil pemilihan sebenarnya Amin menang tapi elite-elite Bugis di Jakarta yang mau menjaga integritas di Sul Sel, membuat bagaimana Syahrul yang menang. Terlihat JK memperlihatkan niatnya mendukung sesuai pernyataannya yang salah sebagai ketua DPP Golkar yang justru memenangkan Syahrul mulai dari penghitungan suara sampai pada putusan MA (Mahkamah Agung). Dia (JK) upayakan Syahrul yang menang karena kalau Amin yang menang, Sul Sel akan konflik. Begitu....

+ Bagaimana *mi* Pak, arti sebagai seorang Bugis atau Makassar, pasca reformasi politik ini?

- = Kalo orang Makassar merasa bangga karena bisa memimpin Sul Sel tapi bagi orang Bugis merasa kecewa karena dikalahkan, mereka kecewa sekali bukan persoalan perhitungan suara tapi karena permainan elite bugis di Jakarta termasuk JK.
- + Kalo menurut kita pak, faktor utama kemenangan Syahrul pada pilgub kemarin ?
- = Faktor utamanya adalah terletak pada figur Syahrul itu sendiri selain kemampuannya mendekati semua kalangan, termasuk kemampuannya mendekati orang-orang Bugis untuk memilihnya. Dia itu aktif di banyak organisasi, ditambah lagi pemilihannya khan sudah terbuka/langsung oleh masyarakat.
- + Bagaimana tanggapan bapak tentang rasionalitas visi, misi dan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan ?
- = Memang dari segi visi misi Syahrul unggul dalam artian dia mengangkat isu pendidikan dan kesehatan gratis yang menarik bagi masyarakat dibandingkan visi misi calon lain, visi misinya Amin khan menciptakan masyarakat yang religius dan melanjutkan pembangunan di Sul Sel, padahal pada kenyataannya amin pada kepemimpinan sebelumnya dianggap belum berhasil. Kalo Azis visi misinya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Memang pemerintahan di Sul Sel harus bersih tapi untuk sekarang ini masyarakat lebih membutuhkan pelayanan kesehatan gratis juga pendidikan gratis bagi anak-anaknya.
- + Ke depan, bagaimana kita lihat hubungan Syahrul-Agus dalam memimpin Sul Sel?
- = Ya, mudah-mudahan bisa kompak sampai akhir masa jabatannya karena kalo kita lihat Agus itu khan mewakili bugis yang kasar dan berpasangan dengan Syahrul yang orang Makassar jadi....
- + Saya beralih ke pilkada Makasar kemarin pak, bagaimana Ilham maju kembali dalam pilkada tapi tidak menggandeng Andi Herry dan justru menggandeng Supomo Guntur ?
- = Ilham-Supomo itu memang kita lihat bahwa itu pasangan Bugis-Makassar begitu khan? pasangan Bugis Makassar itu menjadikan Ilham menang, tapi Ilham menang telak karena pertama, Ilham punya Basic di partai Golkar dan kuat di dukung oleh orang-orang Makasar yang memilih Supomo.
- + Jadi kalo begitu pak, alasan Ilham menggandeng Supomo sebagai representasi orang Makassar ?
- = Iya, representasi orang Makasar khan? Karena di Kota Makasar banyak etnis Makasar terutama orang Jeneponto. Supomo itu khan orang Jeneponto.

+ Dengan perubahan dari pasangan Walikota/Wakil walikota Ilham-Herry yang keduanya berasal dari etnis Bugis dan sekarang pasangan Ilham-Supomo yang Bugis Makasar jika ditinjau dari segi politis dan antropologi, pak?

= Sebenarnya pasangan Ilham-Herry yang Bugis-Bugis dan ketika pemilihan Ilham mencalonkan diri kemudian secara struktural digantikan oleh wakilnya yang Bugis itu berarti Bugis tidak mau melepaskan itu. Nah, Ilham maju kembali karena kapan Ilham mengundurkan diri atau tidak maju kembali, maka Makasar yang akan muncul di permukaan. Karena sebenarnya strategi itu yang dijalankan oleh orang Makasar, bagaimana bisa memimpin Kota Makasar.

+ Jadi kalo begitu persaingan etnis di pemilihan walikota Makasar masih ada ya pak ?

= Persaingan etnis masih ada di pilkot Makasar, iya ada karena ada juga calon Makasar lain, itu yang anaknya mantan Bupati Majene, yang sepupunya Supomo (*Wakil Walikota Terpilih*). Siapa lagi namanya. oh, Ilham Alim Bachri.

+Kalo masalah penerimaan CPNS dan tenaga kontrak, apa tidak terjadi persaingan pak?

= Justru CPNS juga masih luar biasa karena semua orang mengandalkan etnisnya maka selalu bermasalah setiap penerimaan CPNS selalu bermasalah karena ada kepentingan. Kalo kita mau Jujur penggunaan tenaga kontrak lebih bagus karena PNS tidak bisa dipecat kalo tidak kerja. Begitu juga penerimaan tenaga kontrak yang karena ada keluarganya atau kerabatnya yang kepala di dalam yang bisa memasukkan mereka menjadi tenaga kontrak. Tapi sekarang tenaga kontrak ada yang profesional dan tradisional tapi yang tradisional yang cepat diangkat jadi CPNS.

+ Jadi apa persaingannya makin terbuka atau tidak, pak ?

= Iya, lihat saja tiap penerimaan CPNS selalu ribut karena mereka merasa putra daerah situ jadi mereka yang harus diterima menjadi CPNS, sampai-sampai kalo ada dari peserta dari daerah lain yang lulus mereka protes.

Tanggal 17 Maret 2009

2. Transkrip Wawancara dengan Drs. Ashabul Kahfi, M.Ag (Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan)

+Apa yang menjadi pertimbangan politik Partai PAN dengan mendukung pasangan Syahrul- Agus yang keduanya kader Partai Golkar ?

=Pertama, kompetensi menjadi sangat penting dalam kriteria memilih pemimpin karena pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan, kedua adalah pengalaman beliau sebagai pamong yang sangat berpengalaman mulai dari camat, kepala bagian, semua jenjang sudah pernah dia lalui. Jadi dia itu ahli pemerintahan yang dibutuhkan oleh kondisi Sul Sel yang kekurangan sumber daya manusia, kemudian dia itu masih muda dan cerdas. Itu pertimbangan objektifnya, tentu juga ada pertimbangan subjektifnya. Apakah itu mau ditulis atau tidak. Pertimbangan subjektifnya karena dia lahir dan besar di lingkungan Muhammadiyah. PAN itu yang pertama kali mendukung Syahrul.

+Iye (iya) Pak, sebab pemerintahan yang kuat lahir dari pemimpin yang kuat.

=Iya betul, pemerintahan yang kuat berawal dari pemimpin yang kuat dan Syahrul orangnya memiliki kompetensi, kalau pemerintah tidak mengerti mau diapakan pemerintahan ini, mau jadi apa ? dan Syahrul mau menghadapi tantangan.

+Bagaimana ceritanya Pak, kemudian Syahrul berpasangan dengan Agus ?

= Awalnya pak Syahrul mengincar Aziz Qahhar Mudzakkar melawan Amin dengan alasan Aziz memiliki kans kuat untuk mendulang suara di Luwu Raya, tetapi kemudian Aziz maju sebagai calon gubernur. Kemudian pak Syahrul mempertimbangkan calon pendamping dari partai-partai pengusung.

+Awalnya kan PAN punya calon sendiri untuk mendampingi pak Syahrul (Buhari Qahhar Mudzakkar)

= Iya, memang ada empat DPC PAN Se-Luwu Raya, Tana Toraja, dan Enrekang yang mendeklarasikan pasangan Syahrul-Buhari, dengan alasan paket Syahrul-Buhari paling kuat dibandingkan calon lain setelah kemungkinan paket Syahrul-Aziz gagal diusung. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang Ketua DPD PAN Abdul Hadi Djamal (adik saya) menanyakan ke pak Agus kesediannya mendukung Syahrul dan disetujui oleh pak Agus. Begitu.

+Seberapa besar kontribusi Partai PAN dalam kemenangan pak Syahrul ?

= Iya, jadi pak Syahrul itu yang pasti PAN membantu secara administrasi, maksudnya kita yang dukung, kita memback up langsung dengan pergerakan-pergerakan memenangkan beliau khan? jadi semua jaringan partai bekerja untuk Syahrul termasuk yang kita gerakkan adalah tim relawan dan kader-kader PAN di daerah. Kemudian

setelah ada pertemuan dengan Pak Agus di Bantaeng yang difasilitasi Bupati Bantaeng (Azikin Solthan), minggu depannya DPC PAN Bulukumba menyatakan secara terbuka mendukung Syahrul-Agus. Dana ada juga tapi ya tidak seberapa. Pak Syahrul itu saya lihat dari pengalaman saya bersama-sama beliau, kekuatannya pada jaringannya dan figurinya yang kuat. Semua itu terjadi dari proses waktu yang sangat panjang. Yang sudah dilakukan yang saya lihat bagaimana dia masuk semua kelompok baik itu Pramuka dan organisasi lainnya.

+Iya pak, Pak syahrul sudah menjalin hubungan yang luas diluar partai Golkar jauh-jauh hari

= Iya, iya, dari hubungan-hubungan subjektif. Dari hubungan-hubungan subjektif tentu lahir dasar-dasar rasional yang mendasari kita untuk mendukung dan tentunya dia masih muda.

7. Bagaimana dengan visi misinya pak Syahrul, pak ?

= Iya pendidikan dan kesehatan, terkait dengan kondisi SDM(sumber daya manusia) di Sul Sel yang berada di peringkat 22. Kita melihat bahwa pendidikan dan kesehatan ini menjadi sumber masalah yang harus kita utamakan karena kalau bertumpuk-tumpuk akan menjadi beban sosial yang harus dipecahkan untuk melahirkan generasi yang mandiri.

8. Jadi visi misinya pak Syahrul dapat mengakomodasi platform partai, pak ?

=Agenda reformasi PAN adalah meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi visi misinya pak Syahrul yaitu pendidikan dan kesehatan gratis sejalan atau sejiwa dengan perjuangan Partai PAN sendiri. Tentu ada alasan saya dukung Syahrul, memang dia waktu itu mendekati partai-partai yang bisa dukung beliau, dia sudah menjalin hubungan dengan partai lain walaupun Syahrul berasal dari Golkar.

+Dengan perubahan sistem politik yang membuka ruang kontestasi dan memberi kesempatan rakyat memilih langsung pemimpin mereka.

=.Betul-betul itu. Sebab begini, ada gejala di masyarakat, mungkin karena pertama kali. Tidak mau menerima kekalahan, yah, karena mungkin pertama kali dilaksanakan pemilihan langsung. Begini *mi* (lah), politik itu candu.

+Perbedaannya sistem pemilihan sekarang dengan sistem pemilihan gubernur sebelumnya adalah terbatas dikalangan anggota DPRD

= Benar, kalo dulu itu anggota DPRD yang terpolarisasi antara siapa yang mendukung siapa, sehingga ada semacam dukungan yang didasarkan pada ikatan-ikatan berdasarkan kepentingan, kewilayahan atau kesukuan, begitupun dalam partai. Kemudian muncul faksi-faksi yang berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok elit yang disebabkan perbedaan, persaingan antar anggota intenal partai supaya

kepentingannya yang terpenuhi. Sedangkan sekarang tidak begitu lagi, lebih kepada bagaimana kita merapatkan strategi untuk mendapatkan simpati masyarakat setelah mengantongi dukungan dari partai-partai pendukung. Jadi berbeda memang. Sehingga dibutuhkan strategi yang agak berbeda pula. Kalo kita lihat pada pemilihan gubernur tahun 2003, di DPRD juga Pak Syahrul punya banyak dukungan terutama dua saudaranya, ada juga iparnya ditambah lagi anggota-anggota yang berasal dari Gowa dan dari suku Makassar.

Tanggal 23 Maret 2009

3. Transkrip Wawancara dengan Prof. Hamka Naping (Antropolog Unhas)

+Bagaimana bapak melihat posisi tiap etnis dalam politik di Sul Sel ?

= Posisi tiap etnis secara keseluruhan sebenarnya dari dulu antara etnis Bugis dan Makassar itu terjadi semacam perimbangan-perimbangan kekuatan politik, kita kenal Kerajaan Gowa sebagai representasi etnis Makassar dan Kerajaan Bone sebagai representasi etnis Bugis. Tapi sebenarnya kalo saya menganalisa, persandingan-persandingan kekuatan politik itu diposisikan oleh Belanda untuk kepentingan penjajahan, dikondisikan agar terjadi rivalitasi untuk kepentingan politik penjajahan untuk membantu teman dan melawan yang kuat karena kalau raja-raja bersatu, menyulitkan Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya. Kalau kita lihat eksistensi raja-raja di Sul Sel adalah satu, maka dilihat dari perspektif budaya adalah satu kesatuan politik.

+Iya Pak, orang Bugis Makassar kan seperti saudara kembar.

=Memang saudara, karena Raja Bone, Raja Luwu, dan Raja Gowa adalah saudara karena satu keturunan sebenarnya. Namun untuk kepentingan politis yang lebih luas dengan memeralat politik lokal itu, tapi kepentingan itu menurut saya tidak substansial dalam arti bahwa kepentingan yang substansinya, bahwa orang Makassar dan orang Bugis bisa berbeda afiliasi politiknya kalo berbeda kepentingan. Tapi sebenarnya mereka bisa bersatu. Maksud saya, perbedaan-perbedaan afiliasi politik itu bukan sesuatu yang substansial menurut saya tapi bersifat artifisial, yang boleh diciptakan sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu. Persoalannya kemudian dalam mengarahkan orientasi politik, kepentingan apa yang dominan yang bisa jadi pemicu kearah itu.

3.Jadi kalo begitu, pilgub kemarin tidak berbasis etnis ya, Pak?

= Kalo saya melihatnya tidak. Tidak berbasis etnis tapi ada semacam emosi-emosi etnis yang mewarnai. Tapi itu juga di provokasi kandidat. Bahwa pada saat Syahrul berkampanye di daerah selatan yang dia tau beretnis Makassar yang kental, dia provokasi sentimen-sentimen etnis itu, begitu juga jika Amin berkampanye di Bone, tentu saja etnis kebugisan yang diangkat. Coba saja liat pernyataannya Amin Syam yang mengatakan “Tidak mungkin saya dipermalukan sesamaku orang Bugis “ ya kan? “ *tidak mungkin Napakasirika' To Bone* “. Itu khan solidaritas etnik itu. Pernyataan itu adalah pernyataan etnik yang mengandung solidaritas.

+Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung membuka ruang bagi siapa saja yang mampu, tidak lagi hanya berasal dari etnis tertentu .

= Saya melihatnya begitu, sehingga yang jadi determinan adalah kapasitas diri bagi seseorang untuk tampil sebagai pemimpin, kan begitu? Sehingga walaupun dari Bugis tapi kapasitasnya terbatas pasti orang tidak memilih dia, sebaliknya walaupun dia dari

Toraja kalo dianggap memiliki kapasitas istimewa, orang akan memilih dia. Itu dalam pandangan saya dalam melihat etnis secara moderat tapi dari sisi lain kita dapat melihatnya secara primordialis, bahwa ada dikalangan orang Bugis tertentu yang mengatakan “mengapa kita memilih orang lain kalo ada orang Bugis, ada juga pandangan itu, sebaliknya orang Makassar juga begitu yang mengatakan mengapa kita memilih orang Bugis kalo ada orang Makassar. Itu berdasarkan fakta-fakta historis. Jadi pikiran-pikiran itu bergerak secara evolusi dari fakta-fakta historis yang ada, bahwa Bone dengan Gowa pernah “berkelahi/bermusuhan “. Dimana Bone menganggap bahwa Gowa begini, Gowa juga menganggap Bone begini, jadi kenapa kita mau dijajah lagi oleh Bone.

+Kenyataannya memang begitu kan Pak? Kalo kepala kantornya orang Bone, dia panggil juga orang Bone jadi kepala seksinya

= Itu kan pikiran-pikiran primordial ya? tapi saya melihatnya masih berlangsung di Bone dan di Soppeng, tapi itu dalam rangka rekrutmen yah? ini kan namanya persaingan, bahwa kesempatan yang terbuka sangat terbatas sementara banyak orang yang memungkinkan untuk menduduki jabatan itu, karena demikian ketatnya persaingan maka prinsip-prinsip primordialisme itu berlangsung karena kalo dia mau objektif, barangkali kesempatan untuk mengangkat citra keluarganya dan seetnisnya menjadi terbengkalai, begitu. Padahal semestinya kalo kita mau jujur berdasarkan sistem merit/prestasi tentu bukan yang begini caranya mengangkat pejabat kan, tapi itu satu. Dalam hal lain katakanlah pemilihan gubernur itu kan tidak berdiri sendiri sebagai gubernur saja, ada kabinet yang akan terbangun dan itu terkait dengan afiliasi-afiliasi dari orang-orang yang berjasa dalam terpilihnya menjadi gubernur karena sebentar ini ada kabinet dibangun dan itu saya melihatnya tidak terkait dengan etnik karena tim suksesnya Pak Syahrul ada dari etnis Bugis, etnis lain begitu juga sebaliknya. Jadi persoalannya kemudian adalah bagaimana tim suksesnya itu mampu membaca peta politik yang ada untuk kemudian berpihak pada yang akan memenangkan pertandingan dan setelah itu ia akan mendapatkan kue kemenangan ini. Sehingga kembali lagi kepentingan, walaupun saya tidak menisbikan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan etnik yang ada dalam sebuah proses politik.

+Misalnya untuk menduduki jabatan di pemerintahan bisa memberi kesempatan kepada siapa saja dari etnis lain, dengan terpilihnya Pak Syahrul bisa memberi kesempatan etnis Makassar tampil kompetitif ya, pak ?

= Itu bisa terbukti sebagai pemenang, coba lihat dari kalkulasi politik rasional dan hampir kita tidak yakin bahwa Syahrul bisa memenangkan pertandingan. Tadi dari segi kuantitas etnis, itu sangat rasional sekali, yang kedua, dari dukungan partai, siapa yang mendukung Pak Amin dan siapa yang mendukung Pak Syahrul, berapa presentase perolehan suara partai yang mendukung di DPRD yang mendukung Amin dan mendukung Syahrul sangat timpang tapi kenyataannya berkata lain. Tidak berdasarkan pada dasar-dasar pada aliran-aliran teoritis yang kita anut. Nah persoalannya sekarang dimana letak Imposiblenya? Coba kita menití dari garis etnik, ternyata tidak, menurut saya tidak, karena jika menití dari garis etnis keras, Pak Syahrul kalah kecuali kalo kita

mengatakan bahwa ada wakil dari etnik Bugis, tapi persoalannya itu wakil jika dibandingkan 01 dengan 02 tentu orang memilih 01 tapi kenapa Agus ini, bukan persoalan etniknya. Menurut saya salah-salah (*maksudnya tanggung*) kalo 02 yang kita pilih, seharusnya 01 yang kita pilih.

+Paling tidak untuk meraih suara dan simpati kedua etnis, maka harus memadukan kekuatan Bugis-Makassar dalam satu pasangan.

= Saya melihat bukan persoalan etnik tapi pada kapasitas dan perjuangan Syahrul dan kepiawaiannya dalam politik dan kemampuan membentuk jaringan yang saya anggap luar biasa.

+Setelah reformasi kemudian terjadi perubahan arti sebagai orang Makassar, mereka bangga dengan terpilihnya Syahrul dan bisa menjadi inspirasi

=Artinya justru orang Bugis jadi gubernur pada masa orde baru bukan karena representasi kebugisan dan kemakassarannya tapi karena gubernur yang dulu diangkat sehingga dia lepas dari etnik, cuma persoalannya kebetulan orang yang mengangkat itu punya afiliasi politik dengan orang Bugis. Ya itu kenyataan lain tapi seandainya orang yang mengangkat itu punya afiliasi politik dengan orang Makassar atau Toraja, tidak menutup kemungkinan orang Makassar/Toraja yang jadi gubernur.

+Seandainya tidak terjadi perubahan sistem politik, tidak ada kemungkinannya

= Iya kemungkinan, karena setelahnya dari atas (*maksudnya alat kontrolnya dari pemerintah pusat*) mungkin harus bicara pada level yang mana duluan punya akses karena katakanlah umpamanya kenapa di Jakarta hampir di semua departemen terutama di Departemen Keuangan dan Pajak, kenapa eselon duanya adalah orang-orang Batak karena yang mempunyai kemampuan menarik (*maksudnya merekrut seetnisnya*) yang kebetulan yang duluan adalah mereka.

+ Jika kita lihat visi misi Pak Syahrul sesuatu yang dianggap diperlukan Sul Sel saat ini

=Iya benar dan kemampuan untuk merumuskan pertama-tama didasari oleh kemampuan membaca tanda-tanda jaman kemudian kemampuan memproyeksikan apa yang akan terjadi di depan. Itu yang dimiliki Syahrul dan menjadikan determinan untuk memenangkan pertandingan.

+Kita bicara pada level yang paling bawah ini Pak, bagaimana dengan rekrutmen CPNS

= Itu persoalannya karena ini pada level yang paling bawah, lebih kepada kepentingan. Kepentingan untuk memberi job kepada orang, lebih kepada Basic need kan begitu? Menurut saya lebih kepada kebutuhan-kebutuhan dasar, kalo yang pada tingkatan eselon ke atas sampai pada akses ke Jakarta sudah pada social need dan aktualisasi diri dan itu bisa terkait dengan etnik.

- + Bagaimana dengan penerimaan CPNS di daerah yang harus punya KTP di daerah itu
- = Semua itu adalah otonomi yang kebablasan, artinya tidak memahami dan menangkap secara substansial otonomi daerah. Bagaimana mendekati pelayanan masyarakat dan bagaimana pemerintah daerah berimprovisasi mengembangkan daerahnya sesuai potensi yang dimiliki daerahnya. Sebenarnya esensinya itu tidak terkait dengan putra daerah yang menjadi pejabat. Tapi ada kesalahan persepsi, memang kapasitas diri kita belum maksimal, kita belum bisa bersaing bebas, kita belum pada penilaian objektif tapi masih melihat anaknya siap ini, keluarganya siapa ini. Kenyataan di masyarakat, apalagi ada falsafah Bugis dalam mencari jodoh adalah faktor keturunan dan jejaring keluarga. Itu salah satu cara untuk menaikkan status sosialnya. Maka dahulu pada masa orde lama dan baru, yang jadi bupati di Sul Sel itu adalah berasal dari kelompok-kelompok bupati sebelumnya. Tapi sekarang ini di Sidrap bupatinya, bukan lagi keturunan keluarga bupati, itu berarti sudah mulai masyarakat yang memilih pemimpinnya, kalo dahulu tidak bisa.
- +Iya, ya Pak, kenapa waktu itu kalo bupati harus Andi?
- = Lihat saja Agus (*Wakil Gubernur Sul Sel*) bapaknya siapa? Syahrul (*Gubernur Sul Sel*) bapaknya siapa? bupati-bupati sekarang bapaknya siapa? para politikus yang ngetop di Golkar
- +Apa karena pertimbangan berasal dari keluarga yang pernah memimpin/keluarga pemimpin?
- =Karena ada anggapan bahwa bakat-bakat pemimpin adalah bakat yang diwariskan padahal yang sebenarnya kepemimpinan itu walaupun terpengaruhi bakat, tapi bisa saja diperoleh kalo orang mau belajar tentang kepemimpinan. Tapi disini (*Sul Sel*) yang dominan mengatakan bahwa yang bisa jadi pemimpin adalah yang sudah jadi pemimpin yang diwariskan dari orang tuanya.
- + Dengan begitu, perubahan sistem politik sebenarnya keuntungan bagi orang-orang yang berada di luar keluarga pemimpin (mantan bupati dll) dan dari etnis lain selain Bugis?
- = Iya, sebenarnya pintu terbuka bagi orang-orang yang tidak secara historis memiliki kesempatan-kesempatan itu, artinya ada kesempatan baru yang terbuka, caranya bagaimana perbaiki performance kita, bangun kapabilitas diri, buka jaringan dan akses ke semua orang. Coba kalo dulu liat contohnya pada masa orde baru, orang Wajo tidak tau siapa itu Rady A. Gani (*mantan Bupati Wajo*), orang Toraja tidak pernah tau siapa itu Andi Lolo (*mantan Bupati Toraja*), orang Sinjai tidak tau siapa itu Roem (*mantan Bupati Sinjai*). Tapi karena Amiruddin (*Gubernur Sul Sel tahun 1983-1993*) yang gubernur, yang memerintahkan mereka jadi bupati. Eh kamu kesana, kamu kesini, bagaimana caranya nanti kita sosialisasikan dengan DPRDnya, selesai persoalan. Sekarang tidak bisa begitu, karena harus melalui mekanisme dimana rakyat harus menentukan siapa yang jadi bupati.

+Betul pak, dulu itu masyarakat tidak mengimpikan siapa yang bakal jadi bupatinya tiba-tiba datang To Manurung (*pemimpin yang turun dari langit*)

= Iya, iya, *To Manurung* dari Kantor Gubernur.

+To Manurung sudah benar kan, pak?

= Iya, orang yang tiba-tiba muncul tidak di tau asal usulnya.

Tanggal 23 Maret 2009

4. Transkrip Wawancara dengan Drs. Andi Zainal Abidin, M.Si (Ketua DPD PDK Sul Sel)

+Apa yang menjadi pertimbangan PDK mendukung Pak Syahrul dalam pilkada yang lalu, pak?

=Memang dalam pencalonan gubernur yang lalu ada beberapa faktor, Pertama; yaitu figur, figur dalam arti kata punya kompetensi di bidang pemerintahan, artinya dia mengetahui seluk beluk pemerintahan, kemampuan manajerial, punya inovasi baru, terutama ide-ide baru dalam menjawab tantangan kedepan dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Kedua; punya kredibilitas, dia sudah teruji dalam arti kata punya pengalaman, katakanlah dari camat, bupati, dia diberi kesempatan untuk berbuat. Ketiga; komitmen, bisa dipercaya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya waktu dia bupati, saya sekdanya, waktu pembangunan Dam Bili-Bili (*di Kabupaten Gowa*), dia tidak mau mengorbankan masyarakat. Ya, memang banyak program-program yang ditujukan kepada masyarakat, misalnya pendidikan dan kesehatan gratis dan juga beliau saya anggap lebih hebat adalah dia punya jaringan dalam semua aspek masyarakat, baik tokoh masyarakat, agama, pemuda, masyarakat bawah, bukan hanya jaringannya yang di Gowa. Bagaimana caranya mau diangkat jadi terpilih kalo tidak punya jaringan, dan dia tidak mengandalkan jaringan partai. Tidak sama Amin Syam yang mengandalkan Partai Golkar, kemudian dia bisa memanfaatkan jaringannya itu untuk membantunya, dia punya program yang dibutuhkan masyarakat. Ada pemimpin yang bikin program untuk dirinya sendiri, kalau Amin Syam tidak jelas programnya apa? Saya berkesimpulan Syahrul menyusun program berdasarkan karakteristik masyarakat, seperti Obama itu dia mendengarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kemudian membuat program. Yang kemudian dijual sebagai program pokok. Memang PDK selalu mengatakan kita harus mensual program jangan keberhasilan yang lalu saja.

+Bagaimana dengan bentuk dukungan PDK sendiri dalam memenangkan Syahrul, pak ?

= Iya, kita dukung itu karena kami panggil, hanya beliau. Kita tanya, komitmen kita dengan beliau adalah mengurus rakyat.

+Terus bagaimana dengan Pak Agus yang mendapatkan kartu kehormatan dari PDK?

=Iya, itu satu trik bahwa Pak Agus mendapat kartu kehormatan untuk memotivasi bagi kader bahwa Syahrul bagian dari PDK, supaya kader bisa loyal kepada partai. Itulah yang kelebihannya Pak Syahrul, jadi Pak Syahrul bukan hanya dekat dengan PDK, malah dengan semua partai.

+Jadi Pak Syahrul tidak hanya menjalin hubungan di Golkar saja, tapi menjalin hubungan dengan semua partai ?

= Iya, tidak sama dengan Amin Syam yang terlalu fanatik dengan partainya (*Golkar*), kita-kita ini diacuhkan, padahal dalam politik tidak bisa begitu. Dalam kapasitas sebagai ketua partai dia juga perlu suport dari kami. Beliau beda dengan Syahrul, Syahrul tidak kita pandang dari etnis apa tapi kita pandang sebagai pemimpin yang bersifat universalitis.

+Kalo begitu pilgub kemarin sebagai usaha untuk benar-benar mewujudkan perubahan sistem politik yang demokratis, ya pak?

= Saya bicara dengan Pak Ryass, saya juga bicara dengan Pak Syahrul setelah itu. Kalo saya punya pendapat untuk di Sul Sel, kita jangan paketkan Syahrul dengan Aziz, saya menolak, saya menolak. Aziz membawa garis pendekatan syariat Islam, karena syariat Islam di Sul Sel tidak sama dengan yang diterapkan di Aceh. Di Aceh syariat Islamnya diperjuangkan sebelum Indonesia merdeka, Qahhar Mudzakkar memperjuangkan syariat Islam bukan untuk syariat Islam tapi untuk kepentingan politiknya, bukan pribadi saya menolak Qahhar Mudzakkar dengan anak-anaknya tapi dari segi politik yang saya tolak. Saya bilang: kita harus carikan pasangan yang nasionalis, memang saya didorong, saya bilang jangan saya. Memang keputusan partai mendorong saya siapapun gubernur, kalo PDK mendukung (maksudnya calon gubernur tersebut) saya didorong, Pak Syahrul mengiyakan dan bilang sama Pak Ryass tapi saya tidak mau, saya diam saja. Ada peluang, saya liat Agus kecewa dengan Golkar, makanya saya dekati dia, saya bicara di ruang kerja, dan dia (Agus) mau. Saya juga yang mendorong Pak Syahrul agar paket hanya tiga (*maksudnya tiga pasangan calon*), saya bilang: Aziz tidak usah dikejar-kejar, dia kelihatannya tidak mau berpasangan dengan Syahrul. Mungkin juga karena dia (Aziz) punya komitmen dengan Koalisi Keummatannya. Saya bilang sama Pak Syahrul biarkan saja Aziz maju juga, karena kalo dia (Aziz) tidak maju, suara pengikut-pengikut loyalnya Qahhar Mudzakkar yang tersebar di seluruh Sul Sel akan lari ke Amin Syam. Makanya kalo Aziz maju, suara akan terpecah antara Aziz dan Amin Syam. Saya juga bicara dengan teman-teman di Toraja, mereka mengatakan kalo mau menang jangan berpasangan dengan Aziz karena menyakiti perasaannya orang-orang Toraja.

+Bagaimana dengan usaha partai-partai pengusung untuk memenangkan Pak Syahrul?

=Iya, PDK khususnya. Terutama saya memang yang banyak memberikan penekanan. Semua partai lain juga banyak bekerja, selain itu jaringannya Pak Syahrul yang kuat, sehingga Pak Syahrul tidak bisa menang seandainya jaringan dan partai pengusungnya tidak bekerja. Jadi kita memang memperkenalkan Pak Syahrul sebagai sosok yang akan membawa perubahan, bagaimana pemerintahan mau transparan kalo pemimpinnya tidak membawa perubahan dari pemerintahan yang sebelumnya. Saya memang bilang: kalo mau pemerintahan di Sul Sel berubah, ganti kepemimpinan. Tidak ada perubahan kebijakan pemerintah kalo pemimpinnya tidak diganti. Lihat saja ada perubahan sejak Pak Syahrul yang memimpin, baru satu tahun investor-investor mulai berdatangan. Kebijakan nasional bisa kita pengaruhi dari tingkat lokal kalo kebijakan lokal bagus.

+Saya melihat dengan perubahan sistem politik ini membuka ruang bagi siapa saja yang memenuhi syarat, dari etnis manapun bisa maju sebagai pemimpin. Karena pada era orde lama dan orde baru, terjadi sentralisasi kekuasaan sehingga untuk pengangkatan gubernur selalu dari pusat. Karena hampir semua gubernur sebelumnya berasal dari etnis Bugis.

= Memang. Kita bicara tentang historis, dalam sejarah memang kedudukan gubernur di Sulawesi Selatan tidak pernah lepas dari etnis Bugis-Makassar mulai dari Pettarani, Lanto Dg Pasewang yang orang Jeneponto (*etnis Makassar*), sama seperti pemilihan presiden dan wakil presiden kita yang selalu dari etnis Jawa dan luar Jawa tapi sebenarnya sistem primordialisme itu harus dihilangkan, misalnya Amerika. Seperti yang dulu saya pelajari waktu masih di Jogja, bahwa ciri masyarakat yang belum berkembang adalah ciri primordialis.

+Kalo boleh saya tau Ketua Tim Pemenangannya Pak Syahrul, Pak?

=Namanya Imam Mujahid, dosen pertanian Unhas. Saya juga tidak tau dimana dia belajar tentang politik. Pokoknya kemarin itu kita bekerja berdasarkan hasil kerjasama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia), dan konsultan-konsultan politiknya Pak Syahrul.

Tanggal 19 Maret 2009

5. Transkrip Wawancara dengan Drs. Mathius Timang, MBA (Ketua DPW PDS Sul Sel)

+Apa yang menjadi pertimbangan PDS sewaktu memutuskan untuk mendukung Pak Syahrul, pak?

=Ada beberapa faktor sih sebenarnya, yang pertama, kebetulan saya ini mulai sekolah dasar di Makasar, banyak tau daerah ini, dan saya banyak bergaul di gang-gang, sehingga merasakan suasana keakraban di sini terutama saudara-saudara kita orang Makassar. Tidak ada sekat. Suatu saat sebagai ketua partai politik di daerah ini saya bersama teman-teman menentukan pilihan. Karena yang maju ini Pak Amin dan Pak Syahrul. Saya ngomong begini, entah itu benar atau salah, saya ngomong “kapan lagi orang Makassar jadi gubernur”.

+Iya Pak, kan selama ini hampir selalu orang Bugis

=Iya, iya, seingat saya waktu masih kecil waktu itu, yang jadi gubernur orang Makasar, Lanto Dg Pasewang, kalo Pak Syahrul ini kan bapaknya yang orang Makassar, ibunya mungkin orang Penrang?

+ Orang Sidrap Pak.

= Ketika itu, suatu saat berada di tempatnya Pak Syahrul, saya bilang “saya ingat sekali Lanto Dg Pasewang itu orang Macasar”, tapi bukan saya mau mengkotak-kotakan, tidak, dan Pak Syahrul bilang “iya, tapi tidak lama karena penunjukan dari pusat itu, Pak Timang”. kedua; kita lihat memang Pak Syahrul ini ahli pemerintahan, sehingga pada saat itu kita cenderung mengapa kita memilih Pak Syahrul. ketiga, sebagai partai politik, kita ini bicara politik kita harus menang, jangan kita pilih orang yang akan kalah? kalo orang yang kita pilih kalah, kita akan terpuruk sebagai partai. Barangkali masih ada pertimbangan-perrtimbangan lain, tapi itulah yang pokok. Dan kemudian sebenarnya dari PDS sendiri terjadi kontradiksi, kita harus jujur kan? pada saat itu kami sudah bikin surat dukungan ke Pak Syahrul kemudian tiba-tiba DPP kami di Jakarta punya versi lain memberikan instruksi lagi. Lebih cenderung memilih mendukung Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Laksamana Benyamin Bura. Tapi waktu itu saya bilang “saya mau bertaruh, kalo Pak Ilham dan Benyamin Bura itu bisa mencapai dukungan 15 persen”, khan harus 15 persen? kalo nda salah waktu itu Pak Ilhamsyah dan Benyamin Bura memang hanya mencapai 6 persen. Yang diharapkan saat itu oleh Pak Mattalatta dan Benyamin Bura adalah dukungan dari PPP sudah mereka kantong, jadi yang selalu dia beritahukan ke kita adalah kalo PDS masuk maka sudah pasti mencapai 16 persen tapi buktinya kita tidak lihat, mana buktinya? Artinya dalam rangka bargaining tapi dilihat dari segi manajemen kemampuan memimpin daerah, ada pada pasangan Syahrul dan Agus. Pak Syahrul ahli pemerintahan dan Pak Agus ahli pertanian jadi pasangan ini cocok sekali, apalagi mereka dulunya sama-sama satu

sekolah di SMA Katolik. Dalam perjalanan tadi terjadi kontradiksi antara DPP dan DPW PDS, bayangkan saja saya diskorsing 2 minggu saya digertak-gertak, tapi saya bilang “tidak apa”. Selidik punya selidik ternyata pasangan Mattalatta dan Benyamin Bura memang tidak mencapai 15 persen. Nah kenapa Mattalatta dan Benyamin Bura ini dapat dukungan dari DPP? kita tau khan Benyamin Bura ini Laksamana Angkatan Laut, dan di DPP kita disana itu ada juga Lakasamana Angkatan Laut, begitu.

+ Jadi berdasarkan ikatan korps

= Iya, jadi saya itu ditelepon-telepon malam-malam, ini kita bicara etnis ya? bukan berarti kita begitu. Pak Ruyandi Hutasoit bilang “Pak Benyamin Bura itu orang Toraja, kenapa kita tidak dukung dia?” saya bilang “tapi bagaimana tikus mati disuruh panjat-panjat pohon?(*perumpamaan*)saya tidak bisa begitu.” Waktu itu kita ada rapat di DPP di Jakarta, sampai surat perubahan itu, Ketua DPP kita sudah mau tandatangan, surat itu disabotase akhirnya saya bawa sendiri, besoknya juga saya ke rumahnya Pak Syahrul malam-malam dan beliau berterima kasih dan akhirnya saya diajak kampanye malam-malam di daerahnya di sana. Alhasil ini kita lihat kemudian bagaimana perkembangan sul sel, kita lihat waktu pemerintahan Pak Amin, kita sul sel urutan 23, sedangkan sejak Pak Syahrul kita naik urutan 7 padahal target Pak Syahrul urutan 10. Memang kalo kita lihat debat di antara tiga paket ini, Pak Syahrul yang menonjol sendiri, dia memang punya kemampuan dan dia ahli orasi.

+Seberapa besar kontribusi PDS sendiri terhadap kemenangan Pak Syahrul

= Pak Syahrul bilang “Tidak ada sentimen politik tapi konsensus “ Kalo kontribusi kita memang tapi ada yang saya lihat, dengan dukungan kita ini ada sesuatu nilai yang tidak bisa dibeli. Lain dimana orang-orang Makassar menjalin hubungan dengan orang pendatang, orang-orang Toraja itu bagus sekali. Mungkin orang lain tidak bisa membaca tapi dari kami sendiri tapi hubungan itu terjalin dengan baik sebagai modal untuk membangun, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Syahrul memang melihat daerah-daerah mana yang perlu membangun dan dikembangkan terus dan kita lihat dalam hal kepegawaian sekarangn banyak dipakai orang-orang anu (Toraja) yang punya kemampuan , jadi SDM banyak-banyak orang itu sudah eselon kemudian ada hal yang paling menarik, kita bicara orang bilang dianaktirikan/warga kelas dua. Dan saya lihat itu untuk pertama kalinya, Kapolda Sul Sel ini orang Toraja. Saya dengar Pak Syahrul yang minta itu dan memang Bapak Metu Salempangan ini punya kemampuan karena memang dia berasal dari prajurit tapi tidak lama baru masuk Akabri dan memang menonjol, dan Angkatan itu tidak memilih-milih mengenai keyakinan, tidak ada itu. TNI Polri. Sehingga saya lihat itu penunjukan itu kayaknya memang ada hubungan ada penunjukkan. Tapi kalo kita hubung-hubungkan, kayaknya begitu.

+ Sehingga jika kita hubungkan dengan perubahan sistem pemilihan ini, membuka peluang bagi yang mempunyai kemampuan

=Iya, sebenarnya begitu. Biasanya siapa pun yang memerintah tentu membutuhkan dukungan, dari keempat partai yang mendukung Pak Syahrul, PAN, PDK, PDIP, dan

PDS semuanya adalah partai nasionalis, PAN itu Islam tapi moderat, PDS juga sebenarnya kalo kita lihat lambangnya salib itu, tapi sebenarnya kita nasionalis.

+ Itu lah kemarin saya dijelaskan sama ibu Florida dan saya bilang “itu lah bu Ida, karena kita jarang bersentuhan makanya kita kurang tahu.

= Iya, memang salib itu ada dalam Islam, ada bahasa Arab, dan saya kurang mengerti, dia itu yang mengerti.

+ Kalo kita lihat perubahan sistem pengangkatan gubernur di masa orde lama dan orde baru kemudian beralih menjadi sistem pemilihan langsung, bagaimana bapak melihat apakah persaingan menjadi makin intens atau bagaimana

= Iya, iya. Ini sebenarnya memang ada dan tidak bisa dipungkiri tapi negara ini dibangun berasal dari perbedaan. Yang kita harapkan, kita juga bisa berperan karena DPRD terlalu kuat. Kalo kita mau lihat memang legislatif terlalu berkuasa, sebenarnya harus ada keseimbangan. Dan Pak Syahrul bilang harus dikurangi ini agar kendali pemerintahan bisa dijalankan dengan baik

+ Kalo dilihat visi misi Pak Syahrul memang..

=Iya, memang pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, memang waktu ditanyakan tentang kemampuan untuk mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, dia bilang kalo memang APBD tidak mencukupi, bisa diusahakan dari perusahaan-perusahaan besar di sini untuk membantu sekian persen.

+ Satu juga karena Makassar adalah pintu gerbangnya Indonesia bagian timur

= Iya.iya, saya lihat Makassar dalam sepuluh tahun terakhir ini banyak kemajuan tapi karena saya lebih banyak tinggal di Jakarta. Bukan saya menganukan Pak Amin, tidak.

Tanggal 24 Maret 2009

6. Transkrip Wawancara dengan Tim Pemenangan Syahrul-Agus

- + Sebenarnya bagaimana strategi untuk memenangkan Pak Syahrul?
- = Begini dek, kita memang sudah menyiapkan strategi apa yang harus dilakukan jika hasil surveinya LSI begini, jadi kan kita kerjasama dengan LSI untuk mengetahui hasil survei terhadap responden. Berdasarkan hasil survei kita tau di daerah-daerah mana kita kurang
- + Kalo boleh saya tau Pak, daerah mana saja
- =Di daerah Sinjai, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo (*maksudnya daerah-daerah Bugis*). Di sana kita kurang sosialisasi jadi kita usahakan perbanyak pamflet, baliho, stiker dan sebagainya karena yang menguasai daerah itu Golkar.
- + Cara untuk mengantisipasi adanya daerah-daerah yang sulit karena Golkar kuat disana, bagaimana
- =Caranya kita menutupi kelemahan, kita mencari tau daerah-daerah mana yang belum menentukan pilihannya, daerah itu yang kita garap.
- +Ada cara lain mungkin?
- = Kita juga banyak memanfaatkan media, konstruksi media (Syahrul memiliki stasiun radio sekaligus sebagai penyiar di sana), itu banyak membantu. Jadi Pak Syahrul sering juga tampil di acara-acara di tivi lokal di Makassar, sehingga masyarakat sering melihat beliau dan mengetahui kemampuan yang dimiliki.
- + Bagaimana strategi tim pemenangan Syahrul jika didasarkan pada pemetaan geopolitik di Makassar
- = Iya itu juga penting karena kita tahu Pak Syahrul orang Makassar dan yang mau di lawan ini orang Bugis, maka kita berusaha bagaimana supaya suara di daerah Selatan-Selatan kita lepaskan dan bagaimana juga caranya supaya suara orang-orang di Utara (daerah Bugis) bisa kita kuasai. Dengan majunya Aziz maka terbagi suaranya orang-orang di utara. Jadi memang Pak Syahrul banyak juga mendekati tokoh-tokoh adat tentunya, selain semua jaringan masyarakat dia masuki.

Tanggal 27 Maret 2009

7. Transkrip Wawancara dengan Prof. Abu Hamid (Ketua Dewan Adat Sul Sel)

+Bagaimana posisi lembaga adat pada pemilihan gubernur yang lalu, Prof

=Jadi Lembaga Adat di Sul Sel tidak punya ideologi politik, perannya dalam dunia politik hanya dukungan orang yang ada di partai politik itu, tapi tidak bisa memberi orientasi ideologi untuk mendukung suatu partai politik, itulah lembaga adat dan memang dilarang. Lembaga adat tidak boleh berpolitik, lembaga adat tidak bisa mengembalikan nuansa-nuansa feodalisme, nuansa-nuansa kerajaan, dan itu dilarang apalagi dijadikan jembatan politik. Secara individual memang boleh, tetapi tidak bisa lembaga itu dibawah bertaruh mempunyai ideologi politik. Anggota-anggota lembaga adat bisa berpolitik tapi tidak bisa mempengaruhi anggota-anggota yang lain dalam lembaga adat itu. Jadi rakyat sebenarnya tidak banyak dipengaruhi oleh ketua lembaga adat di daerah karena memang dilarang. Tapi disinilah lucunya karena di Soppeng itu ada ketua lembaga adat sekaligus ketua partai di daerahnya, jadi saya suruh dia pilih mau jadi ketua lembaga adat atau jadi ketua partai dan saya dengar dia memilih ketua partai dan pengurus-pengurusnya juga tidak ada pengurus partai tapi mereka anggota partai. Jadi antara lembaga adat dan partai ada ikatan tapi secara individual saja bukan organisasi. Yang ada sebenarnya kita bisa lihat dalam pemilihan-pemilihan adalah porsi ideologi dari suatu suku bangsa, akan berbedalah porsi orang Bugis, orang Makassar atau orang Toraja. Orang Toraja mayoritas orang Kristen dan Bugis-Makassar Islam tapi Islamnya ini memasuki semua partai yang berbau Islam tapi tidak berarti Golkar ideologinya tidak berbau Islam, tetapi ada yang sudah lama masuk Golkar tapi Golkar menjalankan kampanye politik dengan memanfaatkan agama Islam sebagai orientasinya partainya, maka orang-orang tertarik. Begitu pula dengan PKB jelas orientasi islam tapi orang Bugis-Makassar yang fanatik Islam melihat bahwa islamnya PKB yang pokoknya di Jawa, perilaku Islamnya Jawa dan dengan perilaku Islam di Sul Sel tidak sama. Makanya tidak banyak juga orang masuk PKB. PAN di sul sel juga tidak banyak, yang masuk PAN lebih banyak orang-orang Muhammadiyah, dulu PPP dianggap baik, banyak orang di Sul Sel masuk PPP tapi setelah terpecah maka munculnya PKB dan PAN, maka sudah mulai berkurang. PPP di Sulawesi Selatan ini dianggap adalah partai yang berbau islam yang cocok di Sul Sel, tetapi PPP sendiri terpecah sehingga terpecah suara sekarang. Kalo Toraja jelas, Partainya berbau Kristen maka mereka masuk PDS tapi di Toraja juga sudah mulai ada Islam dan Islamnya Muhammadiyah maka mereka ada yang masuk PAN. Jadi banyak juga disana orang Toraja masuk PAN tapi tidak mutlak itu, tapi pengaruh politik dari dulu adalah Golkar. Jadi Golkar itu karena pengaruh budayanya sejak lama, itulah yang bertahan sampai sekarang tapi karena sekarang banyak partai maka banyak juga pengurusnya yang keluar loncat pagar ke partai lain. Begitu situasi menurut suku bangsa sekarang dengan pemilihan gubernur sekarang dimana Syahrul menggunakan PAN sedangkan Amin Syam menggunakan Golkar, sebagian jazirah di sebelah utara Sulawesi Selatan lebih banyak Golkar sedangkan di jazirah bagian selatan lebih banyak PAN sehingga kalo kita lihat sedikit saja selisih perolehan suaranya.

+ Jadi posisi Bugis-Makassar dalam politik di Sul Sel sama ya, Pak?

=Iya sama karena sudah kawin campurnya antara Bugis Makassar. Mungkin masa yang akan datang atau dalam pemilihan umum ini karena begitu banyaknya caleg, karena saya sudah tanya-tanya orang. Dengan banyaknya partai mungkin masih ada yang terikat pada partai tapi orang lebih banyak pada figur dan pengalaman-pengalaman seseorang. Payah lah sebentar memilih caleg-caleg yang tidak banyak dikenal masyarakat walaupun menduduki urutan atas. Masyarakat sekarang sudah mulai pintar tidak terikat lagi dengan ikatan-ikatan partai, tapi figur yang mereka lihat. Mungkin suatu waktu pemilihan yang akan datang, lebih baik dikurangi saja partai karena tidak terlalu berpengaruh partai. Lebih baik figur saja yang ditampilkan. Tapi figur itu yang perlu pendidikannya harus dinilai, moralitasnya, keturunannya, kejujurannya, yang dilihat, itu untuk masa datang. Nah sekarang ini masih transisi bukan partai lagi yang banyak mendominasi otak rakyat tapi rakyat harus pintar. Figur yang melalukan pendekatan karena pendekatan famili, pendekatan karena tingkat pendidikannya, pendekatan karena sudah berapa kali dilihat kejujurannya, kedaerahannya. Jadi sekarang banyak caleg-caleg yang masuk rumah sakit jiwa karena banyak sekarang mantan-mantan preman jadi caleg dan itulah sekarang politik, jadi mungkin yang akan datang partai dikurangi, figur yang banyak ditonjolkan. Jadi masyarakat harus memproses.

+ Iye (iya) ada juga caleg yang dadakan, tiba-tiba muncul

= Iya betul sekali itu dan ada juga kita sudah tahu, dulu orang tidak melihat orangnya tiba-tiba muncul gambarnya dalam kampanye, maka orang-orang jadi tau, oh..ini yang namanya Hadi Jamal. Seperti melihat misalnya Hadi Jamal dari PAN (*Caleg DPR dari Sul Sel*), yang bahwa agama dia punya, partai, anak kyai, tiba-tiba begitu maka habis nanti itu PAN. PAN itu sudah mulai mundur dengan adanya kadernya seperti itu, iye (iya) dan suara-suara di masyarakat sudah tidak lagi, tapi khan sekarang muncul pembelaan bahwa tidak semua kadernya begitu tapi itu sudah tidak bisa membantu. Walaupun masih ada yang fanantik karena memang sudah didoktrin. Jadi bagian selatan banyak Muhammadiyah sedangkan bagian selatan lebih banyak Sunni tapi tidak semua orang muhammadiyah masuk PAN.

=Iya kenapa sekarang orang Makassar? Satu-satunya etnis Makassar yang bisa muncul adalah Syahrul karena strategi yang dia gunakan. Selama sejarah Sulawesi Selatan ini barusan ada muncul orang Makassar tapi untuk yang akan datang tidak lagi karena satu-satunya kader yang bisa gubernur yang dari Makassar hanya ini, kedepan kembali lagi ke Bugis.

+ Kenapa bisa begitu Prof?

= Karena situasi yang terjadi sekarang, mana sekarang kader orang Makassar yang muncul yang baik-baik? Tidak ada, hanya Syahrul ini. Yang banyak muncul sekarang

Bugis, Makassar kurang muncul yang sama seperti Syahrul ini. Kalo Ichsan, adiknya Syahrul yang Bupati di Gowa belum tentu, karena kerjanya Ichsan ini banyak samanya kecuali ada Mujizat. Syahrul ini bisa muncul karena dia dari wakil gubernur mau jadi gubernur, seandainya dia dari luar mau masuk gubernur. Kalo mau menyerobot masuk tidak bisa, kebetulan dia wakil

+Jadi kalo begitu orang-orang Makassar belum bisa tampil kompetitif

= Masalahnya adalah mutu pendidikan, masalah wawasan, mana orang Makasar yang banyak doktor, kalo syahrul itu doktor. Adiknya Ichsan tidak bisa apa-apa, mana seangkatannya Ichsan yang bisa doktor, kurang. Di Bugis banyak yang berpendidikan sedangkan di Makassar kurang berpendidikan karena situasi desa di daerah Makassar dan daerah Bugis dan Toraja tidak sama. Situasi desa di daerah Makassar masih banyak yang terkungkung tertutup sedangkan desa di daerah Bugis terbuka apalagi Toraja yang terbuka wawasan orang-orang di desa lebih terbuka, sedangkan desa Makassar lebih tertutup dan curiga terhadap orang luar kalo ada orang baru masuk desa langsung dicurigai, lebih-lebih Toraja yang terbuka dengan pariwisatanya. Berarti masyarakatnya disana masih tertutup karena pendidikannya yang terbatas. Kalo SD, SMP, SMA banyak tapi untuk lanjut ke semua universitas kurang, coba saja cari-cari di Unhas, bandingkan...

+ Yang saya lihat juga Prof, semua Rektor Universitas Negeri dari orang Bugis

= Itulah, tidak ada orang Makassar karena itulah desanya lebih tertutup dan tidak dipentingkan bagaimana orientasi memperbaiki pendidikan untuk mendapatkan jabatan tapi yang pokoknya bagaimana bisa hidup, dan Syahrul sampai saat ini tidak pernah mau membentuk masyarakat Makassar supaya bangkit naik, tidak ada orientasinya saya lihat. Semestinya dia membentuk masyarakat Makassar alam pikiran, pengetahuannya pendidikan, tapi tidak ada saya lihat. Dia tidak peduli sehingga tidak ada kader dari Makassar yang muncul. Syahrul ini kan mau nasional sehingga tidak mau lagi pikiran-pikiran etnik. Padahal kalo mau kita lihat kekerabatan suku bangsa sangat kuat beda dengan daerah lain. Disini masih dikenal sepupu satu kali, dua kali sampai tiga kali begitupun dengan urutan empat tingkat naik keatas, makanya jika tidak kenal lagi maka ditampilkan dalam silsilah kekerabatan. Gunanya rumpun kekeluargaan itu untuk kalo ada acara perkawinan atau kematian dipanggil semua sehingga banyak keluarga yang diundang,akhirnya ramai upacara karena rumpun. Masalah kawin sekarang sudah banyak yang kawin antar suku, sudah banyak yang kawin di Jawa tapi Sulawesi Selatan asalnya idenya adalah kawin dalam rumpun, Endogami namanya. SulSel adalah endogami. Dulu raja-raja kawin sepupu satu kali sehingga keturunannya banyak yang bodoh karena gennya jelek, sekarang tidak lagi karena hasil pendidikan. Kalo di Bugis sudah banyak yang kawin keluar. Orang-orang Bugis kawin di luar karena mahalnya mahar. Orang Makassar masih putar-putar disitu, Orang Toraja juga masih sehingga kebodohan dan kemiskinan juga putar-putar di dalam.

